

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KEUANGAN (BA. 022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2014 *(Audited)*



JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8 JAKARTA 10110

BAGIAN ANGGARAN 022



**LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2014
(*AUDITED*)**

Jl. Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat 10110

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kementerian Perhubungan adalah salah satu entitas pelaporan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kementerian Perhubungan. Disamping itu laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 2015

MENTERI PERHUBUNGAN



IGNASIOUS JONAN

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Grafik	vi
Pernyataan Tanggung Jawab Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	4
II. Neraca	5
III. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
A.1. Dasar Hukum	7
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis	8
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	25
A.4. Kebijakan Akuntansi	26
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	34
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	34
B.2. Belanja Negara	35
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	48
C.1. Aset Lancar	48
C.2. Aset Tetap	63
C.3. Piutang Jangka Panjang	73
C.4. Aset Lainnya	74
C.5. Kewajiban Jangka Pendek	78
C.6. Ekuitas Dana Lancar	81
C.7. Ekuitas Dana Investasi	83
D. Pengungkapan Penting Lainnya	84
D.1. Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca (<i>Subsequent Event</i>)	84
D.2. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK	85
D.3. Rekening Pemerintah	85
D.4. Catatan Penting Lainnya	85

Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap

Daftar Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua

Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)

Daftar Kas di Bendahara Pengeluaran

Daftar Kas di Bendahara Penerimaan

Daftar Kas dan Setara Kas

Grafik 1	: Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2014
----------	--

37

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel (i) : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2014 (<i>Audited</i>) dan 2013 (<i>Audited</i>)	1
Tabel (ii) : Ringkasan Neraca Per 31 Desember 2014 (<i>Audited</i>) dan 2013 (<i>Audited</i>)	2
Tabel 1 : Rekapitulasi Jumlah Satker UAKPA	26
Tabel 2 : Penggolongan Kualitas Piutang	32
Tabel 3 : Penggolongan Masa Manfaat	33
Tabel 4 : Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan	34
Tabel 5 : Perbandingan Realisasi PNBPA TA 2014 dan 2013	35
Tabel 6 : Perbandingan Realisasi PNBPA Per Eselon I TA 2014	35
Tabel 7 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja menurut Program TA .2014	36
Tabel 8 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2014	36
Tabel 9 : Perbandingan Realisasi Belanja TA 2014 dan 2013	37
Tabel 10 : Perbandingan Belanja Pegawai TA 2014 dan TA 2013	38
Tabel 11 : Perbandingan Belanja Pegawai TA 2014 per Unit Eselon I	38
Tabel 12 : Uraian Jenis Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	39
Tabel 13 : Perbandingan Belanja Barang TA 2014 dan TA 2013	40
Tabel 14 : Perbandingan Belanja Barang TA 2014 Per Unit Eselon I	41
Tabel 15 : Uraian Jenis Belanja Barang Operasional	41
Tabel 16 : Uraian Jenis Belanja Barang Non Operasional	42
Tabel 17 : Uraian Jenis Belanja Pemeliharaan	42
Tabel 18 : Uraian Jenis Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	42
Tabel 19 : Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2014 dan 2013	44
Tabel 20 : Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2014 Per Unit Eselon I	44
Tabel 21 : Uraian Jenis Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45
Tabel 22 : Uraian Jenis Belanja Modal Gedung dan Bangunan	46
Tabel 23 : Uraian Jenis Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	46
Tabel 24 : Uraian Jenis Belanja Modal Lainnya	47
Tabel 25 : Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2014 dan 2013	48
Tabel 26 : Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per Eselon I	49
Tabel 27 : Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran	49
Tabel 28 : Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per Eselon I	50
Tabel 29 : Rincian Kas di Bendahara Penerimaan	50
Tabel 30 : Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Ditjen Perhubungan Laut	50
Tabel 31 : Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Ditjen Perhubungan Udara	51
Tabel 32 : Rincian Saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada BPSDMP	51
Tabel 33 : Rincian Saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada PPSDM Perhubungan Udara	52

Tabel 34	: Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas	53
Tabel 35	: Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per Eselon I	53
Tabel 36	: Besarnya Saldo Kas pada masing-masing BLU	54
Tabel 37	: Rincian Investasi Jangka Pendek BLU	54
Tabel 38	: Belanja Dibayar Dimuka per Eselon I	55
Tabel 39	: Piutang Bukan Pajak per Eselon I	55
Tabel 40	: Piutang Bukan Pajak pada BPSDM Perhubungan	57
Tabel 41	: Rincian Piutang Bukan Pajak TUPOKSI per 31 Desember 204	57
Tabel 42	: Rincian Piutang Bukan Pajak Non TUPOKSI per 31 Desember 204	58
Tabel 43	: Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Bukan Pajak per Eselon I	58
Tabel 44	: Bagian Lancar TP/TGR per Eselon I	59
Tabel 45	: Penyisihan Piutang Tidak Tertagih BL TP/TGR	60
Tabel 46	: Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per Satker BLU	60
Tabel 47	: Rincian Jenis Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	60
Tabel 48	: Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Kegiatan Operasional BLU	61
Tabel 49	: Rincian Persediaan per Eselon I	61
Tabel 50	: Daftar Persediaan Per 31 Desember 2014	62
Tabel 51	: Rincian Persediaan masing-masing satker Badan Layanan Umum	63
Tabel 52	: Daftar Persediaan BLU per 31 Desember 2014	63
Tabel 53	: Posisi Aset Tetap	63
Tabel 54	: Rincian Aset Tetap Per Eselon I	64
Tabel 55	: Posisi Aset Tetap Badan Layanan Umum	64
Tabel 56	: Daftar Perbandingan Aset Tetap antara Neraca dan SIMAK BMN per 31 Desember 2014	64
Tabel 57	: Rincian Mutasi Tanah	65
Tabel 58	: Tanah Non BLU Per Eselon I	65
Tabel 59	: Tanah BLU Per Satker	66
Tabel 60	: Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin Per Kelompok	66
Tabel 61	: Peralatan dan Mesin Non BLU Per Eselon I	67
Tabel 62	: Peralatan dan Mesin BLU Per Satker	67
Tabel 63	: Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan	68
Tabel 64	: Gedung dan Bangunan Non BLU Per Eselon I	68
Tabel 65	: Gedung dan Bangunan BLU Per Satker	68
Tabel 66	: Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan Per Kelompok	69
Tabel 67	: Jalan, Irigasi, dan Jaringan Non BLU Per Eselon I	69
Tabel 68	: Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU per Satker	70
Tabel 69	: Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya Per Kelompok	70
Tabel 70	: Aset Tetap Lainnya Non BLU Per Eselon I	70
Tabel 71	: Aset Tetap Lainnya BLU Per Satker	71
Tabel 72	: Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan	71
Tabel 73	: Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan Per Eselon I	71

Tabel 74	: Kontruksi Dalam Pengerjaan Non BLU Per Eselon I	72
Tabel 75	: Konstruksi Dalam Pengerjaan BLU per Satker	72
Tabel 76	: Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	73
Tabel 77	: Rincian Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per Eselon I	73
Tabel 78	: Penyisihan Piutang Tidak Tertagih TP/TGR per Eselon I	74
Tabel 79	: Aset Lainnya Per Eselon I	74
Tabel 80	: Rincian Aset Lainnya	74
Tabel 81	: Rincian Aset Lainnya Per Eselon I Menurut Jenisnya	74
Tabel 82	: Rincian Aset Tak Berwujud per Eselon I	75
Tabel 83	: Rincian Aset Tak Berwujud Menurut Jenisnya	75
Tabel 84	: Rincian Aset Tak Berwujud Per Eselon I Menurut Jenisnya	75
Tabel 85	: Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan Per Eselon I	76
Tabel 86	: Aset Lain-Lain Non BLU Per Eselon I	77
Tabel 87	: Rincian Aset Lain-lain BLU Per Satker	77
Tabel 88	: Utang kepada Pihak Ketiga per Eselon I	78
Tabel 89	: Rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Ditjen Perhubungan Darat	79
Tabel 90	: Rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Ditjen Perhubungan Udara	79
Tabel 91	: Rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada BPSDM Perhubungan	80
Tabel 92	: Rincian Pendapatan Diterima di Muka	80
Tabel 93	: Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya	81
Tabel 94	: Rincian Ekuitas Dana Lancar	81
Tabel 95	: Rincian Ekuitas Dana Investasi	83
Tabel 96	: Rincian Nilai KDP 2014 yang Bisa Direklasifikasi ke Aset Definitif di Tahun 2015 per Jenis KDP	84
Tabel 97	: Rincian Nilai KDP 2014 yang Bisa Direklasifikasi ke Aset Definitif di Tahun 2015 per Eselon I	84
Tabel 98	: Rincian Satker yang Akan Dilikuidasi pada Ditjen Perhubungan Udara	88
Tabel 99	: Rincian Hibah pada Ditjen Perhubungan Laut	91
Tabel 100	: Rincian Saldo Dana RFC	93
Tabel 101	: Rincian Hibah pada BPSDM Perhubungan	94



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. : (021) 3811308, 3505006
FAX : (021) 3451657
SMS center : +62.813-111111-05

TLX : 46116 Menhub IA
email : pusdatin@dephub.go.id
home page : www.dephub.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014 (*Audited*) sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 2015

MENTERI PERHUBUNGAN

IGNASIUS JONAN

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2014 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2014.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2014 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp2.013.747.142.168,- atau mencapai 151,26 persen dari estimasi pendapatan sebesar Rp1.331.289.046.545,-

Realisasi Belanja Negara pada TA 2014 adalah sebesar Rp28.722.769.749.220,- atau mencapai 77,10 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp37.256.074.433.300,-

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2014 dan 2013 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel (i)

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2014 dan 2013

Uraian	TA 2014 (<i>Audited</i>)			TA 2013
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi thd Anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	1.331.289.046.545	2.013.747.142.168	151,26	1.893.404.541.039
Belanja Negara	37.256.074.433.300	28.722.769.749.220	77,10	31.718.259.929.128

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada 31 Desember 2014 dan 2013.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 31 Desember 2014 dicatat dan disajikan sebesar Rp164.461.423.999.928,- yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp4.626.897.066.595,-, Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp155.704.623.514.500,-, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp4.129.903.418.833,-.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp69.014.801.620,- yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp164.392.409.198.308,- yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp4.557.882.264.975,- dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp159.834.526.933.333,-.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2014 dan 2013 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel (ii)
Ringkasan Neraca per 31 Desember 2014 (*Audited*) dan 2013 (*Audited*)

Uraian	31-Des-2014 (<i>Audited</i>) (Rp)	31-Des-2013 (<i>Audited</i>) (Rp)	Kenaikan / Penurunan	
			Rp	%
ASET				
Aset Lancar	4.626.897.066.595	1.119.714.158.321	3.507.182.908.274	313,22
Aset Tetap	155.704.623.514.500	143.507.204.560.291	12.197.418.954.209	8,50
Piutang Jangka Panjang	-	396.493.660	(396.493.660)	(100,00)
Aset Lainnya	4.129.903.418.833	3.696.717.507.301	433.185.911.532	11,72
Jumlah Aset	164.461.423.999.928	148.324.032.719.573	16.137.391.280.355	10,88
KEWAJIBAN				
Kewajiban Jangka Pendek	69.014.801.620	460.597.656.980	(391.582.855.360)	(85,02)
Jumlah Kewajiban	69.014.801.620	460.597.656.980	(391.582.855.360)	(85,02)
EKUITAS DANA				
Ekuitas Dana Lancar	4.557.882.264.975	659.116.501.341	3.898.765.763.634	591,51
Ekuitas Dana Invesrasi	159.834.526.933.333	147.204.318.561.252	12.630.208.372.081	8,58
Jumlah Ekuitas Dana	164.392.409.198.308	147.863.435.062.593	16.528.974.135.715	11,18
Jumlah Kewajiban & Ekuitas	164.461.423.999.928	148.324.032.719.573	16.137.391.280.355	10,88

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per tanggal 31 Desember 2014, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013

(dalam Rp)

URAIAN	Catatan	TA 2014 (<i>Audited</i>)		% Terhadap Anggaran	TA 2013
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
A. Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak		1.331.289.046.545	2.013.747.142.168	151,26	1.893.404.541.039
Jumlah Pendpt Negara & Hibah		1.331.289.046.545	2.013.747.142.168	151,26	1.893.404.541.039
B. Belanja Negara	B.2				
1. Belanja Pegawai	B.2.1	2.569.680.819.246	2.360.706.602.572	91,87	1.950.792.958.299
2. Belanja Barang	B.2.2	10.415.617.150.538	7.387.401.880.927	70,93	6.183.732.107.026
3. Belanja Modal	B.2.3	24.270.776.463.516	18.958.316.041.721	78,11	23.572.271.260.744
4. Belanja Modal Non Kas		-	16.345.224.000	0,00	11.463.603.059
Jumlah Belanja Negara		37.256.074.433.300	28.722.769.749.220	77,10	31.718.259.929.128

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No	URAIAN	2014				2013			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH								
A.I	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH TRANSAKSI KAS	1,331,289,046,545	2,013,747,142,168	682,458,095,623	151.26	772,213,244,876	1,893,404,541,039	1,121,191,296,163	245.19
A.I.1	PENERIMAAN NEGARA	1,331,289,046,545	2,013,747,142,168	682,458,095,623	151.26	772,213,244,876	1,893,404,541,039	1,121,191,296,163	245.19
A.I.1.a	Penerimaan Perpajakan	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
A.I.1.b	Penerimaan Negara Bukan Pajak	1,331,289,046,545	2,013,747,142,168	682,458,095,623	151.26	772,213,244,876	1,893,404,541,039	1,121,191,296,163	245.19
A.I.2	HIBAH	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
A.II	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH TRANSAKSI NON KAS	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
A.II.1	PENERIMAAN NEGARA NON KAS	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
A.II.1.a	Penerimaan Perpajakan Non Kas	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
A.II.1.b	Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Kas	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
A.II.2	HIBAH NON KAS	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH (A.I + A. II)	1,331,289,046,545	2,013,747,142,168	682,458,095,623	151.26	772,213,244,876	1,893,404,541,039	1,121,191,296,163	245.19
B	BELANJA NEGARA								
B.I	BELANJA TRANSAKSI KAS	37,256,074,433,300	28,706,424,525,220	(8,549,649,908,080)	77.05	35,926,285,034,100	31,706,796,326,069	(4,219,488,708,031)	88.26
B.I.1	Rupiah Murni	32,431,650,861,300	26,629,149,723,243	(5,802,501,138,057)	82.11	33,454,662,010,100	30,125,679,511,498	(3,328,982,498,602)	90.05
B.I.1.a	Belanja Pegawai	2,569,680,819,246	2,360,706,602,572	(208,974,216,674)	91.87	2,080,598,769,100	1,950,792,958,299	(129,805,810,801)	93.76
B.I.1.b	Belanja Barang	10,413,591,150,538	7,385,393,937,497	(3,028,197,213,041)	70.92	7,261,475,271,000	6,179,688,068,026	(1,081,787,202,974)	85.10
B.I.1.c	Belanja Modal	19,448,378,891,516	16,883,049,183,174	(2,565,329,708,342)	86.81	24,112,587,970,000	21,995,198,485,173	(2,117,389,484,827)	91.22
B.I.1.d	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.1.e	Subsidi	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.1.f	Hibah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.1.g	Bantuan Sosial	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.1.h	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.2	Pinjaman dan Hibah	4,824,423,572,000	2,077,274,801,977	(2,747,148,770,023)	43.06	2,471,623,024,000	1,581,116,814,571	(890,506,209,429)	63.97
B.I.2.a	Belanja Pegawai	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.2.b	Belanja Barang	2,026,000,000	2,007,943,430	(18,056,570)	99.11	6,313,607,000	4,044,039,000	(2,269,568,000)	64.05
B.I.2.c	Belanja Modal	4,822,397,572,000	2,075,266,858,547	(2,747,130,713,453)	43.03	2,465,309,417,000	1,577,072,775,571	(888,236,641,429)	63.97
B.I.2.d	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.2.e	Subsidi	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.2.f	Hibah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.2.g	Bantuan Sosial	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.2.h	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Kode Lap. : LRAKT
Tanggal : 05 Mei 2015
Halaman : 2
Prog.ko : lu_pusat

No	URAIAN	2014				2013			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B.II	BELANJA TRANSAKSI NON KAS	0	16,345,224,000	16,345,224,000	0.00	0	11,463,603,059	11,463,603,059	0.00
B.II.1	Belanja Pegawai Non Kas	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.II.2	Belanja Barang Non Kas	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.II.3	Belanja Modal Non Kas	0	16,345,224,000	16,345,224,000	0.00	0	11,463,603,059	11,463,603,059	0.00
B.II.4	Pembayaran Bunga Utang Non Kas	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.II.5	Subsidi Non Kas	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.II.6	Hibah Non Kas	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.II.7	Bantuan Sosial Non Kas	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.II.8	Belanja Lain-lain Non Kas	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	JUMLAH BELANJA (B.I + B. II)	37,256,074,433,300	28,722,769,749,220	(8,533,304,684,080)	77.10	35,926,285,034,100	31,718,259,929,128	(4,208,025,104,972)	88.29
C	PEMBIAYAAN								
C.I	PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.I.1	Perbankan Dalam Negeri	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.I.2	Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.II	PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.II.1	Penarikan Pinjaman Luar Negeri	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.II.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	JUMLAH PEMBIAYAAN (C.1 +C.2)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00


MENTERI PERHUBUNGAN
IGNASIUS JONAN

II. NERACA

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2014 DAN 31 DESEMBER 2013

(dalam Rp)

Uraian	Catatan	31 Desember 2014	31 Desember 2013
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	628.188.760	1.167.058.545
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.2	14.426.548.539	10.121.153.259
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.3	2.694.204.039	424.615.684.680
Kas pada Badan Layanan Umum	C.1.4	247.960.743.934	193.152.487.378
Investasi Jangka Pendek Badan Layanan Umum	C.1.5	60.000.000.000	25.023.013.699
Belanja Dibayar di Muka (prepaid)	C.1.6	1.433.039.639	219.863.167
Uang Muka Belanja (Prepayment)	C.1.7	4.545.398.220	22.216.828.700
Piutang Bukan Pajak	C.1.8	134.172.732.011	167.358.155.328
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.1.9	(24.363.665.547)	(19.276.250.570)
Bag Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.1.10	11.608.705.570	25.703.566.497
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bag Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.1.11	(11.606.013.528)	(128.517.833)
Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	C.1.12	1.454.917.500	2.656.899.000
Penyisihan Piutang tak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	C.1.13	(47.136.775)	(53.146.683)
Piutang dari kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum	C.1.14	6.334.000	0
Penyisihan Piutang Tidak tertagih – Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	C.1.15	(31.670)	0
Persediaan	C.1.16	4.179.931.197.304	264.005.547.156
Persediaan Badan Layanan Umum	C.1.17	4.051.904.599	2.931.815.998
Jumlah Aset Lancar		4.626.897.066.595	1.119.714.158.321
ASET TETAP	C.2		
Tanah	C.2.1.1	59.568.342.874.967	57.388.535.368.980
Tanah Badan Layanan Umum	C.2.1.2	1.243.957.952.520	1.265.874.384.051
Peralatan dan Mesin	C.2.2.1	27.605.435.103.897	22.863.639.549.608
Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum	C.2.2.2	1.264.828.991.225	1.064.403.552.977
Gedung dan Bangunan	C.2.3.1	12.223.456.204.550	9.579.087.072.196
Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum	C.2.3.2	1.149.325.073.010	1.221.062.700.116
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.2.4.1	76.225.506.282.684	63.703.842.252.840
Jalan Irigasi dan Jaringan Badan Layanan Umum	C.2.4.2	86.471.531.291	52.724.893.361
Aset Tetap Lainnya	C.2.5.1	2.923.998.514.036	2.094.146.850.907
Aset Tetap lainnya Badan Layanan Umum	C.2.5.2	21.288.182.180	17.400.241.482
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2.6.1	22.470.367.806.404	28.032.064.309.662
Konstruksi dalam Pengerjaan Badan Layanan Umum	C.2.6.2	31.124.163.396	12.505.118.867
Akumulasi Penyusutan	C.2.7	(49.109.479.165.660)	(43.788.081.734.756)
Jumlah Aset Tetap		155.704.623.514.500	143.507.204.560.291

Uraian	Catatan	31 Desember 2014	31 Desember 2013
PIUTANG JANGKA PANJANG	C.3		
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.3.1	328.355.976	412.578.733
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TP/TGR	C.3.2	(328.355.976)	(16.085.073)
Jumlah Piutang Jangka Panjang		0	396.493.660
ASET LAINNYA	C.4		
Aset Tak Berwujud	C.4.1	2.585.368.604.956	2.130.288.135.264
Aset Tak Berwujud Badan Layanan Umum		95.984.909.238	76.395.841.868
Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan	C.4.2	15.907.507.700	16.045.930.645
Aset Lain-lain	C.4.3.1	1.551.567.664.917	2.000.823.341.710
Aset Lain-lain Badan Layanan Umum	C.4.3.2	6.418.949.000	3.143.062.801
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4.4	(125.344.216.978)	(529.978.804.987)
Jumlah Aset Lainnya		4.129.903.418.833	3.696.717.507.301
JUMLAH ASET		164.461.423.999.928	148.324.032.719.573
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.5		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5.1	27.238.042.421	427.063.813.222
Pendapatan Diterima di Muka	C.5.2	26.631.603.521	22.241.989.715
Uang Muka dari KPPN	C.5.3	628.188.760	1.167.058.545
Pendapatan yang Ditangguhkan	C.5.4	14.496.853.536	10.124.795.498
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.5.5	20.113.382	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		69.014.801.620	460.597.656.980
JUMLAH KEWAJIBAN		69.014.801.620	460.597.656.980
EKUITAS DANA			
EKUITAS DANA LANCAR	C.6		
Cadangan Piutang	C.6.1	111.225.841.561	176.260.705.739
Cadangan Persediaan	C.6.2	4.183.983.101.903	266.937.363.154
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jk Pendek	C.6.3	(26.971.354.834)	(4.645.060.172)
Dana Lancar Badan Layanan Umum	C.6.4	307.960.743.934	218.175.501.077
Ekuitas Dana Lancar Lainnya	C.6.5	2.337.098.073	2.193.289.391
Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima	C.6.6	5.978.437.859	22.436.691.867
Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan	C.6.7	(26.631.603.521)	(22.241.989.715)
Jumlah Ekuitas Dana Lancar		4.557.882.264.975	659.116.501.341
EKUITAS DANA INVESTASI	C.7		
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	C.7.1	155.704.623.514.500	143.507.204.560.291
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	C.7.2	4.129.903.418.833	3.697.114.000.961
Jumlah Ekuitas Dana Investasi		159.834.526.933.333	147.204.318.561.252
JUMLAH EKUITAS DANA		164.392.409.198.308	147.863.435.062.593
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		164.461.423.999.928	148.324.032.719.573

NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN/ LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(DALAM RUPIAH)

Kode Laporan: NSAIKLT
Tanggal : 05/05/15
Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2014	2013	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	628,188,760	1,167,058,545	(538,869,785)	(46.17)
Kas di Bendahara Penerimaan	14,426,548,539	10,121,153,259	4,305,395,280	42.54
Kas Lainnya dan Setara Kas	2,694,204,039	424,615,684,680	(421,921,480,641)	(99.37)
Kas pada Badan Layanan Umum	247,960,743,934	193,152,487,378	54,808,256,556	28.38
Investasi Jangka Pendek- Badan Layanan Umum	60,000,000,000	25,023,013,699	34,976,986,301	139.78
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	1,433,039,639	219,863,167	1,213,176,472	551.79
Uang muka belanja (prepayment)	4,545,398,220	22,216,828,700	(17,671,430,480)	(79.54)
Piutang Bukan Pajak	134,172,732,011	167,358,155,328	(33,185,423,317)	(19.83)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(24,363,665,547)	(19,276,250,570)	(5,087,414,977)	26.39
<i>Piutang Bukan Pajak (Netto)</i>	<i>109,809,066,464</i>	<i>148,081,904,758</i>	<i>(38,272,838,294)</i>	<i>(25.85)</i>
Bagihan Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	11,608,705,570	25,703,566,497	(14,094,860,927)	(54.84)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(11,606,013,528)	(128,517,833)	(11,477,495,695)	8,930.66
<i>Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)</i>	<i>2,692,042</i>	<i>25,575,048,664</i>	<i>(25,572,356,622)</i>	<i>(99.99)</i>
Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	1,454,917,500	2,656,899,000	(1,201,981,500)	(45.24)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	(47,136,775)	(53,146,683)	6,009,908	(11.31)
<i>Piutang dari Kegiatan Operasional BLU (Netto)</i>	<i>1,407,780,725</i>	<i>2,603,752,317</i>	<i>(1,195,971,592)</i>	<i>(45.93)</i>
Piutang dari kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum	6,334,000	0	6,334,000	0.00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	(31,670)	0	(31,670)	0.00
<i>Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU (Netto)</i>	<i>6,302,330</i>	<i>0</i>	<i>6,302,330</i>	<i>0.00</i>
Persediaan	4,179,931,197,304	264,005,547,156	3,915,925,650,148	1,483.27
Persediaan Badan Layanan Umum	4,051,904,599	2,931,815,998	1,120,088,601	38.20
JUMLAH ASET LANCAR	4,626,897,066,595	1,119,714,158,321	3,507,182,908,274	313.22
ASET TETAP				
Tanah	59,568,342,874,967	57,388,535,368,980	2,179,807,505,987	3.80
Tanah Badan Layanan Umum	1,243,957,952,520	1,265,874,384,051	(21,916,431,531)	(1.73)
Peralatan dan Mesin	27,605,435,103,897	22,863,639,549,608	4,741,795,554,289	20.74
Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum	1,264,828,991,225	1,064,403,552,977	200,425,438,248	18.83
Gedung dan Bangunan	12,223,456,204,550	9,579,087,072,196	2,644,369,132,354	27.61
Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum	1,149,325,073,010	1,221,062,700,116	(71,737,627,106)	(5.88)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	76,225,506,282,684	63,703,842,252,840	12,521,664,029,844	19.66

NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN/ LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(DALAM RUPIAH)

Kode Laporan: NSAIKLT
Tanggal : 05/05/15
Halaman : 2

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

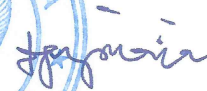
NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2014	2013	Jumlah	%
1	2	3	4	5
Jalan,Irigasi, dan Jaringan Badan Layanan Umum	86,471,531,291	52,724,893,361	33,746,637,930	64.01
Aset Tetap Lainnya	2,923,998,514,036	2,094,146,850,907	829,851,663,129	39.63
Aset Tetap Lainnya Badan Layanan Umum	21,288,182,180	17,400,241,482	3,887,940,698	22.34
Konstruksi Dalam Pengerjaan	22,470,367,806,404	28,032,064,309,662	(5,561,696,503,258)	(19.84)
Konstruksi Dalam Pengerjaan Badan Layanan Umum	31,124,163,396	12,505,118,867	18,619,044,529	148.89
Akumulasi Penyusutan	(49,109,479,165,660)	(43,788,081,734,756)	(5,321,397,430,904)	12.15
JUMLAH ASET TETAP	155,704,623,514,500	143,507,204,560,291	12,197,418,954,209	8.50
PIUTANG JANGKA PANJANG				
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	328,355,976	412,578,733	(84,222,757)	(20.41)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(328,355,976)	(16,085,073)	(312,270,903)	1,941.37
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)	0	396,493,660	(396,493,660)	(100.00)
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG	0	396,493,660	(396,493,660)	(100.00)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	2,585,368,604,956	2,130,288,135,264	455,080,469,692	21.36
Aset Tak Berwujud- Badan Layanan Umum	95,984,909,238	76,395,841,868	19,589,067,370	25.64
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	15,907,507,700	16,045,930,645	(138,422,945)	(0.86)
Aset Lain-lain	1,551,567,664,917	2,000,823,341,710	(449,255,676,793)	(22.45)
Aset Lain-lain-Badan Layanan Umum	6,418,949,000	3,143,062,801	3,275,886,199	104.23
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	(125,344,216,978)	(529,978,804,987)	404,634,588,009	(76.35)
JUMLAH ASET LAINNYA	4,129,903,418,833	3,696,717,507,301	433,185,911,532	11.72
JUMLAH ASET	164,461,423,999,928	148,324,032,719,573	16,137,391,280,355	10.88
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	27,238,042,421	427,063,813,222	(399,825,770,801)	(93.62)
Pendapatan Diterima Dimuka	26,631,603,521	22,241,989,715	4,389,613,806	19.74
Uang Muka dari KPPN	628,188,760	1,167,058,545	(538,869,785)	(46.17)
Pendapatan Yang Ditangguhkan	14,496,853,536	10,124,795,498	4,372,058,038	43.18
Utang Jangka Pendek Lainnya	20,113,382	0	20,113,382	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	69,014,801,620	460,597,656,980	(391,582,855,360)	(85.02)
JUMLAH KEWAJIBAN	69,014,801,620	460,597,656,980	(391,582,855,360)	(85.02)
EKUITAS DANA				
EKUITAS DANA LANCAR				
Cadangan Piutang	111,225,841,561	176,260,705,739	(65,034,864,178)	(36.90)
Cadangan Persediaan	4,183,983,101,903	266,937,363,154	3,917,045,738,749	1,467.40
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek	(26,971,354,834)	(4,645,060,172)	(22,326,294,662)	480.65

NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN/ LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(DALAM RUPIAH)

Kode Laporan: NSAIKLT
Tanggal : 05/05/15
Halaman : 3

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2014	2013	Jumlah	%
1	2	3	4	5
Dana Lancar BLU	307,960,743,934	218,175,501,077	89,785,242,857	41.15
Ekuitas Dana Lancar Lainnya	2,337,098,073	2,193,289,391	143,808,682	6.56
Barang/Jasa yang Harus Diterima	5,978,437,859	22,436,691,867	(16,458,254,008)	(73.35)
Barang/Jasa Yang Harus Diserahkan	(26,631,603,521)	(22,241,989,715)	(4,389,613,806)	19.74
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR	4,557,882,264,975	659,116,501,341	3,898,765,763,634	591.51
EKUITAS DANA INVESTASI				
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	155,704,623,514,500	143,507,204,560,291	12,197,418,954,209	8.50
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	4,129,903,418,833	3,697,114,000,961	432,789,417,872	11.71
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI	159,834,526,933,333	147,204,318,561,252	12,630,208,372,081	8.58
JUMLAH EKUITAS DANA	164,392,409,198,308	147,863,435,062,593	16,528,974,135,715	11.18
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	164,461,423,999,928	148,324,032,719,573	16,137,391,280,355	10.88


MENTERI PERHUBUNGAN

IGNASIVS JONAN

III. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum

A.1. DASAR HUKUM

a. Penyusunan Laporan Keuangan

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- 5) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM.66 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Kantor/Satker di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
- 6) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- 7) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 24 Tahun 2014 tentang Penatausahaan Hibah Langsung di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
- 8) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Pengintegrasian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum ke dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
- 9) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

b. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perhubungan.

c. Pengelolaan Barang Milik Negara

- 1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.
- 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.
- 3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 39 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

d. Pengelolaan Belanja

- 1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 80 Tahun 2014 tentang Perubahan ke Empat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen Perhubungan.

A.2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Rencana Strategis

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2010–2014

I. VISI

Visi Kementerian Perhubungan Tahun 2010-2014 adalah **“Terwujudnya pelayanan perhubungan yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah.”** Pelayanan perhubungan yang handal, diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan yang aman (*security*), selamat (*safety*), nyaman (*comfortable*), tepat waktu (*punctuality*), terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh pelosok tanah air serta mampu mendukung pembangunan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pelayanan perhubungan yang berdaya saing diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan yang efisien, dengan harga terjangkau (*affordability*) oleh semua lapisan masyarakat, ramah lingkungan, berkelanjutan, dilayani oleh SDM yang profesional, mandiri dan produktif. Pelayanan perhubungan yang memberikan nilai tambah diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong pertumbuhan produksi nasional melalui iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya

peran serta masyarakat, usaha kecil, menengah dan koperasi, mengendalikan laju inflasi melalui kelancaran mobilitas orang dan distribusi barang ke seluruh pelosok tanah air, sehingga mampu memberikan kontribusi bagi percepatan pertumbuhan ekonomi nasional serta menciptakan lapangan kerja terutama pada sektor-sektor andalan yang mendapat manfaat dari kelancaran pelayanan transportasi.

II. MISI

Untuk mencapai visi tersebut, dirumuskan misi dengan mengacu kepada tiga pendekatan, yaitu: Pertama, pemulihan kondisi sarana dan prasarana perhubungan agar berfungsi seperti pada masa sebelum krisis ekonomi; Kedua, melakukan konsolidasi dengan reorientasi dan reposisi peran dan fungsi Kementerian Perhubungan dalam kerangka *good governance*; Ketiga, melaksanakan pembangunan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan jasa perhubungan. Oleh karena itu misi Kementerian Perhubungan sesuai dengan tiga pendekatan tersebut adalah:

a. Mempertahankan tingkat pelayanan jasa perhubungan:

Sejak terjadi krisis ekonomi yang didahului dengan krisis moneter pada pertengahan tahun 1997, kinerja pelayanan jasa perhubungan semakin memburuk karena operator tidak mampu melakukan perawatan dan peremajaan armada, pemerintah hampir tidak memiliki kemampuan melakukan rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur, sedangkan masyarakat pengguna jasa tidak memiliki daya beli yang memadai. Untuk mendukung keberhasilan pembangunan nasional, perlu diupayakan pemulihan kinerja pelayanan jasa perhubungan menuju kepada kondisi normal, sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional, melalui rehabilitasi dan perawatan sarana dan prasarana perhubungan.

b. Melaksanakan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang perhubungan (*regulatory reform*) dan penegakan hukum secara konsisten:

Sesuai dengan prinsip *good governance* dipandang perlu melakukan restrukturisasi dan reformasi di bidang perhubungan dengan pemisahan

yang jelas antara peran pemerintah, swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan jasa perhubungan. Restrukturisasi di bidang kelembagaan, mengarahkan posisi Kementerian Perhubungan sebagai regulator dan melimpahkan sebagian kewenangan di bidang perhubungan kepada daerah dalam bentuk dekonsentrasi, desentralisasi dan perbantuan. Reformasi di bidang regulasi (*regulatory reform*) diarahkan kepada penghilangan restriksi yang memungkinkan swasta berperan secara penuh dalam penyelenggaraan jasa perhubungan. Penegakan hukum dilakukan secara konsisten dengan melibatkan peranserta masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa perhubungan.

c. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa perhubungan:

Kebutuhan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa perhubungan yang perlu mendapatkan perhatian adalah aksesibilitas di kawasan perdesaan, kawasan pedalaman, kawasan tertinggal termasuk kawasan perbatasan yang masih menjadi tanggungjawab pemerintah.

d. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan jasa perhubungan:

Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan jasa perhubungan dititikberatkan kepada penambahan kapasitas sarana dan prasarana perhubungan, perbaikan pelayanan melalui penerapan teknologi transportasi sejalan dengan perkembangan permintaan dan preferensi masyarakat. Dalam peningkatan kapasitas dan pelayanan jasa perhubungan senantiasa berpedoman kepada rencana induk, pedoman teknis dan skema pendanaan yang ditetapkan.

III. TUJUAN

Pembangunan Kementerian Perhubungan dalam kurun waktu 2010-2014 bertujuan untuk mendukung perwujudan Indonesia yang lebih sejahtera, sejalan dengan perwujudan Indonesia yang aman dan damai serta adil dan demokratis.

Dalam mewujudkan dukungan tersebut penyelenggaraan transportasi harus berjalan secara efektif dan efisien guna menunjang dan mendorong keberhasilan pembangunan nasional. Penyelenggaraan kegiatan transportasi yang efektif berkaitan dengan ketersediaan aksesibilitas, optimalisasi kapasitas, maksimalisasi kualitas serta keterjangkauan dalam pelayanan, sedangkan penyelenggaraan transportasi yang efisien berkaitan dengan maksimalisasi dayaguna dan minimalisasi biaya yang menjadi beban masyarakat.

IV. SASARAN DAN PRIORITAS

a. SASARAN

Sasaran pembangunan Kementerian Perhubungan diarahkan kepada upaya penyelenggaraan transportasi guna mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera, aman dan damai serta adil dan demokratis. Guna mendukung perwujudan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum transportasi difungsikan melalui penyediaan jasa transportasi guna mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat luas dengan harga terjangkau, baik di perkotaan maupun di perdesaan, mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedalaman dan terpencil, serta untuk memperlancar mobilitas orang dan distribusi barang dan jasa serta mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi nasional. Dalam rangka mendukung perwujudan Indonesia yang aman dan damai, diupayakan penyediaan aksesibilitas transportasi di wilayah konflik, wilayah perbatasan dan wilayah terisolasi untuk mendorong kelancaran mobilitas orang, distribusi barang dan jasa, serta mempercepat pengembangan wilayah dan pemerataan hubungan antar wilayah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Guna mendukung Indonesia yang adil dan demokratis, pembangunan transportasi diarahkan untuk menjembatani kesenjangan antar wilayah dan mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan. Transportasi antar wilayah akan membuka peluang kegiatan perdagangan antar wilayah dan mengurangi perbedaan harga antar wilayah, meningkatkan mobilitas tenaga kerja untuk mengurangi konsentrasi keahlian dan keterampilan

pada beberapa wilayah, sehingga mendorong terciptanya kesempatan melaksanakan pembangunan antar wilayah. Pemerataan pelayanan transportasi secara adil dan demokratis terkait dengan peluang yang sama bagi setiap orang untuk berperanserta dalam penyelenggaraan transportasi. Dengan memperhatikan arah penyelenggaraan transportasi seperti tersebut di atas, sasaran pembangunan Kementerian Perhubungan pada kurun waktu 2010-2014 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya pemulihan fungsi sarana dan prasarana perhubungan agar mampu memberi dukungan maksimal bagi kegiatan pemulihan ekonomi nasional;
2. Terwujudnya kelanjutan reformasi dan restrukturisasi (kelembagaan, sumber daya manusia dan peraturan perundang-undangan (*regulatory reform*)) dibidang perhubungan dalam rangka memberikan peluang yang sama secara adil dan demokratis kepada masyarakat untuk berperanserta dalam penyelenggaraan perhubungan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*;
3. Tersedianya aksesibilitas pelayanan jasa perhubungan di kawasan perdesaan, pedalaman, kawasan tertinggal, kawasan terpencil dan kawasan perbatasan untuk menciptakan suasana aman dan damai;
4. Tersedianya tambahan kapasitas pelayanan jasa perhubungan yang berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

b. PRIORITAS

Pembangunan perhubungan tahun 2010-2014, dititikberatkan kepada pemeliharaan, rehabilitasi dan peningkatan pembangunan angkutan jalan, angkutan perkotaan, angkutan kereta api, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, dan angkutan udara dengan prioritas sebagai berikut:

1. Terselenggaranya dukungan sektor transportasi untuk kelancaran distribusi bahan pokok kebutuhan masyarakat dan komoditas strategis lainnya dalam upaya mendorong pemulihan perekonomian nasional dari dampak resesi global;

2. Terwujudnya keselamatan transportasi sebagai implementasi dari program *Roadmap to Zero Accident*;
3. Mendukung program pengentasan kemiskinan melalui upaya penyediaan aksesibilitas dan kegiatan keperintisan baik transportasi darat, perkeretaapian, laut dan udara;
4. Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi terutama untuk kegiatan yang tidak dapat diselesaikan dalam 1 (satu) tahun anggaran: pengurangan *backlog* sarana dan prasarana perkeretaapian dan penambahan kapasitas terkait dengan peningkatan permintaan jasa transportasi;
5. Penyediaan dana pendamping pinjaman dan hibah luar negeri sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam mengupayakan pinjaman secara bilateral;
6. Pembangunan di daerah pasca bencana dalam rangka normalisasi dan pemulihan fungsi infrastruktur transportasi;
7. Pembangunan kawasan perbatasan/pulau-pulau terluar dalam rangka mempertahankan kedaulatan NKRI;
8. Terselenggaranya dukungan sektor transportasi untuk kelancaran distribusi bahan pokok kebutuhan masyarakat dan komoditas strategis lainnya sehubungan dengan perubahan iklim terkait dengan isu pemanasan global (*global warming*).

c. STRATEGI

Di dalam mewujudkan visi dan menjalankan misi, serta mencapai tujuan dan sasaran Kementerian Perhubungan seperti tersebut di atas, ditempuh melalui 2 (dua) strategi pokok pembangunan perhubungan, yaitu:

1. STRATEGI PEMULIHAN DAN PENATAAN PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

Strategi ini diarahkan untuk melakukan pemulihan dan penataan penyelenggaraan perhubungan kembali ke posisi normal setelah terjadi krisis ekonomi yang berkepanjangan, dan dilanjutkan dengan penataan Sistem Transportasi Nasional sejalan dengan perubahan

lingkungan strategis baik pada skala lokal, regional maupun global. Pemulihan dan penataan penyelenggaraan perhubungan dilakukan melalui kegiatan rehabilitasi sarana dan prasarana perhubungan dibarengi dengan pelaksanaan reformasi dan restrukturisasi kelembagaan dan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan (*regulatory reform*), peningkatan profesionalisme Sumber Daya Manusia Perhubungan, dengan pemihakan kepada peran serta swasta dalam pengoperasian dan pembangunan infrastruktur perhubungan, serta mereposisi peran pemerintah dari operator dan pemilik (*owner*) menjadi regulator dan fasilitator.

2. STRATEGI PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN

Strategi Pembangunan Perhubungan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan dalam kerangka penyediaan aksesibilitas jasa perhubungan kepada masyarakat baik di seluruh pelosok tanah air maupun di manca negara. Pembangunan perhubungan dilaksanakan dengan berpedoman kepada 7 (tujuh) pilar sebagai berikut:

- a) Pembangunan perhubungan dilakukan berdasarkan penerapan prinsip ekonomi dalam rangka memaksimalkan manfaat dan meminimumkan biaya dengan penggunaan asumsi yang rasional dan variabel-variabel ekonomi yang signifikan, sehingga dapat menghasilkan pengembalian biaya (*cost recovery*), baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang;
- b) Pembangunan perhubungan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek politik, sosial dan budaya masyarakat, sehingga hasil pembangunan perhubungan memiliki dayaguna yang tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat;
- c) Pembangunan perhubungan difokuskan kepada segmen-segmen tertentu dalam rangka menunjang kegiatan sektor-sektor lain yang memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberdayakan daerah;

- d) Pembangunan perhubungan dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek keselamatan, keadilan, kepastian hukum dan kelestarian lingkungan dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan (*sustainable development*);
- e) Pembangunan perhubungan dilakukan dengan orientasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui mekanisme pasar dan campur tangan pemerintah dalam rangka meminimalisasi kegagalan pasar (*market failure*);
- f) Pembangunan perhubungan dilakukan sesuai dengan arah pengembangan sosial dan ekonomi yang diadopsi dalam perencanaan makro nasional, perencanaan sektoral, perencanaan daerah dan penganggaran secara realistis dan rasional;
- g) Pembangunan perhubungan dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat (sektor swasta) untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan dan melakukan pengawasan baik pada skala kecil, menengah, maupun skala besar.

KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan Umum Kementerian Perhubungan dalam pembangunan dan penyelenggaraan transportasi meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam penyelenggaraan transportasi, pelaksanaan fungsi penunjang (*servicing function*) dilakukan pada daerah yang telah berkembang dan maju. Kebijakan pelayanan pada daerah yang telah berkembang atau maju antara lain memberikan peluang bagi keterlibatan swasta untuk melaksanakan pelayanan dengan prinsip *least cost economy* terutama pada segmen usaha yang mampu mencapai *cost recovery*, sedangkan untuk segmen usaha yang tidak mampu mencapai *cost recovery*, pembangunan fasilitas pelayanan dilakukan oleh pemerintah. Untuk daerah terisolasi, terpencil, terbelakang dan kawasan perbatasan, pemerintah memberikan pelayanan transportasi melalui pelaksanaan fungsi pendorong (*promoting function*).

2. Pembangunan perhubungan mendukung kebijakan otonomi daerah melalui penyediaan jasa perhubungan yang memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan daerah. Disamping itu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada daerah untuk melakukan perencanaan, pembangunan dan pengoperasian fasilitas perhubungan sesuai dengan kewenangannya.
3. Pembangunan perhubungan mendukung kelancaran mobilitas, distribusi dan pembangunan terutama pada sektor-sektor berbasis sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sektor-sektor strategis lainnya, yang pada akhirnya turut menciptakan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan yang berkesinambungan.
4. Kebijakan pembangunan perhubungan berkelanjutan dilakukan dengan pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan, hemat energi serta meningkatkan kinerja keselamatan dan pelayanan, sehingga pelayanan sektor perhubungan dapat dilakukan secara efisien.
5. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dilakukan dengan melibatkan partisipasi swasta dan melakukan restrukturisasi pada bidang usaha sesuai dengan tuntutan pasar domestik dan pasar global serta sesuai dengan semangat perdagangan bebas. Untuk itu diperlukan reposisi kelembagaan dan revisi peraturan perundang-undangan serta peningkatan kualitas SDM.
6. Kebijakan pembangunan perhubungan berkelanjutan dilakukan dengan pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan, hemat energi serta meningkatkan kinerja keselamatan dan pelayanan, sehingga pelayanan sektor perhubungan dapat dilakukan secara efisien.
7. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dilakukan dengan melibatkan partisipasi swasta dan melakukan restrukturisasi pada bidang usaha sesuai dengan tuntutan pasar domestik dan pasar global serta sesuai dengan semangat perdagangan bebas. Untuk itu diperlukan reposisi kelembagaan dan revisi peraturan perundang-undangan serta peningkatan kualitas SDM.
8. Prinsip dasar kebijakan penetapan tarif jasa perhubungan terdiri dari 3 (tiga) aspek pertimbangan, yaitu:

a. Sisi Operator selaku Penyedia Jasa:

Pertimbangan finansial dengan pendekatan kepada faktor kelangsungan usaha dengan memperhitungkan biaya dari setiap jenis jasa perhubungan (*cost of service*) dan nilai jasa yang diproduksi dan penggunaan teknologi (*value of service*).

b. Sisi Masyarakat selaku Pengguna Jasa:

Pertimbangan sosial ekonomi dengan pendekatan kepada daya beli masyarakat dengan memperhitungkan kemampuan membayar (*ability to pay*) dan kemauan membayar (*willingness to pay*).

c. Sisi Pemerintah selaku Regulator:

Pertimbangan kebijakan nasional dengan lebih menekankan kepada stabilitas nasional, namun tetap dengan memperhitungkan tercapainya keadaan "*optimum allocation resources*" dengan memperhatikan kriteria efisiensi dan kriteria pemerataan dalam pembangunan serta menjaga tingkat pelayanan (*level of service*) dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan jasa perhubungan.

PRIORITAS PEMBANGUNAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2014

Sasaran pembangunan Kementerian Perhubungan diarahkan kepada upaya penyelenggaraan transportasi guna mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera, aman dan damai serta adil dan demokratis. Guna mendukung perwujudan kesejahteraan masyarakat, pelayanan transportasi difungsikan melalui penyediaan jasa transportasi guna mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat luas dengan harga terjangkau, baik di perkotaan maupun di pedesaan, mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedalaman dan terpencil, serta untuk memperlancar mobilitas orang, distribusi barang dan jasa serta mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi nasional. Dalam rangka mendukung perwujudan Indonesia yang aman dan damai, diupayakan penyediaan aksesibilitas transportasi di wilayah konflik, wilayah perbatasan dan wilayah terisolasi untuk mendorong kelancaran mobilitas orang, distribusi barang dan jasa, serta mempercepat pengembangan wilayah dan mempererat hubungan antar wilayah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Guna mendukung Indonesia yang adil dan demokratis, pembangunan transportasi pada tahun 2014 diarahkan untuk menjembatani kesenjangan antar wilayah dan mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan. Transportasi antar wilayah akan membuka peluang kegiatan perdagangan antar wilayah dan mengurangi perbedaan harga antar wilayah, meningkatkan mobilitas tenaga kerja untuk mengurangi konsentrasi keahlian dan keterampilan pada beberapa wilayah, sehingga mendorong terciptanya kesempatan melaksanakan pembangunan antar wilayah. Pemerataan pelayanan transportasi secara adil dan demokratis terkait dengan peluang yang sama bagi setiap orang untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan transportasi. Dengan memperhatikan arah penyelenggaraan transportasi seperti tersebut di atas, sasaran pembangunan Kementerian Perhubungan pada tahun 2014 adalah mewujudkan sasaran yang telah diformulasikan dalam rencana strategis Kementerian Perhubungan 2010-2014 sebagai berikut:

1. Terwujudnya pemulihan fungsi sarana dan prasarana perhubungan agar mampu memberi dukungan maksimal bagi kegiatan pemulihan ekonomi nasional;
2. Terwujudnya keberlanjutan reformasi dan restrukturisasi (kelembagaan, sumber daya manusia dan peraturan perundang-undangan/ *regulatory reform*) dibidang perhubungan dalam rangka memberikan peluang yang sama secara adil dan demokratis kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan perhubungan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*;
3. Tersedianya aksesibilitas pelayanan jasa perhubungan di kawasan perdesaan, pedalaman, kawasan tertinggal, kawasan terpencil dan kawasan perbatasan untuk menciptakan suasana aman dan damai;
4. Tersedianya tambahan kapasitas pelayanan jasa perhubungan yang berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan sasaran pembangunan Kementerian Perhubungan tahun 2014, skenario pagu anggaran setiap program pembangunan Kementerian Perhubungan tahun 2014 disusun berdasarkan 8 (delapan) prioritas sebagai berikut :

1. Terselenggaranya dukungan sektor transportasi untuk kelancaran distribusi bahan pokok kebutuhan masyarakat dan komoditas strategis lainnya dalam upaya mendorong pemulihan perekonomian nasional dari dampak resesi global;
2. Terwujudnya keselamatan transportasi sebagai implementasi dari program *Roadmap to Zero Accident*;
3. Mendukung program pengentasan kemiskinan melalui upaya penyediaan aksesibilitas dan kegiatan keperintisan baik transportasi darat, perkeretaapian, laut dan udara;
4. Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi terutama untuk kegiatan yang tidak dapat diselesaikan dalam 1 (satu) tahun anggaran : pengurangan *backlog* sarana dan prasarana perkeretaapian dan penambahan kapasitas terkait dengan peningkatan permintaan jasa transportasi;
5. Penyediaan dana pendamping pinjaman dan hibah luar negeri sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam mengupayakan pinjaman secara bilateral;
6. Pembangunan di daerah pasca bencana dalam rangka normalisasi dan pemulihan fungsi infrastruktur transportasi;
7. Pembangunan kawasan perbatasan/pulau-pulau terluar dalam rangka mempertahankan kedaulatan NKRI;
8. Terselenggaranya dukungan sektor transportasi untuk kelancaran distribusi bahan pokok kebutuhan masyarakat dan komoditas strategis lainnya sehubungan dengan perubahan iklim terkait dengan isu pemanasan global (*global warming*).

Arah Kebijakan Pembangunan

Arah kebijakan pembangunan sektor transportasi tahun 2014 adalah meningkatkan kinerja keselamatan dan pelayanan, sehingga pelayanan jasa transportasi dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Upaya tersebut antara lain meliputi :

1. Meningkatkan keselamatan operasional baik sarana maupun prasarana transportasi;
2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi baik dikawasan perkotaan maupun daerah perbatasan, terisolir dan belum berkembang;
3. Penyediaan pelayanan jasa transportasi yang berkualitas;
4. Melanjutkan reformasi peraturan perundangan agar dapat mendorong keikutsertaan investasi swasta dan memperjelas hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terkait;
5. Melakukan restrukturisasi kelembagaan terhadap penyelenggara transportasi baik ditingkat pusat maupun daerah;
6. Melakukan optimalisasi penggunaan dana pemerintah baik untuk operasional, pemeliharaan, rehabilitasi maupun investasi melalui penyusunan prioritas program yang diwujudkan dalam suatu kegiatan.

Arah kebijakan masing-masing sub sektor adalah sebagai berikut:

a. Transportasi Darat

Arah kebijakan transportasi darat meliputi: (1) Peningkatan kondisi pelayanan angkutan umum jalan raya; (2) Meningkatkan pelayanan angkutan sungai, danau dan penyeberangan sebagai pendukung moda transportasi lainnya; (3) Melanjutkan kewajiban pemerintah memberikan pelayanan angkutan perintis untuk wilayah terpencil; (4) Melanjutkan kegiatan operasional unit pelaksana teknis dan tugas serta fungsi pemerintah lainnya; (5) Meningkatkan keselamatan transportasi darat secara komprehensif dan terpadu; (6) Pengembangan transportasi darat berkelanjutan; (7) Pemaduan pengembangan kawasan dengan sistem transportasi kota.

b. Transportasi Kereta Api

Arah kebijakan pembangunan transportasi perkeretaapian tahun 2014 meliputi: (1) Penyiapan dan penguatan regulasi berupa penyelesaian peraturan perundangan serta penyusunan peraturan/pedoman pendukung lainnya termasuk regulasi dalam mendukung penyelenggaraan perkeretaapian multioperator; (2) Melanjutkan reformasi dan restrukturisasi kelembagaan termasuk untuk mewujudkan eksistensi Pemerintah sebagai

regulator penyelenggaraan perkeretaapian; (3) Meningkatkan kapasitas lintas dan kualitas pelayanan serta reaktivasi koridor-koridor yang sudah tidak dioperasikan; (4) Meningkatkan keselamatan angkutan melalui pemulihan kondisi pelayanan prasarana dan sarana angkutan perkeretaapian serta pengujian dan sertifikasi kelaikan prasarana dan sarana perkeretaapian; (5) Melaksanakan audit kinerja prasarana dan sarana serta SDM operator perkeretaapian; (6) Meningkatkan peran angkutan perkeretaapian melalui perwujudan keterpaduan antar moda dan pengembangan KA perkotaan; (7) Meningkatkan peran serta pemerintah daerah dan swasta di bidang perkeretaapian; (8) Meningkatkan SDM perkeretaapian dan pengembangan teknologi perkeretaapian nasional.

c. Transportasi Laut

Arah kebijakan pembangunan transportasi laut tahun 2014 difokuskan pada pembangunan sarana dan prasarana yang langsung memberikan manfaat kepada masyarakat, pembangunan sistem yang memperlancar dan mempermudah pelayanan serta peningkatan SDM dan pengembangan institusi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Untuk menerapkan kebijakan-kebijakan tersebut, dilakukan upaya-upaya sebagai berikut: (1) Membangun dan mengembangkan pelabuhan-pelabuhan yang memiliki *waiting time* tinggi; (2) Membangun kapal-kapal perintis bagi daerah yang membutuhkan; (3) Membangun pelabuhan-pelabuhan kecil yang disinggahi kapal perintis; (4) Membangun dan meningkatkan kualitas terminal penumpang, terutama pada daerah tujuan wisata; (5) Membangun kapal patroli dan SBNP serta peralatan keselamatan lainnya; (6) Membangun sistem pelayanan perizinan yang memperlancar, mempermudah dan memberi kepastian waktu; (7) Membangun sistem pelayanan dan pendidikan terpadu bagi pelaut, bekerja sama dengan Badan Diklat Perhubungan; (8) Membangun sistem pengadaan barang/jasa yang transparan dan bersih; (9) Meningkatkan kompetensi, profesionalisme dan integritas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan; (10) Membentuk organisasi baru sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008: Otoritas Paelabuhan, Syahbandar, Unit Penyelenggara Pelabuhan dan *Sea and Coast Guard*;

(11) Menerapkan sistem remunerasi baru; (12) Melimpahkan pengelolaan pelabuhan-pelabuhan *feeder* kepada pemerintah daerah.

d. Transportasi Udara

Arah kebijakan pembangunan transportasi udara adalah: (1) Memenuhi standar keamanan dan keselamatan penerbangan yang dikeluarkan oleh ICAO guna meningkatkan keselamatan penerbangan, baik selama penerbangan maupun di bandara wilayah Indonesia; (2) Mengembangkan dan meningkatkan prasarana transportasi udara di daerah rawan bencana alam dan daerah perbatasan serta daerah potensi ekonomi; (3) Peningkatan dan pemulihan kembali fungsi sarana dan prasarana transportasi udara sesuai standar internasional yang ditetapkan oleh ICAO; (4) Pengembangan sistem, regulasi dan kelembagaan yang efektif dan efisien di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; (5) Menciptakan perusahaan penerbangan nasional yang efisien, efektif, dan kompetitif dalam pasar internasional; (6) Menciptakan iklim usaha jasa angkutan udara dalam persaingan sehat dan kondusif sehingga mempunyai kelangsungan hidup jangka panjang.

e. Penunjang Transportasi

Pada tahun 2014 arah kebijakan penunjang transportasi di lingkungan Sekretariat Jenderal meliputi: (1) Peningkatan koordinasi dengan unit kerja terkait dengan penyiapan tugas pokok dan fungsi; (2) Memberikan kesempatan yang luas kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan kompetensinya dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan di sektor transportasi; (3) Pengembangan rencana kebutuhan pendidikan dan latihan berbasis kompetensi di lingkungan Kementerian Perhubungan; (4) Reformasi dan restrukturisasi organisasi yang mampu mengantisipasi perkembangan sektor transportasi guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi; (5) Perencanaan dan penelaahan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi; (6) Koordinasi penyusunan rancangan peraturan pelaksanaan perundang-undangan di bidang transportasi; (7) Penyusunan peraturan pelaksanaan perundang-undangan di bidang

transportasi; (8) Pemberian pertimbangan dalam penerapan peraturan perundang-undangan dan perumusan perjanjian; (9) Pemberian bantuan hukum; (10) Penyiapan ratifikasi konvensi dan perjanjian internasional di bidang transportasi; (11) Pengelolaan jaringan dokumentasi peraturan perundang-undangan di bidang transportasi; (12) Penyiapan koordinasi, pemantauan dan evaluasi serta konsultasi dengan instansi terkait mengenai pelaksanaan kerjasama luar negeri; (13) Mewujudkan Pelayanan Umum yang Optimal yang antara lain meliputi : Terwujudnya pelayanan kepemimpinan dan keprotokolan yang handal dan dinamis; Terwujudnya pelayanan dan tertib administrasi yang sesuai dengan sistem dan prosedur; Terselenggaranya pelayanan Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan (K3), sarana dan prasarana dengan baik; Terwujudnya pelayanan administrasi pembiayaan dan perjalanan dinas yang efektif dan efisien; Terselenggaranya peningkatan kesehatan pegawai yang memadai; (14) Mengembangkan kerja sama dengan instansi terkait yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran sehingga anggaran dapat terserap sesuai dengan rencana dan sesuai peraturan berlaku; (15) Mengarahkan dan mendorong agar pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terjadi KKN; (16) Melaksanakan *Action Plan* (rencana tindak) Kementerian Perhubungan untuk mencapai opini terhadap Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); (17) Memonitor dan Mengevaluasi pelaksanaan pertanggung jawaban pengelolaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan *action plan*; (18) Melakukan klarifikasi terhadap hasil inventarisasi BMN oleh Tim Keppres 17; (19) Intensifikasi dan ekstensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Kementerian Perhubungan; (20) Mendorong Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tingkat pelayanan kepada publik tinggi untuk menjadi Badan Layanan Umum (BLU); (21) Penatausahaan, pembukuan, verifikasi dan pertanggung jawaban serta laporan keuangan Kementerian Perhubungan; (22) Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi Laporan Pelaksanaan Anggaran yang tertib dan teratur termasuk evaluasi Pinjaman Hibah Luar Negeri; (23) Pengelola Anggaran yang berkualitas; (24) Terselenggaranya Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan BMN; (25) Melaksanakan kajian

kemitraan dan pelayanan jasa transportasi, dan evaluasi pengelolaan lingkungan hidup sektor transportasi; (26) Perluasan jaringan informasi yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan memperluas difusi informasi kebijakan Kementerian Perhubungan melalui media radio, televisi dan media cetak dengan memanfaatkan teknologi internet akan pengembangan komunikasi interaktif lewat internet; (27) Pengembangan dan penyebaran informasi dan komunikasi secara terpadu melalui satu pintu yang mengintegrasikan masukan-masukan dari bagian Humas di setiap Direktorat Jenderal; (28) Pengembangan / peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) secara profesional dengan melaksanakan Diklat bidang infokom yang profesional dan pemanfaatan program, diklat dalam dan luar negeri bidang informasi; (29) Peningkatan sarana dan prasarana operasional infokom, melalui pengadaan sarana dan prasarana infokom sesuai perkembangan teknologi informasi. Upaya peningkatan sarana dan prasarana tersebut dilakukan pula pengembangan sistem pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan; (30) Penyusunan standard kerja baku sebagai sarana pengendalian dan jaminan atas mutu penyelenggaraan pelayanan komunikasi dan informasi; (31) Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi publik yang dilakukan melalui peningkatan kerjasama dalam penyebaran informasi dan peningkatan sarana pelayanan informasi kepada masyarakat; (32) Peningkatan hubungan kerjasama dengan lembaga /unsur pers dan kelompok organisasi masyarakat. Upaya peningkatan ini dilakukan dengan melaksanakan jumpa pers dan liputan pers secara berkala serta peningkatan kualitas pemberitaan lewat media pers. Disamping itu juga perlu dilakukan pemanfaatan / pemberdayaan kelompok atau organisasi masyarakat dalam penyebaran informasi (kelompok informasi masyarakat, *media watch*); (33) Mengintegrasikan sistem informasi di lingkungan Kementerian Perhubungan; (34) Menstandarisasi data dan mekanisme pertukaran data di lingkungan Kementerian Perhubungan; (35) Menerapkan tata kelola administrasi pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*) di lingkungan Kementerian Perhubungan; (36) Melakukan pengembangan aplikasi dengan menyesuaikan kebutuhan pengolahan dan penyajian data dan informasi.

Pendekatan

Penyusunan Laporan

Keuangan

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahun 2014 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kementerian Perhubungan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2014 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Kementerian Perhubungan seperti Eselon I, wilayah, serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Pada Tahun Anggaran 2014, Kementerian Perhubungan (UAPA) bertugas melakukan penggabungan dan pengkoordinasian laporan keuangan dari 8 (delapan) Unit Eselon I (UAPPA-E1), yaitu:

1. Sekretariat Jenderal sebanyak 18 (delapan belas) kantor/satuan kerja;
2. Inspektorat Jenderal sebanyak 1 (satu) kantor/satuan kerja;
3. Ditjen Perhubungan Darat sebanyak 82 (delapan puluh dua) kantor/satuan kerja;
4. Ditjen Perhubungan Laut sebanyak 328 (tiga ratus dua puluh delapan) kantor/satuan kerja;
5. Ditjen Perhubungan Udara sebanyak 162 (seratus enam puluh dua) kantor/satuan kerja;
6. Ditjen Perkeretaapian sebanyak 21 (dua puluh satu) kantor/satuan kerja;
7. Badan Litbang Perhubungan sebanyak 5 (lima) kantor/satuan kerja;
8. Badan Pengembangan SDM Perhubungan sebanyak 26 (dua puluh enam) kantor/satuan kerja.

Jumlah keseluruhan satuan kerja di lingkup Kementerian Perhubungan adalah 643 (enam ratus empat puluh tiga) satker termasuk 7 (tujuh) satker BLU pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan. Dari jumlah tersebut, yang menyampaikan laporan keuangan dan dikonsolidasikan sejumlah 643 (enam ratus empat puluh tiga) satker (100%). Rincian satuan kerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.
Rekapitulasi Jumlah Satker UAKPA

No	Kode Es I	Uraian	Jumlah Jenis Kewenangan								Jumlah Satker
			KP		KD		DK		TP		
			M	TM	M	TM	M	TM	M	TM	
1	01	Setjen	18	-	-	-	-	-	-	-	18
2	02	Itjen	1	-	-	-	-	-	-	-	1
3	03	Ditjen Hubdat	82	-	-	-	-	-	-	-	82
4	04	Ditjen Hubla	6	-	322	-	-	-	-	-	328
5	05	Ditjen Hubud	10	-	152	-	-	-	-	-	162
6	08	Ditjen KA	21	-	-	-	-	-	-	-	21
7	11	Badan Litbang	5	-	-	-	-	-	-	-	5
8	12	Badan PSDM	26	-	-	-	-	-	-	-	26
Jumlah			169	-	474	-	-	-	-	-	643

Keterangan:

M : Menyampaikan

TM : Tidak Menyampaikan

SAI (Sistem Akuntansi Instansi) terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Kebijakan Akuntansi

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2014 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut:

Pendapatan

(1) Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas brutto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

Belanja

(2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Belanja disajikan pada lembar muka laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja.

Aset

(3) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian, harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, dan harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca Satker per 31 Desember 2014 berdasarkan harga perolehan.

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- (a). Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- (b). Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- (c). Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Piutang Jangka Panjang

c. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, dan Piutang Jangka Panjang Lainnya.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

TP ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.

TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

TPA dan TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya.

Aset Lainnya

d. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi *software* komputer; lisensi dan *franchise*, hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill*, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan sebagai Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi, Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

Kewajiban

(4) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (*accrued interest*) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Ekuitas Dana

(5) Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

*Penyisihan Piutang
Tak Tertagih*

(6) Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga.

Tabel 2.
Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada PUPN/DJKN	100%

*Penyusutan
Aset Tetap*

(7) Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap

- Penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2014, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Sesuai dengan PMK Nomor: 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat dan KMK Nomor 94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, kebijakan akuntansi atas aset tetap yang diperoleh sebelum tahun 2005 berubah, yang semula dilakukan penyusutan sejak tanggal perolehan menjadi dilakukan penyusutan sejak Semester II Tahun 2010 sampai dengan berakhirnya masa manfaat aset tetap dimaksud.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012. Sedangkan Untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.
Penggolongan Masa Manfaat

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1 Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan
Negara dan Hibah
Rp.2,013 Triliun

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp2.013.747.142.168,- atau mencapai 151,26 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1.331.289.046.545,-. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah Kementerian Perhubungan adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya dan Pendapatan Badan Layanan Umum.

Realisasi PNBP lebih tinggi dari Estimasinya disebabkan antara lain tingginya realisasi pendapatan dari pengelolaan BMN, realisasi pendapatan jasa, realisasi pendapatan pendidikan, realisasi pendapatan iuran dan denda, realisasi pendapatan lain-lain, realisasi pendapatan jasa layanan umum, realisasi pendapatan Hasil Kerjasama BLU, serta realisasi pendapatan BLU lainnya.

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi PNBP lainnya sampai dengan tanggal pelaporan tersaji pada Tabel 4.

Tabel 4
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2014		
	Anggaran	Realisasi (Netto)	% Real Angg.
1. Pendapatan dari Pengelolaan BMN	Rp 849.639.296	Rp 9.381.684.870	1.104,20
2. Pendapatan Jasa	Rp 961.963.058.249	Rp 1.308.907.224.947	136,07
3. Pendapatan Bunga	Rp -	Rp 136.400	0,00
4. Pendapatan Kejaksaan, Peradilan & Hasil Tindak Pidana Korupsi	Rp -	Rp 349.753	0,00
5. Pendapatan Pendidikan	Rp 38.006.626.000	Rp 88.704.217.194	233,39
6. Pendapatan Iuran dan Denda	Rp -	Rp 44.401.639.497	0,00
7. Pendapatan Lain-lain	Rp -	Rp 212.358.086.223	0,00
8. Pendapatan Jasa Layanan Umum	Rp 322.451.028.000	Rp 329.949.894.758	102,33
9. Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	Rp 6.218.695.000	Rp 11.967.701.306	192,45
10. Pendapatan BLU Lainnya	Rp 1.800.000.000	Rp 8.076.207.220	448,68
Jumlah	Rp 1.331.289.046.545	Rp 2.013.747.142.168	151,26

Berdasarkan Tabel 5, Realisasi PNBP Lainnya TA 2014 mengalami kenaikan sebesar Rp120.342.601.129,- atau 6,36 persen dibandingkan TA 2013 yang disebabkan oleh meningkatnya nilai beberapa jenis pendapatan yaitu pendapatan dari pengelolaan BMN, pendapatan jasa, pendapatan pendidikan, pendapatan kejaksaan dan peradilan dan hasil tindak pidana, pendapatan bunga, pendapatan jasa layanan umum, pendapatan Hasil Kerjasama BLU, serta pendapatan BLU lainnya.

Tabel 5
Perbandingan Realisasi PNPB TA 2014 dan 2013

URAIAN	REALISASI T.A. 2014	REALISASI T.A. 2013	NAIK (TURUN) %
1. Pendapatan dari Pengelolaan BMN	Rp 9.381.684.870	Rp 8.673.093.938	8,17
2. Pendapatan Jasa	Rp 1.308.907.224.947	Rp 1.167.449.460.953	12,12
3. Pendapatan Bunga	Rp 136.400	-	0,00
4. Pendapatan Kejaksaan, Peradilan & Hasil Tindak Pidana	Rp 349.753	-	0,00
4. Pendapatan Pendidikan	Rp 88.704.217.194	Rp 20.184.336.643	339,47
5. Pendapatan Iuran dan Denda	Rp 44.401.639.497	Rp 53.335.792.477	(16,75)
6. Pendapatan Lain-Lain	Rp 212.358.086.223	Rp 375.265.115.600	(43,41)
7. Pendapatan Jasa Layanan Umum	Rp 329.949.894.758	Rp 252.458.240.774	30,69
8. Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	Rp 11.967.701.306	Rp 10.935.322.119	9,44
9. Pendapatan BLU Lainnya	Rp 8.076.207.220	Rp 5.103.178.535	58,26
Jumlah Pendapatan	Rp 2.013.747.142.188	Rp 1.893.404.541.039	6,36

Rincian realisasi PNPB per Eselon I Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut :

Tabel 6
Perbandingan Realisasi PNPB PER Eselon I TA 2014

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS PENDAPATAN	SETJEN	ITJEN	DITJEN HUBDAT	DITJEN HUBLA	DITJEN HUBUD	DITJEN KA	BPSDM	BALITBANG	JUMLAH
1. Pendapatan dari Pengelolaan BMN	538.118.028	138.450.000	20.200.014	1.350.784.831	2.552.543.183	0	4.752.146.994	28.441.820	9.381.684.870
2. Pendapatan Jasa	1.392.719.500	0	5.520.058.770	705.309.603.403	595.136.570.379	0	1.548.272.895	0	1.308.907.224.947
3. Pendapatan Bunga	0	0	0	136.400	0	0	0	0	136.400
4. Pendapatann Kejaksaan, Peradilan & Hasil Tindak Pidana	0	0	0	0	349.753	0	0	0	349.753
5. Pendapatann Pendidikan	0	0	0	0	0	0	88.704.217.194	0	88.704.217.194
6. Pendapatan Iuran dan Denda	1.276.506	0	6.784.232.557	6.092.207.296	2.900.277.318	25.905.137.318	2.718.508.502	0	44.401.639.497
7. Pendapatan Lain-Lain	44.924.775.970	397	17.127.472.758	101.495.156.800	24.264.625.066	5.571.197.200	17.983.427.968	991.430.063	212.358.086.223
8. Pendapatan Jasa Layanan Umum	0	0	0	0	0	0	329.949.894.758	0	329.949.894.758
9. Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	0	0	0	0	0	0	11.967.701.306	0	11.967.701.306
10. Pendapatan BLU Lainnya	0	0	0	0	0	0	8.076.207.220	0	8.076.207.220
JUMLAH	46.857.890.004	138.450.397	29.451.964.099	814.247.888.730	624.854.365.689	31.476.334.518	465.700.376.838	1.019.871.883	2.013.747.142.188

Realisasi Belanja
Rp28,722 Triliun

B.2. Belanja Negara

Realisasi belanja Kementerian Perhubungan pada TA 2014 adalah sebesar Rp28.722.769.749.220,- atau sebesar 77,10 persen dari anggarannya setelah dikurangi pengembalian belanja. Anggaran Kementerian Perhubungan pada TA 2014 sebesar Rp37.256.074.433.300,- Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2014 menurut program tersaji pada Tabel 7.

Tabel 7
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja menurut Program TA 2014

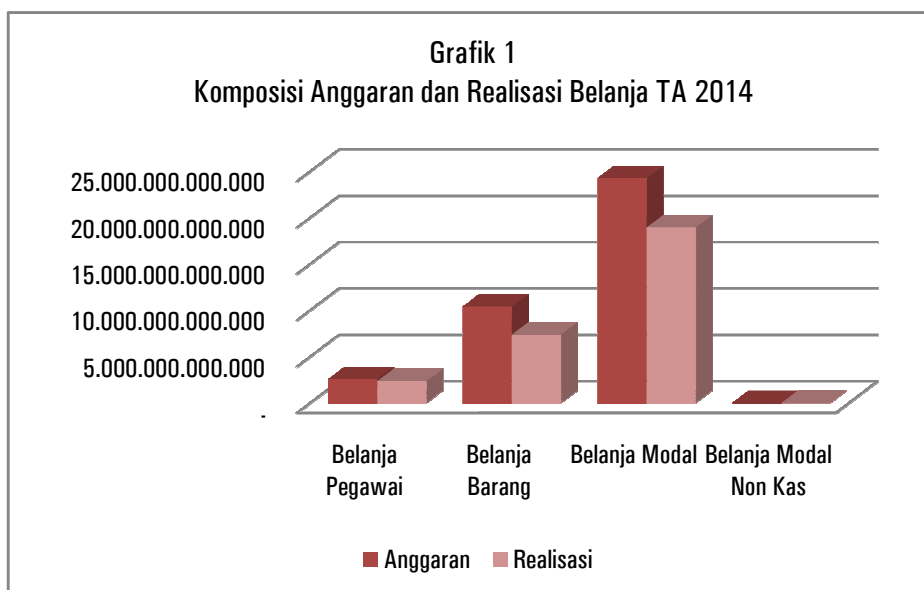
Kode	Uraian Program	Anggaran	Realisasi T.A. 2014 (Netto)	% Realisasi
01.01.101	Prog Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenhub	Rp 1.450.724.713.000	Rp 1.304.788.013.172	89,94
01.01.103	Prog Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemenhub	Rp 44.593.296.000	Rp 38.098.063.213	85,43
01.01.106	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transp. Darat	Rp 188.733.566.000	Rp 136.056.911.125	72,09
01.01.107	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transp. Perkeretaapian	Rp 147.184.592.000	Rp 97.677.536.609	66,36
01.01.108	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transp. Laut	Rp 2.546.299.451.784	Rp 2.230.231.491.326	87,59
01.03.305	Prog. Pengembangan SDM Perhubungan	Rp 275.654.330.000	Rp 239.941.256.815	87,04
04.08.803	Prog Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemenhub	Rp 35.025.519.000	Rp 27.407.722.502	78,25
04.08.805	Prog. Pengembangan SDM Perhubungan	Rp 679.782.427.000	Rp 586.709.494.918	86,31
04.08.806	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transp. Darat	Rp 3.430.686.402.000	Rp 3.092.214.174.999	90,13
04.08.807	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transp. Perkeretaapian	Rp 11.760.352.906.000	Rp 6.719.181.497.477	57,13
04.08.808	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transp. Laut	Rp 7.073.623.339.516	Rp 5.620.285.315.400	79,45
04.08.809	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transp. Udara	Rp 7.505.786.101.000	Rp 6.847.838.653.597	91,23
04.10.004	Prog Penelitian dan Pengembangan Kemenhub	Rp 205.717.711.000	Rp 162.673.554.235	79,08
10.06.605	Prog. Pengembangan SDM Perhubungan	Rp 1.911.910.079.000	Rp 1.603.320.839.832	83,86
04.08.805	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (Non Kas)	Rp -	Rp 16.345.224.000	0,00
Jumlah		Rp 37.256.074.433.300	Rp 28.722.769.749.220	77,10

Tabel 8
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2014

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Pegawai	Rp 2.569.680.819.246	Rp 2.361.186.684.769	91,89
Belanja Barang	Rp 10.415.617.150.538	Rp 7.391.881.487.457	70,97
Belanja Modal	Rp 24.270.776.463.516	Rp 19.019.302.613.898	78,36
Belanja Modal Non Kas	Rp -	Rp 16.345.224.000	0
Total Belanja Kotor	Rp 37.256.074.433.300	Rp 28.788.716.010.124	77,27
Pengembalian Belanja	Rp -	Rp (65.946.260.904)	0
Belanja Netto	Rp 37.256.074.433.300	Rp 28.722.769.749.220	77,10

Berdasarkan Tabel 8, Realisasi Belanja lebih rendah dari anggarannya yang disebabkan antara lain tingginya dana bertanda bintang, pelaksanaan pengadaan barang/jasa terlambat, adanya permasalahan lahan, dan adanya kebijakan pemotongan anggaran serta proses revisi anggaran.

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam Grafik 1.



Dibandingkan dengan TA 2013, realisasi belanja TA 2014 mengalami penurunan sebesar Rp2.995.490.179.908,- atau 9,44 persen dikarenakan adanya penurunan realisasi belanja modal. Perbandingan Realisasi Belanja TA 2014 dan 2013 tersaji pada Tabel 9.

Tabel 9
Perbandingan Realisasi Belanja TA 2014 dan 2013

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2014	REALISASI T.A. 2013	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	Rp 2.360.706.602.572	Rp 1.950.792.958.299	21,01
Belanja Barang	Rp 7.387.401.880.927	Rp 6.183.732.107.026	19,47
Belanja Modal	Rp 18.958.316.041.721	Rp 23.572.271.260.744	(19,57)
Belanja Modal Non Kas	Rp 16.345.224.000	Rp 11.463.603.059	42,58
Jumlah Belanja	Rp 28.722.769.749.220	Rp 31.718.259.929.128	(9,44)

Belanja Pegawai
Rp2,360 Triliun

B.2.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Contoh Belanja Pegawai adalah gaji dan tunjangan, honorarium, lembur kontribusi sosial dan lain-lain yang berhubungan dengan pegawai.

Realisasi belanja pegawai Kementerian Perhubungan TA 2014 dan TA 2013 adalah masing-masing sebesar Rp2.360.706.602.572,- dan Rp1.950.792.958.299,-. Terjadi kenaikan sebesar 21,01 persen. Kenaikan realisasi belanja pegawai antara lain disebabkan meningkatnya belanja gaji dan tunjangan PNS, serta belanja tunjangan khusus dan belanja transito. Rincian belanja pegawai disajikan dalam Tabel 10.

Tabel 10
Perbandingan Belanja Pegawai TA 2014 dan TA 2013

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2014	REALISASI T.A. 2013	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	Rp 1.494.965.696.385	Rp 1.478.517.830.155	1,11
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	Rp 1.248.545	Rp 364.992.590	(99,66)
Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	Rp -	Rp -	-
Belanja Honorarium	Rp -	Rp 2.719.805.000	(100,00)
Belanja Lembur	Rp 35.725.043.000	Rp 36.510.369.500	(2,15)
Belanja Vakasi	Rp -	Rp 10.600.300.500	(100,00)
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Transito	Rp 830.494.696.839	Rp 422.466.045.640	96,58
Jumlah Belanja Kotor	Rp 2.361.186.684.769	Rp 1.951.179.343.385	21,01
Pengembalian Belanja Pegawai	Rp (480.082.197)	Rp (386.385.086)	24,25
Jumlah Belanja Bersih	Rp 2.360.706.602.572	Rp 1.950.792.958.299	21,01

Tabel 11
Perbandingan Belanja Pegawai TA 2014 per Unit Eselon I

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BELANJA	SETJEN	ITJEN	DITJEN HUBDAT	DITJEN HUBLA	DITJEN HUBUD	DITJEN KA	BPSDM	BALITBANG	JUMLAH
B. Gaji dan Tunjangan PNS	62.109.588.127	14.811.852.182	36.742.418.688	814.720.407.253	353.284.131.779	28.886.692.198	167.840.958.284	16.569.647.874	1.494.965.696.385
B. Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	1.248.545	0	0	0	0	0	0	0	1.248.545
B. Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Honorarium	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Lembur	280.840.000	0	530.271.000	32.082.297.650	0	6.026.000	2.721.667.350	103.941.000	35.725.043.000
B. Vakasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Tunj. Khusus & B. Transito	830.482.494.839	0	0	0	0	0	12.202.000	0	830.494.696.839
Jumlah Belanja Kotor	892.874.171.511	14.811.852.182	37.272.689.688	846.802.704.903	353.284.131.779	28.892.718.198	170.574.827.634	16.673.588.874	2.361.186.684.769
Pengembalian Belanja Pegawai	(19.505.322)	(27.881)	(9.160)	(199.386.966)	(147.577.823)	(1.183.332)	(77.628.167)	(34.763.546)	(480.082.197)
Jumlah Belanja Bersih	892.854.666.189	14.811.824.301	37.272.680.528	846.603.317.937	353.136.553.956	28.891.534.866	170.497.199.467	16.638.825.328	2.360.706.602.572

Terdapat belanja gaji dan tunjangan PNS senilai Rp1.494.965.696.385,- dengan rincian tabel sebagai berikut :

Tabel 12
Uraian Jenis Belanja Gaji dan Tunjangan PNS
(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BELANJA		REALISASI TA. 2014
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS		
a.	Belanja Gaji Pokok PNS	998.527.128.691
b.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	21.031.394
c.	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	76.405.047.378
d.	Belanja Tunj. Anak PNS	22.417.875.009
e.	Belanja Tunj. Struktural PNS	19.866.092.163
f.	Belanja Tunj. Fungsional PNS	19.333.990.000
g.	Belanja Tunj. PPh PNS	33.362.416.612
h.	Belanja Tunj. Beras PNS	67.750.322.890
i.	Belanja Uang Makan PNS	160.540.433.990
j.	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS	16.362.925.110
k.	Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	1.774.625.000
l.	Belanja Tunj. Khusus Papua PNS	11.585.390.000
m.	Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka PNS dalam & luar negeri	934.525.714
n.	Belanja Tunj. Umum PNS	56.590.715.234
o.	Belanja Tunjangan Profesi Dosen	9.473.320.200
p.	Belanja Lain-lain termasuk uang duka PNS TNI/POLRI	19.857.000
Jumlah Belanja Kotor		1.494.965.696.385
Pengembalian Belanja		(414.974.848)
Jumlah Belanja Bersih		1.494.550.721.537

Belanja Barang
Rp7,387Triliun

B.2.2 Belanja Barang

Belanja barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan. Belanja Barang dapat dibedakan menjadi Belanja Barang dan Jasa, Belanja Pemeliharaan dan Belanja Perjalanan Dinas.

Realisasi Belanja Barang Kementerian Perhubungan TA 2014 dan TA 2013 adalah masing-masing sebesar Rp7.387.401.880.927,- dan Rp6.183.732.107.026,-. Terjadi kenaikan realisasi Belanja Barang dibandingkan tahun anggaran yang lalu sebesar 19,47 persen. Kenaikan tersebut antara lain disebabkan adanya kenaikan belanja barang

operasional, non operasional, belanja jasa, belanja pemeliharaan, biaya perjalanan dinas dalam negeri, belanja barang BLU, belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda serta belanja barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda sebagaimana disajikan dalam Tabel 13.

Tabel 13.

Perbandingan Belanja Barang TA 2014 dan TA 2013

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A 2014	REALISASI T.A. 2013	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	Rp 1.043.867.907.093	Rp 902.724.347.874	15,64
Belanja Barang Non Operasional	Rp 1.846.349.498.966	Rp 1.552.520.545.158	18,93
Belanja Jasa	Rp 441.646.803.450	Rp 344.055.365.854	28,37
Belanja Pemeliharaan	Rp 1.657.395.071.171	Rp 1.404.307.483.436	18,02
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	Rp 746.337.784.707	Rp 598.424.876.537	24,72
Belanja Perjalanan Luar Negeri	Rp 44.394.047.921	Rp 50.548.780.374	(12,18)
Belanja Barang BLU	Rp 241.230.080.403	Rp 193.767.875.394	24,49
Belanja Barang utk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	Rp 1.351.897.318.746	Rp 1.137.253.469.173	18,87
Belanja Barang Lainnya utk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	Rp 18.762.975.000	Rp 9.724.543.000	92,94
Jumlah Belanja Kotor	Rp 7.391.881.487.457	Rp 6.193.327.286.800	19,35
Pengembalian Belanja	Rp (4.479.606.530)	Rp (9.595.179.774)	(53,31)
Jumlah Belanja Bersih	Rp 7.387.401.880.927	Rp 6.183.732.107.026	19,47

Belanja Barang Operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat internal. Jenis pengeluaran terdiri dari antara lain: belanja keperluan perkantoran, belanja pengadaan bahan makanan, belanja bahan, honor yang terkait dengan operasional satker serta belanja langganan daya dan jasa, dan lain sebagainya. Sedangkan Belanja Barang Non Operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat eksternal.

Tabel 14
Perbandingan Belanja Barang TA 2014 Per Unit Eselon I
 (dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BELANJA BARANG	SETJEN	ITJEN	DITJEN HUBDAT	DITJEN HUBLA	DITJEN HUBUD	DITJEN KA	BPSDM	BALITBANG	JUMLAH
B. Barang Operasional	37.427.102.923	4.132.156.301	345.757.452.819	201.978.438.288	273.047.715.807	12.808.041.957	164.050.966.301	4.666.032.697	1.043.867.907.093
B. Barang Non Operasional	85.491.444.691	1.237.891.399	144.589.502.433	469.277.123.156	551.974.077.593	31.239.542.430	472.305.673.078	90.234.244.186	1.846.349.498.966
B. Jasa	24.211.703.833	631.593.428	15.581.505.346	145.313.795.271	125.135.241.167	18.337.230.312	107.387.386.509	5.048.347.584	441.646.803.450
B. Pemeliharaan	21.808.775.665	948.895.746	17.683.717.727	1.334.837.744.424	186.285.902.063	3.678.672.872	89.968.252.913	2.183.109.761	1.657.395.071.171
B. Perjalanan Dalam Negeri	100.780.704.980	37.708.914.399	75.905.281.200	169.781.270.222	143.690.372.984	41.099.713.621	152.214.032.434	25.157.494.867	746.337.784.707
B. Perjalanan Luar Negeri	11.849.520.345	731.283.093	1.171.523.155	5.857.198.000	15.070.018.023	812.206.234	6.215.684.187	2.686.614.884	44.394.047.921
B. Barang BLU	0	0	0	0	0	0	241.230.080.403	0	241.230.080.403
B. Barang utk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	1.347.963.260.746	0	0	0	3.934.058.000	0	1.351.897.318.746
B. Barang Lainnya utk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	18.762.975.000	0	0	0	0	0	18.762.975.000
Jumlah Belanja Kotor	281.569.252.437	45.390.734.366	1.967.415.218.426	2.327.045.569.361	1.295.203.327.637	107.975.407.426	1.237.306.133.825	129.975.843.979	7.391.881.487.457
Pengembalian Belanja	(129.120.950)	(50.395.952)	(2.170.864.901)	(1.123.317.748)	(313.473.825)	(212.640.766)	(362.517.990)	(117.274.398)	(4.479.606.530)
Jumlah Belanja Bersih	281.440.131.487	45.340.338.414	1.965.244.353.525	2.325.922.251.613	1.294.889.853.812	107.762.766.660	1.236.943.615.835	129.858.569.581	7.387.401.880.927

Pada Tabel 13, terdapat jenis-jenis belanja barang yang nilainya cukup signifikan, yaitu belanja barang operasional, non operasional, belanja pemeliharaan serta belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Barang Operasional :

Tabel 15
Uraian Jenis Belanja Barang Operasional
 (dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA. 2014
Belanja Barang Operasional	
a. Belanja Keperluan Perkantoran	182.364.099.409
b. Belanja Pengadaan Bahan Makanan	118.986.404.596
c. Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	20.074.776.753
d. Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4.521.392.206
e. Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	92.034.679.745
f. Belanja Barang Operasional Lainnya	625.886.554.384
Jumlah Belanja Kotor	1.043.867.907.093
Pengembalian Belanja	(217.239.865)
Jumlah Belanja Bersih	1.043.650.667.228

b. Belanja Barang Non Operasional :

Tabel 16
Uraian Jenis Belanja Barang Non Operasional
(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA. 2014
Belanja Barang Non Operasional	
a. Belanja Bahan	170.887.413.612
b. Belanja Honor Output Kegiatan	244.250.548.359
c. Belanja Barang Non Operasional	1.431.211.536.995
Jumlah Belanja Kotor	1.846.349.498.966
Pengembalian Belanja	(853.253.609)
Jumlah Belanja Bersih	1.845.496.245.357

c. Belanja Pemeliharaan :

Tabel 17
Uraian Jenis Belanja Pemeliharaan
(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA. 2014
Belanja Pemeliharaan	
a. Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	152.549.126.775
b. Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	1.101.613.000
c. Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	819.048.384.475
d. Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.573.738.409
e. Belanja Biaya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	625.499.493.323
f. Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan	51.542.702.993
g. Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya	1.080.012.196
Jumlah Belanja Kotor	1.657.395.071.171
Pengembalian Belanja	(197.402.972)
Jumlah Belanja Bersih	1.657.197.668.199

d. Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda :

Tabel 18
Uraian Jenis Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda
(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA. 2014
Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	
a. Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	143.788.758.088
b. Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	1.204.191.600.658
c. Belanja Barang Fisik Lainnya untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	3.916.960.000
Jumlah Belanja Kotor	1.351.897.318.746
Pengembalian Belanja	(2.146.482.701)
Jumlah Belanja Bersih	1.349.750.836.045

Belanja Modal
Rp.18,974 Triliun

B.2.3 Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Untuk mengetahui apakah suatu belanja dapat dimasukkan sebagai Belanja Modal atau tidak, maka perlu diketahui definisi aset tetap atau aset lainnya dan kriteria kapitalisasi aset tetap.

Realisasi Belanja Modal Kementerian Perhubungan TA 2014 dan TA 2013 adalah masing-masing sebesar Rp18.974.661.265.721,- dan Rp23.583.734.863.803,-. Penurunan realisasi Belanja Modal sebesar 22,06 persen antara lain disebabkan penurunan belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, serta belanja modal jalan, irigasi dan jaringan. Realisasi Belanja Modal pada Kementerian Perhubungan TA. 2014 senilai Rp18.974.661.265.721,- terdiri dari Belanja Modal dari Transaksi Kas senilai Rp18.958.316.041.721,- dan Belanja Modal dari Transaksi Non Kas senilai Rp16.345.224.000,-.

Belanja Modal dari Transaksi Non Kas Kementerian Perhubungan senilai Rp16.345.224.000,- merupakan hibah langsung berupa tanah yang telah mendapat pengesahan dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) dan dicatat berdasarkan Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung, Barang/Jasa, dan Surat Berharga (MPHL-BJS) yang diterbitkan KPPN Jakarta VI. Transaksi ini terdapat pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) yaitu pada PPSDM Perhubungan Laut yang merupakan hibah tanah dari Pemda Sorong, Papua Barat.

Rincian Belanja Modal disajikan sebagai berikut :

Tabel 19
Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2014 dan 2013

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2014	REALISASI T.A. 2013	Naik (Turun)
I. TRANSAKSI KAS			
Belanja Modal Tanah	Rp 683.839.384.680	Rp 756.338.362.481	(9,59)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 4.174.009.630.987	Rp 4.235.486.090.258	(1,45)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 2.005.808.061.917	Rp 1.978.737.882.201	1,37
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 10.815.166.817.586	Rp 15.627.283.677.623	(30,79)
Belanja Modal Lainnya	Rp 1.312.483.519.369	Rp 967.135.133.878	35,71
Belanja Modal BLU	Rp 27.995.199.359	Rp 17.594.236.534	59,12
Jumlah Belanja Modal Transaksi Kas Bruto	Rp 19.019.302.613.898	Rp 23.582.575.382.975	(19,35)
Pengembalian Belanja Modal	Rp (60.986.572.177)	Rp (10.304.122.231)	491,87
Jumlah Belanja Modal Transaksi Kas Netto	Rp 18.958.316.041.721	Rp 23.572.271.260.744	(19,57)
II. TRANSAKSI NON KAS			
Belanja Modal Non Kas	Rp 16.345.224.000	Rp 11.463.603.059	42,58
Jumlah Belanja Modal Transaksi Non Kas Bruto	Rp 16.345.224.000	Rp 11.463.603.059	42,58
Pengembalian Belanja Modal	Rp -	Rp -	0,00
Jumlah Belanja Modal Transaksi Non Kas Netto	Rp 16.345.224.000	Rp 11.463.603.059	42,58
JUMLAH RAYA (B. Modal Transaksi Kas Netto + B. Modal Transaksi Non Kas Netto)	Rp 18.974.661.265.721	Rp 23.583.734.863.803	(19,54)

Tabel 20
Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2014 Per Unit Eselon I
(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BELANJA MODAL	SETJEN	ITJEN	DITJEN	HUBDAT	DITJEN	HUBLA	DITJEN	HUBUD	DITJEN	KA	BPSDM	BALITBANG	JUMLAH
I. TRANSAKSI KAS													
BM Tanah	1.636.846.000	-	142.917.500	3.296.390.000	393.359.361.381	208.666.982.899	76.736.886.900	-	683.839.384.680				
BM Peralatan dan Mesin	24.836.069.062	5.353.623.000	563.474.140.936	1.303.836.615.120	1.379.916.981.252	411.521.347.323	476.326.602.894	8.744.251.400	4.174.009.630.987				
BM Gedung dan Bangunan	87.282.887.774	-	176.042.085.639	220.580.953.633	953.808.923.775	142.404.942.155	421.253.777.115	4.434.491.826	2.005.808.061.917				
BM Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	1.185.174.484	2.632.410.909.746	2.405.231.683.500	5.762.941.139.056	13.397.910.800	-	10.815.166.817.586				
BM Lainnya	16.739.512.660	-	485.109.148.158	520.324.745.011	70.014.705.226	210.458.723.059	6.839.269.155	2.997.416.100	1.312.483.519.369				
BM BLU	-	-	-	-	-	-	27.995.199.359	-	27.995.199.359				
Jumlah B Modal Transaksi Kas Bruto	130.495.315.496	5.353.623.000	1.225.953.466.717	4.680.449.613.510	5.202.331.655.134	6.735.993.134.492	1.022.549.646.223	16.176.159.326	19.019.302.613.898				
Pengembalian	(2.100.000)	-	(199.414.646)	(2.458.376.334)	(2.519.409.305)	(55.788.401.932)	(18.869.960)	-	(60.986.572.177)				
Jumlah BM Transaksi Kas Netto	130.493.215.496	5.353.623.000	1.225.754.052.071	4.677.991.237.176	5.199.812.245.829	6.680.204.732.560	1.022.530.776.263	16.176.159.326	18.958.316.041.721				
II. TRANSAKSI NON KAS													
BM Non Kas	-	-	-	-	-	-	16.345.224.000	-	16.345.224.000				
Jumlah B Modal Transaksi Non Kas Bruto	-	-	-	-	-	-	16.345.224.000	-	16.345.224.000				
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Jumlah B Modal Transaksi Non Kas Netto	-	-	-	-	-	-	16.345.224.000	-	16.345.224.000				
JUMLAH RAYA (B. Modal Transaksi Kas Netto + B. Modal Transaksi Non Kas Netto)	130.493.215.496	5.353.623.000	1.225.754.052.071	4.677.991.237.176	5.199.812.245.829	6.680.204.732.560	1.038.876.000.263	16.176.159.326	18.974.661.265.721				

Pada Tabel 19 di atas terdapat jenis-jenis belanja modal yang nilainya cukup signifikan dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin :

Belanja Modal Peralatan dan Mesin merupakan Pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Tabel 21
Uraian Jenis Belanja Modal Peralatan dan Mesin
(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BELANJA		REALISASI TA. 2014
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
a.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.115.238.052.338
b.	Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	1.942.287.000
c.	Belanja Modal Perijinan Peralatan dan Mesin	136.180.000
d.	Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin	6.965.024.843
e.	Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin	142.756.000
f.	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	49.585.330.806
Jumlah Belanja Kotor		4.174.009.630.987
Pengembalian Belanja		(152.936.819)
Jumlah Belanja Bersih		4.173.856.694.168

b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan :

Belanja Modal Gedung dan Bangunan merupakan Pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak (kontraktual). Dalam belanja ini termasuk biaya untuk perencanaan dan pengawasan yang terkait dengan perolehan gedung dan bangunan.

Tabel 22
Uraian Jenis Belanja Modal Gedung dan Bangunan
 (dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA. 2014
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
a. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.956.048.854.959
b. Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan	837.331.900
c. Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	193.371.600
d. Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	48.728.503.458
Jumlah Belanja Kotor	2.005.808.061.917
Pengembalian Belanja	(1.104.121.708)
Jumlah Belanja Bersih	2.004.703.940.209

c. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan :

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan merupakan Pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat, menambah nilai aset, dan di atas batas minimal nilai kapitalisasi jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan.

Tabel 23
Uraian Jenis Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
 (dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA. 2014
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Bangunan	
a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan	7.578.746.405.476
b. Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan	0
c. Belanja Modal Irigasi	116.307.178.529
d. Belanja Modal Jaringan	2.956.814.510.451
e. Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan	1.075.657.000
f. Belanja Modal Perjalanan Jaringan	15.374.400
g. Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	110.619.908.000
h. Belanja Penambahan Nilai Jaringan	51.587.783.730
Jumlah Belanja Kotor	10.815.166.817.586
Pengembalian Belanja	(58.851.009.117)
Jumlah Belanja Bersih	10.756.315.808.469

d. Belanja Modal Lainnya :

Belanja Modal Lainnya merupakan Pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan/pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam perkiraan kriteria belanja modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jaringan (Jalan, Irigasi dan lain-lain). Termasuk dalam belanja modal ini: kontrak sewa beli (*leasehold*), pengadaan/pembelian barang-barang kesenian (*art pieces*), barang-barang purbakala dan barang-barang untuk museum, serta hewan ternak, buku-buku dan jurnal ilmiah sepanjang tidak dimaksudkan untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat. Termasuk dalam belanja modal ini adalah belanja modal non fisik yang besaran jumlah kuantitasnya dapat teridentifikasi dan terukur.

Tabel 24
Uraian Jenis Belanja Modal Lainnya
(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BELANJA		REALISASI TA. 2014
Belanja Modal Lainnya		
a.	Belanja Modal Lainnya	1.312.433.534.369
b.	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap	49.985.000
Jumlah Belanja Kotor		1.312.483.519.369
Pengembalian Belanja		(306.478.284)
Jumlah Belanja Bersih		1.312.177.041.085

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

Aset Lancar Rp4,62
triliun

C.1. ASET LANCAR

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah masing-masing sebesar Rp4.626.897.066.595,- dan Rp1.119.714.158.321,-.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Kementerian Perhubungan per 31 Desember 2014 dan 2013 tersaji pada Tabel 25.

Tabel 25
Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2014 dan 2013

Aset Lancar	TA 2014	TA 2013
Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp 628.188.760	Rp 1.167.058.545
Kas di Bendahara Penerimaan	Rp 14.426.548.539	Rp 10.121.153.259
Kas Lainnya dan Setara Kas	Rp 2.694.204.039	Rp 424.615.684.680
Kas pada BLU	Rp 247.960.743.934	Rp 193.152.487.378
Investasi Jangka Pendek BLU	Rp 60.000.000.000	Rp 25.023.013.699
Belanja Dibayar di Muka (prepaid)	Rp 1.433.039.639	Rp 219.863.167
Uang Muka Belanja (prepayment)	Rp 4.545.398.220	Rp 22.216.828.700
Piutang Bukan Pajak	Rp 134.172.732.011	Rp 167.358.155.328
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	Rp (24.363.665.547)	Rp (19.276.250.570)
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	Rp 11.608.705.570	Rp 25.703.566.497
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih TP/TGR	Rp (11.606.013.528)	Rp (128.517.833)
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	Rp 1.454.917.500	Rp 2.656.899.000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	Rp (47.136.775)	Rp (53.146.683)
Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	Rp 6.334.000	Rp -
Penyisihan piutang tidak tertagih Piutang dari kegiatan non operasional BLU	Rp (31.670)	Rp -
Persediaan	Rp 4.179.931.197.304	Rp 264.005.547.156
Persediaan BLU	Rp 4.051.904.599	Rp 2.931.815.998
Jumlah	Rp 4.626.897.066.595	Rp 1.119.714.158.321

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp628,18 juta

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp628.188.760,- dan sebesar Rp1.167.058.545,-.

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca.

Tabel 26
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per Eselon I

No	Uraian Eselon I	31-Des-14	31-Des-13	Kenaikan/Penurunan
1	Sekretariat Jenderal	Rp 130.470.836	Rp 247.433.636	Rp (116.962.800)
2	Inspektorat Jenderal	Rp -	Rp -	Rp -
3	Ditjen Perhubungan Darat	Rp 61.803.248	Rp 114.257.553	Rp (52.454.305)
4	Ditjen Perhubungan Laut	Rp 310.360.821	Rp 382.411.419	Rp (72.050.598)
5	Ditjen Perhubungan Udara	Rp 124.821.200	Rp 422.541.649	Rp (297.720.449)
6	Ditjen Perkeretaapian	Rp 600	Rp -	Rp 600
7	Badan Litbang Perhubungan	Rp -	Rp 325.700	Rp (325.700)
8	BPSDM Perhubungan	Rp 732.055	Rp 88.588	Rp 643.467
	Total	Rp 628.188.760	Rp 1.167.058.545	Rp (538.869.785)

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 27
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

No	Uraian Eselon 1	Saldo Kas	Penyetoran ke Kas Negara Setelah Tanggal 31 Des 2014	Sisa Kas yang belum disetor ke kas negara
1	Sekretariat Jenderal	Rp 130.470.836	Rp 114.349.113	Rp 16.121.723
2	Inspektorat Jenderal	Rp -	Rp -	Rp -
3	Ditjen Perhubungan Darat	Rp 61.803.248	Rp 61.803.248	Rp -
4	Ditjen Perhubungan Laut	Rp 310.360.821	Rp 310.360.821	Rp -
5	Ditjen Perhubungan Udara	Rp 124.821.200	Rp 124.821.200	Rp -
6	Ditjen Perkeretaapian	Rp 600	Rp 600	Rp -
7	Badan Litbang Perhubungan	Rp -	Rp -	Rp -
8	Badan Pengembangan SDM Perhubungan	Rp 732.055	Rp 732.055	Rp -
	Total	Rp 628.188.760	Rp 612.067.037	Rp 16.121.723

Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran Sekretariat Jenderal terdapat pada Satker Atase Perhubungan di Kuala Lumpur karena akan dipotong dari Uang Persediaan (UP) Tahun 2015.

*Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp14,42 miliar*

C.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2014 dan per 31 Desember 2013 sebesar Rp14.426.548.539,- dan sebesar Rp10.121.153.259,-.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan yang mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan selaku wajib pungut yang belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan lingkup per Eselon I tersaji pada tabel di bawah ini :

Tabel 28

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per Eselon I

No	Uraian Eselon I	31-Des-14	31-Des-13	Kenaikan/Penurunan
1	Ditjen Perhubungan Darat	Rp 2.283.686	Rp 2.218.679	Rp 65.007
2	Ditjen Perhubungan Laut	Rp 3.068.665.519	Rp 5.310.360.193	Rp (2.241.694.674)
3	Ditjen Perhubungan Udara	Rp 699.248.838	Rp 882.795.585	Rp (183.546.747)
4	BPSDM Perhubungan	Rp 10.656.350.496	Rp 3.925.778.802	Rp 6.730.571.694
	Total	Rp 14.426.548.539	Rp 10.121.153.259	Rp 4.305.395.280

Tabel 29

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

Kode	Uraian Eselon 1	Saldo Kas	Penyetoran ke Kas Negara Setelah Tanggal 31	Sisa Kas yang belum disetor ke kas negara
03	Ditjen Perhubungan Darat	Rp 2.283.686	Rp 2.283.686	Rp -
04	Ditjen Perhubungan Laut	Rp 3.068.665.519	Rp 3.068.665.519	Rp -
05	Ditjen Perhubungan Udara	Rp 699.248.838	Rp 699.248.838	Rp -
12	BPSDM Perhubungan	Rp 10.656.350.496	Rp 436.720.000	Rp 10.219.630.496
	Total	Rp 14.426.548.539	Rp 4.206.918.043	Rp 10.219.630.496

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp3.068.665.519,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 30

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Ditjen Perhubungan Laut

No.	Uraian	31 Desember 2014	31 Desember 2013
1	0199 Kantor Pusat	567.683.677	2.755.567.878
2	0100 Prov. DKI Jakarta	1.049.496.291	1.185.406.729
3	0200 Prov. Jawa Barat	73.552.744	
4	0300 Prov. Jawa Tengah		
5	0500 Prov. Jawa Timur	424.804.221	
6	0600 Prov. D.I. aceh		
7	0700 Prov. Sumatera Utara		95.891.655
8	0800 Prov. Sumatera Barat	6.325.310	3.098.850
9	0900 Prov. Riau	13.640.100	49.005.905
10	1000 Prov. Jambi	26.989.786	7.951.500
11	1100 Prov. Sumatera Selatan		
12	1200 Prov. Lampung	22.364.632	
13	1300 Prov. Kalimantan Barat		
14	1400 Prov. Kalimantan Tengah		
15	1500 Prov. Kalimantan Selatan	45.769.110	
16	1600 Prov. Kalimantan Timur	369.713.783	206.318.921
17	1700 Prov. Sulawesi Utara	40.158.240	15.079.250
18	1800 Prov. Sulawesi Tengah	1.325.500	2.981.250
19	1900 Prov. Sulawesi Selatan	87.219.220	30.013.200
20	2000 Prov. Sulawesi Tenggara		
21	2100 Prov. Maluku	155.876.950	333.580.234
22	2200 Prov. Bali		
23	2300 Prov. Nusa Tenggara Barat	256.000	2.315.207
24	2400 Prov. Nusa Tenggara Timur	14.115.750	1.420.000
25	2500 Prov. Irian Jaya	60.735.390	30.482.411
26	2600 Prov. Bengkulu		
27	2800 Prov. Maluku Utara	45.929.385	562.361.390
28	2900 Prov. Banten	55.431.080	17.383.842
29	3000 Prov. Bangka Belitung		
30	3100 Prov. Gorontalo	5.755.000	7.744.557
31	3200 Prov. Kepulauan Riau	1.489.350	2.608.164
32	3300 Prov. Papua Barat		1.149.250
33	3400 Prov. Sulawesi Barat	7.000	
	JUMLAH	3.068.638.519	5.310.360.193

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada Ditjen Perhubungan Udara sebesar Rp699.248.838,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 31
Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Ditjen Perhubungan Udara

No	Uraian	31-Des-2014	31-Des-2013	Kenaikan/Penurunan
1	DKI JAKARTA	-	368.400.000	(368.400.000)
2	INSTANSI PUSAT	27.000.000	15.305.000	11.695.000
3	NANGROE ACEH	1.070.000	2.189.450	(1.119.450)
4	SUMATERA BARAT	1.700.000	595.000	1.105.000
5	RIAU	-	56.280	(56.280)
6	LAMPUNG	151.871.060	73.016.870	78.854.190
7	KALIMANTAN TENGAH	7.502.000	7.860.000	(358.000)
8	KALIMANTAN SELATAN	2.110.000	7.864.000	(5.754.000)
9	KALIMANTAN TIMUR	107.667.850	117.269.000	(9.601.150)
12	MALUKU	45.387.495	10.668.950	34.718.545
14	NUSA TENGGARA TIMUR	74.534.500	73.051.900	1.482.600
15	PAPUA	23.063.800	201.051.754	(177.987.954)
16	BENGKULU	-	5.092.381	(5.092.381)
17	MALUKU UTARA	72.840.021	-	72.840.021
18	GORONTALO	14.797.405	-	14.797.405
19	RIAU KEPULAUAN	566.782	375.000	191.782
20	PAPUA BARAT	168.677.925	-	168.677.925
21	SULAWESI BARAT	460.000	-	460.000
TOTAL		699.248.838	882.795.585	(183.546.747)

Kas di bendahara penerimaan sebesar Rp699.248.838 secara keseluruhan sudah disetor ke kas negara per Januari 2015.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada Badan Pengembangan SDM Perhubungan sebesar Rp10.656.350.496,-sebagai berikut :

Tabel 32
Rincian Saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada BPSDMP

Kantor/Satker	31 Desember 2014	31 Desember 2013
ATKP Makassar	Rp -	Rp 1.754.133.882
ATKP Medan	Rp -	Rp 2.129.859.910
BP2TD Palembang	Rp -	Rp 540.000
BP2IP Barombong	Rp 9.902.038.500	Rp 5.946.010
STTD Bekasi	Rp -	Rp 35.299.000
PPSDM Perhubungan Udara	Rp 137.950.000	Rp -
STPI Curug	Rp 298.770.000	Rp -
BP2IP Sorong	Rp 251.101.996	Rp -
BP2IP Tangerang	Rp 66.490.000	Rp -
Saldo	Rp 10.656.350.496	Rp 3.925.778.802

Saldo Kas Bendahara Penerima sebesar Rp10.656.350.496,- terdiri dari :

1. Saldo Kas di Bendahara Penerima pada Satker BP2IP Barombong sebesar Rp9.902.038.500,- yang belum disetorkan ke kas negara dikarenakan peserta belum melaksanakan diklat dan sering terjadi penarikan sejumlah dana secara tiba-tiba dari calon peserta diklat yang tidak jadi mengikuti diklat dimaksud.
2. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada Satker PPSDM Perhubungan Udara sebesar Rp137.950.000,- dan telah disetor ke kas negara dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 33
Rincian Saldo Kas di Bendahara Penerimaan
pada Satker PPSDM Perhubungan Udara

No	Tanggal Setor	NTPN	NTB	Jumlah Setor	Ket
1	02-Jan-15	11040009130315	000000303659	Rp 500.000	SSBP
2	03-Jan-15	115090110041100	000000178009	Rp 2.400.000	SSBP
3	04-Jan-15	313000405101206	000000028773	Rp 2.560.000	SSBP
4	05-Jan-15	704090001070612	000000219625	Rp 480.000	SSBP
5	06-Jan-15	811000803140506	000000149748	Rp 2.560.000	SSBP
6	07-Jan-15	1110010902010900	000000722930	Rp 2.500.000	SSBP
7	08-Jan-15	30DCD0N9T81BQJ8V	000000321855	Rp 1.000.000	SIMPIONI
8	09-Jan-15	3CCC80N9T81BQJA6	000000124405	Rp 62.200.000	SIMPIONI
9	10-Jan-15	7EE660N9T81BQJ9D	000000349327	Rp 63.750.000	SIMPIONI
Jumlah Setoran				Rp 137.950.000	

3. Saldo Kas di Bendahara Penerima pada Satker STPI sebesar Rp298.770.000,- yang merupakan uang pendaftaran taruna (Sipencatar) yang belum disetorkan ke kas negara per tanggal neraca, namun setelah tanggal neraca sudah disetorkan ke Kas Negara per tanggal 30 Januari 2015 senilai Rp288.230.000,- no. NTPN : BCEE80N9TGAHK1MC dan no NTPN : 78C160N9TGAHK1NMK senilai Rp10.540.000,-.
4. Saldo Kas di Bendahara Penerima pada Satker BP2IP Sorong sebesar Rp251.101.996,- yang belum disetorkan ke kas negara dikarenakan peserta belum melaksanakan diklat dan sering terjadi penarikan sejumlah dana secara tiba-tiba dari calon peserta diklat yang tidak jadi mengikuti diklat dimaksud.
5. Saldo Kas di Bendahara Penerima pada Satker BP2IP Tangerang sebesar Rp66.490.000,- yang belum disetorkan ke kas negara pada tanggal neraca.

Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp2,69 miliar

C.1.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2014 dan per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp2.694.204.039,- dan Rp424.615.684.680,-.

Kas Lainnya dan Setara Kas mencakup Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran, yaitu kas yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP, baik itu saldo rekening di Bank maupun saldo uang tunai.

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas tersaji pada tabel berikut :

Tabel 34
Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

No.	Keterangan	31 Desember 2014	31 Desember 2013
1	Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	Rp 255.893.747	Rp 422.384.178.050
2	Pendapatan Yang Ditangguhkan	Rp 70.304.997	Rp 1.107.064
3	Dana Pihak Ketiga	Rp 10.793.840	
4	Sisa Dana Hibah Langsung ANF	Rp 2.337.098.073	Rp 2.193.289.391
5	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang belum	Rp 20.113.382	Rp 37.110.175
	Jumlah	Rp 2.694.204.039	Rp 424.615.684.680

Tabel 35
Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per Eselon I

No	Eselon I	Keterangan	Jumlah
1	Ditjen Perhubungan Darat	-Pendapatan yang ditangguhkan -Utang kepada pihak ketiga lainnya	Rp 240.000 Rp 43.103.632
2	Ditjen Perhubungan Laut	-Utang kepada pihak ketiga lainnya -Pendapatan yang ditangguhkan -Saldo Hibah Langsung dari ANF -Dana Pihak Ketiga	Rp 153.979.175 Rp 4.660.911 Rp 2.337.098.073 Rp 175
3	Ditjen Perhubungan Udara	-Utang kepada pihak ketiga lainnya -Pendapatan yang ditangguhkan -Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang belum disetor -Dana Pihak Ketiga	Rp 58.810.940 Rp 3.637.486 Rp 2.927.700 Rp 10.793.665
4	Badan PSDM Perhubungan	-Pendapatan yang ditangguhkan -Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang belum disetor	Rp 61.766.600 Rp 17.185.682
			Rp 2.694.204.039

Jumlah tersebut di atas belum dilakukan penyetoran ke kas negara dan pendistribusian kepada pihak yang terkait pada tanggal neraca.

Saldo Hibah Langsung senilai Rp2.337.098.073,- merupakan saldo rekening hibah *Aids Navigation Fund* (ANF) untuk kegiatan bantuan pemeliharaan dan penggantian peralatan kenavigasian Indonesia di Selat Malaka (*maintenance and replacement of aids to navigation in the Strait of Malacca*). Posisi saldo rekening per 31 Desember 2014 adalah sebesar \$187.869,6 dengan kurs tengah BI pada tanggal neraca Rp12.440,-.

Kas pada BLU
Rp247,96 miliar

C.1.4 Kas pada Badan Layanan Umum (BLU)

Jumlah Kas pada Badan Layanan Umum per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp247.960.743.934,- dan Rp193.152.487.378,- Kas pada BLU ini merupakan saldo penerimaan kas yang berasal dari pendapatan BLU yang belum digunakan, terdapat pada 7 (tujuh) Badan Layanan Umum di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Tabel 36
Besarnya Saldo Kas pada masing-masing BLU

NO	NAMA SATKER	31-Des-14	31-Des-13
1	STIP JAKARTA	38.893.419.602	61.443.347.746
2	BP3IP JAKARTA	111.339.905.963	81.703.167.781
3	PIP SEMARANG	27.058.702.939	18.699.039.932
4	PIP MAKASSAR	34.531.008.501	17.608.020.146
5	PKTJ TEGAL	6.655.687.187	4.682.254.717
6	ATKP SURABAYA	13.221.769.934	8.375.854.481
7	POLTEKPEL SURABAYA	16.260.249.808	640.802.575
TOTAL		247.960.743.934	193.152.487.378

Investasi Jangka
Pendek BLU
Rp60 miliar

C.1.5 Investasi Jangka Pendek Badan Layanan Umum

Investasi Jangka Pendek Badan Layanan Umum per tanggal 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp60.000.000.000,- dan Rp25.023.013.699,- yang merupakan Investasi Jangka Pendek Poltekpel Surabaya dan STIP.

Tabel 37
Rincian Investasi Jangka Pendek BLU

No	Jenis	31-Des-14	31-Des-13
1	Deposito BNI 46 Poltekpel Surabaya	Rp 25.000.000.000	Rp 20.000.000.000
2	Deposito BNI 46 STIP	Rp 35.000.000.000	Rp 5.023.013.699
Jumlah		Rp60.000.000.000	Rp25.023.013.699

Belanja Dibayar
Dimuka Rp1,43
miliar

C.1.6 Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)

Jumlah Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2014 dan per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp1.433.039.639,- dan Rp219.863.167,- merupakan pengeluaran belanja yang dilakukan atas pekerjaan/jasa pada periode tertentu yang dibayarkan pada awal perikatan atau perjanjian.

Tabel 38
Belanja Dibayar Dimuka per Eselon I

No	Eselon I	31-Des-14	31-Des-13	Kenaikan / (penurunan)
1	Ditjen Perhubungan Darat	Rp 170.000.000	Rp 152.083.334	Rp 17.916.666
2	Ditjen Perhubungan Laut	Rp 60.000.000	Rp 60.000.000	-
3	Badan PSDM Perhubungan	Rp 1.203.039.639	Rp 7.779.833	Rp 1.195.259.806
	Total	Rp 1.433.039.639	Rp 219.863.167	Rp 1.213.176.472

Pada Ditjen Perhubungan Darat terdapat Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp170.000.000,- yang merupakan sewa rumah dinas dan gedung kantor pada Kantor OPP Gilimanuk. Pada Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp60.000.000,- merupakan sewa gedung kantor KSOP Malahayati untuk tahun anggaran 2015, sedangkan pada Badan PSDM Perhubungan senilai Rp591.632.584,- merupakan Asuransi Taruna ATKP Surabaya sebesar Rp4.898.250,- dan Sewa dibayar dimuka modul CBT STIP Jakarta senilai Rp. 1.198.141.389,-.

Uang Muka
Belanja Rp4,54
miliar

C.1.7 Uang Muka Belanja (*Prepayment*)

Jumlah Uang Muka Belanja (*prepayment*) per 31 Desember 2014 dan per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp4.545.398.220,- dan Rp22.216.828.700,-.

Uang Muka Belanja (*Prepayment*) sebesar Rp4.545.398.220,- terdapat pada Ditjen Perkeretaapian untuk mencatat nilai pekerjaan yang masih harus dikerjakan oleh kontraktor pada Satker Pembangunan Jalur Ganda Tanah Abang - Serpong - Maja - Merak berupa Instalasi Gardu Listrik Induk Kapasitas Besar oleh PT. PLN yang sampai 31 Desember 2014 masih belum selesai.

Piutang Bukan
Pajak
Rp134,17 miliar

C.1.8 Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2014 dan per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp134.172.732.011,- dan Rp167.358.155.328,- yang merupakan semua hak atau klaim pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran.

Tabel 39
Piutang Bukan Pajak per Eselon I

Kode	Eselon I	31-Des-14	31-Des-13	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Sekretariat Jenderal	Rp 178.489.947	Rp 64.375.994	Rp 114.113.953
2	Ditjen Perhubungan Darat	Rp 2.959.856.912	Rp 1.293.935.375	Rp 1.665.921.537
3	Ditjen Perhubungan Laut	Rp 98.601.143.385	Rp 128.372.711.687	Rp (29.771.568.302)
4	Ditjen Perhubungan Udara	Rp 21.411.429.673	Rp 27.208.566.660	Rp (5.797.136.987)
5	Ditjen Perkeretaapian	Rp -	Rp 45.176.400	Rp (45.176.400)
6	Badan Pengembangan SDM	Rp 11.021.812.094	Rp 10.373.389.212	Rp 648.422.882
	Total	Rp134.172.732.011	Rp167.358.155.328	Rp (33.185.423.317)

Piutang Bukan Pajak terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu :

1. Piutang PNPB terkait tugas pokok dan fungsi yang terdiri dari Piutang Jasa Kepelabuhanan dan kenavigasian, Piutang Jasa Kebandaraan, Piutang Jasa Pendidikan;
2. Piutang PNPB terkait non tugas pokok dan fungsi yang terdiri dari piutang sewa rumah dinas, piutang atas jaminan pelaksanaan pekerjaan, piutang atas denda pelaksanaan pekerjaan, piutang atas kelebihan pembayaran, piutang atas kekurangan volume pekerjaan dan piutang atas ketarunaan lainnya.

Piutang tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Piutang Bukan Pajak Sekretariat Jenderal per 31 Desember 2014 sebesar Rp178.489.947,- dengan rincian sebesar Rp90.902.019,- merupakan piutang yang berasal dari sewa rumah dinas satker Kantor Pusat Sekretariat Jenderal sebanyak 45 (empat puluh lima) unit yang disebabkan pembayarannya dilakukan secara langsung tidak melalui pemotongan gaji dan sebesar Rp87.587.928,- merupakan koreksi piutang atas kekurangan volume pekerjaan Tahun 2014.
2. Piutang Bukan Pajak Ditjen Perhubungan Darat merupakan Piutang Lainnya yang terdapat pada Satker Direktorat Lalu Lintas Angkutan Jalan senilai Rp. 576.603.715,- dan Satker Pengembangan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan senilai Rp. 2.383.253.197,-.
3. Pada Ditjen Perhubungan Laut terdapat piutang jasa kepelabuhanan dan kenavigasian (tupoksi) dalam mata uang rupiah dan dollar. Penyajian piutang dalam dollar dikonversikan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca 31 Desember 2014 (kurs Rp12.440). Sedangkan piutang non tupoksi antara lain berupa jaminan pelaksanaan atas pekerjaan senilai Rp3.711.264.574 pada KSOP Sungai Pakning dan Disnav Sibolga yang tidak selesai sampai dengan akhir kontrak.
4. Piutang Bukan Pajak Ditjen Perhubungan Udara sebesar Rp 21.411.429.673,- dengan rincian sebesar Rp 17.213.778.668,- merupakan piutang yang terkait tugas pokok dan fungsi (tupoksi), sedangkan sebesar Rp4.197.651.005,- merupakan piutang yang berasal dari kelebihan pembayaran, kekurangan volume pekerjaan dan denda keterlambatan pekerjaan (Non Tupoksi) pada beberapa paket pekerjaan pada Tahun 2011, 2013, dan 2014.

5. Piutang Bukan Pajak Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan senilai Rp11.021.812.094,- dengan rincian :

Tabel 40
Piutang Bukan Pajak pada BPSDM Perhubungan

No.	Kantor/Satker	Jumlah
1	PIP Makassar	Rp 27.260.000
2	STPI Curug	Rp 1.949.294.400
3	PKTJ Tegal	Rp 934.374.261
4	PPSDM Perhubungan Laut	Rp 1.074.193.761
5	ATKP Makassar	Rp 6.850.368.489
6	STIP Jakarta	Rp 183.841.183
7	PIP Semarang	Rp 2.530.000
Jumlah		Rp 11.021.862.094

Rincian Piutang Bukan Pajak TUSI per 31 Desember 2014 :

Tabel 41
Rincian Piutang Bukan Pajak TUSI per 31 Desember 2014

No.	Uraian Piutang Bukan Pajak	Jumlah
1	Piutang Diklat Pertamina Angkatan III dan IV yang diselenggarakan oleh PKTJ Tegal	Rp 275.000.000
2	Diklat Jembatan Timbang oleh PKTJ Tegal	Rp 41.052.500
3	Piutang uang pendidikan yang belum dibayar Taruna (PIP Semarang)	Rp 2.530.000

Rincian Piutang Bukan Pajak Non TUSI per 31 Desember 2014 :

Tabel 42
Rincian Piutang Bukan Pajak Non TUSI per 31 Desember 2014

No.	Uraian Piutang Bukan Pajak	Jumlah
1	Piutang Permakanan dan Laundry Taruna pada PIP Makasar	Rp 27.260.000
2	Klaim Jaminan Pekerjaan Pembangunan Asrama Tahap II STPI Curug	Rp 1.139.505.000
3	Klaim Jaminan Pekerjaan Perawatan/Overhaul Pesawat Latih STPI Curug	Rp 226.575.000
4	Denda Keterlambatan Pekerjaan Pembangunan Asrama Tahap II dan Pekerjaan Perawatan/Overhaul STPI Curug	Rp 583.214.400
5	Denda Keterlambatan pekerjaan PKTJ Tegal	Rp 16.856.680
6	Setoran kelebihan pembayaran pembangunan asrama dan peralatan lab. TKO PKTJ Tegal	Rp 601.415.081
7	Denda keterlambatan pekerjaan PPSDM Phb Laut	Rp 1.074.193.761
8	Jaminan pelaksanaan pekerjaan dan denda keterlambatan pekerjaan ATPK Makassar	Rp 6.850.368.489
9	Pencairan jaminan pelaksanaan pekerjaan STIP akibat pemutusan kontrak pekerjaan perawatan Engine Room	Rp 20.507.850
10	Pendapatan Bunga Deposito yang belum dicatat oleh STIP	Rp 163.333.333
Jumlah		Rp10.703.229.594

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih –
Piutang Bukan
Pajak (Rp 24,36
miliar)

C.1.9 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2014 dan per 31 Desember 2013 adalah sebesar (Rp24.363.665.547,-) dan (Rp19.276.250.570,-) yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara Persentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih didasarkan atas kualitas piutang yaitu piutang lancar sebesar 5%, piutang kurang lancar 10%, piutang diragukan sebesar 50% dan piutang macet sebesar 100%. Untuk piutang yang telah diserahkan ke DJKN tidak dibentuk penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 100% (macet) karena telah direklasifikasi ke aset lain-lain.

Tabel 43
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Bukan Pajak per Eselon I

Kode	Eselon I	Umur Piutang (Kualitas)				Saldo Piutang
		0 - 30 hari (lancar)	31 - 60 hari (kurang lancar)	61 - 90 hari (diragukan)	> 91 hari (macet)	
01	Sekretariat Jenderal	Rp 87.587.928	Rp 90.902.019			Rp 178.489.947
02	Ditjen Perhubungan Darat	Rp 2.959.856.912				Rp 2.959.856.912
03	Ditjen Perhubungan Laut	Rp 80.551.322.277	Rp 110.715.733	Rp -	Rp 17.939.105.375	Rp 98.601.143.385
04	Ditjen Perhubungan Udara	Rp 10.427.435.678	Rp 2.228.870.975	Rp 6.188.315.202	Rp 2.566.807.818	Rp 21.411.429.673
05	Ditjen Perkeretaapian					Rp -
12	BPSDM Perhubungan	Rp 11.020.412.094			Rp 1.400.000	Rp 11.021.812.094
	Total Piutang	Rp 105.046.614.889	Rp 2.430.488.727	Rp 6.188.315.202	Rp 20.507.313.193	Rp 134.172.732.011
	% Penyisihan	0,50%	10%	50%	100%	
	Total Penyisihan	519.145.880	243.048.873	3.094.157.601	20.507.313.193	24.363.665.547

BL Tagihan
TP/TGR Rp11,60
miliar

C.1.10 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Jumlah Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per 31 Desember 2014 dan per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp11.608.705.570,- dan Rp25.703.566.497,- yang merupakan tagihan tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi (TGR) yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Tabel 44
Bagian Lancar TP/TGR per Eselon I

Kode	Eselon I	31-Des-14	31-Des-13	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Sekretaris Jenderal	Rp -	Rp -	Rp -
2	Ditjen Perhubungan Darat	Rp -	Rp -	Rp -
3	Ditjen Perhubungan Laut	Rp 11.608.705.570	Rp 25.691.566.497	Rp (14.082.860.927)
4	Ditjen Perhubungan Udara	Rp -	Rp 12.000.000	Rp (12.000.000)
5	Ditjen Perkeretaapian	Rp -	Rp -	Rp -
6	Badan Pengembangan SDM Perhubungan	Rp -	Rp -	Rp -
	Total	Rp 11.608.705.570	Rp 25.703.566.497	Rp (14.094.860.927)

Bagian Lancar TP/TGR Ditjen Perhubungan Laut terdiri dari :

- Bagian lancar TP/TGR sebesar Rp11.606.000.000 merupakan Kerugian Negara atas SKTJM pada Disnav Surabaya;
- Bagian lancar TP/TGR sebesar Rp2.705.570 berada di UPP Wasior.

Penyisihan piutang
tak tertagih – BL
TP TGR (Rp11,60
miliar)

C.1.11 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi.

Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2014 dan per 31 Desember 2013 adalah sebesar (Rp11.606.013.528,-) dan (Rp128.517.833,-) yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Tabel 45
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih BL TP/TGR

Kode	Eselon I	Umur Piutang (Kualitas)				Saldo Piutang
		0 - 30 hari (lancar)	31 - 60 hari (kurang lancar)	61 - 90 hari (diragukan)	> 91 hari (macet)	
01	Sekretariat Jenderal		Rp -			Rp -
02	Ditjen Perhubungan Darat	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
03	Ditjen Perhubungan Laut	Rp 2.705.570	Rp -	Rp -	Rp 11.606.000.000	Rp 11.608.705.570
04	Ditjen Perhubungan Udara					Rp -
05	Ditjen Perkeretapihan					Rp -
12	BPSDM Perhubungan					Rp -
	Total Piutang	Rp 2.705.570	Rp -	Rp -	Rp 11.606.000.000	Rp 11.608.705.570
	% Penyisihan	0,50%	10%	50%	100%	
	Total Penyisihan	13.528	0	0	11.606.000.000	11.606.013.528

Piutang Kegiatan
Operasional BLU
Rp1,45 miliar

C.1.12 Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum

Jumlah Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum per 31 Desember 2014 per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp1.454.917.500,- dan Rp2.656.899.000,- yang terdapat pada Eselon I Badan Pengembangan SDM Perhubungan atas 2 (dua) satker BLU yaitu:

Tabel 46
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per Satker BLU

No.	Uraian Satker	Jumlah Debitur	Jumlah
1	ATKP Surabaya	362	Rp 1.044.305.000
2	STIP Jakarta	202	Rp 410.612.500
	JUMLAH	564	Rp 1.454.917.500

Tabel 47
Rincian Jenis Piutang dari Kegiatan Operasional BLU

No.	Uraian Piutang	Jumlah
PIUTANG DARI KEGIATAN OPERASIONAL BLU (TUGAS DAN FUNGSI)		
1	Piutang Diklat Pendidikan dan Pembentukan ATKP Surabaya	Rp 993.305.000
2	Piutang Upgrading (ANT dan ATT) STIP Jakarta	Rp 217.442.500
3	Piutang kerjasama pendidikan dan pelatihan Refreshing (ANT dan ATT)	Rp 130.550.000
TOTAL PIUTANG TUSI		Rp 1.341.297.500
PIUTANG DARI KEGIATAN OPERASIONAL BLU (NON TUGAS DAN FUNGSI)		
1	Piutang Sewa STIP	Rp 62.620.000
2	Piutang Sewa Kantin dan alat HWD ATKP Surabaya	Rp 51.000.000
TOTAL PIUTANG NON TUSI		Rp 113.620.000

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Operasional BLU sebesar (Rp47,13 juta)

C.1.13 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Operasional BLU

Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per 31 Desember 2014 dan per 31 Desember 2013 adalah sebesar (Rp47.136.775) dan (Rp53.146.683,-). Yang terdapat pada STIP Jakarta dan ATKP Surabaya.

Tabel 48
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Kegiatan Operasional BLU

No	Satker	Umur Piutang (Kualitas)				Saldo Piutang
		0 - 30 hari (lancar)	31 - 60 hari (kurang lancar)	61 - 90 hari (diragukan)	> 91 hari (macet)	
1	STIP	Rp 370.550.000	Rp -	-	Rp 40.062.500	Rp 410.612.500
2	ATKP Surabaya	Rp 1.044.305.000	Rp -	Rp -	-	Rp 1.044.305.000
Total Piutang		Rp 1.414.855.000	Rp -	Rp -	Rp 40.062.500	Rp 1.454.917.500
% Penyisihan		0,50%	10%	50%	100%	
Total Penyisihan		7.074.275	0	0	40.062.500	47.136.775

Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU sebesar Rp6,33 juta

C.1.14 Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum

Jumlah Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum per 31 Desember 2014 per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp6.334.000,- dan Rp0,- yang terdapat pada Eselon I Badan Pengembangan SDM Perhubungan berupa Piutang PIP Makassar sewa ruangan BLU yaitu sewa ruangan untuk Laundry, Fotocopy dan Ruang Koperasi untuk Bulan Desember 2014.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih dari Kegiatan Non Operasional BLU sebesar Rp31,67 ribu)

C.1.15 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum (BLU)

Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah masing-masing sebesar (Rp31.670,-) dan Rp0,- yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Penyisihan merupakan penyisihan piutang lancar yaitu sebesar 0,5% dari Rp6.334.000,- sebesar Rp31.670,-.

Persediaan Non
BLU sebesar
Rp4,17 triliun

C.1.16 Persediaan Non BLU

Jumlah Persediaan Non BLU per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebesar Rp4.179.931.197.304,- dan Rp264.005.547.156,-

Tabel 49
Rincian Persediaan per Eselon I

Kode	Eselon I	31-Des-14	31-Des-13	Kenaikan / (penurunan)
01	Sekretariat Jenderal	Rp 305.705.197	Rp 330.267.816	Rp (24.562.619)
02	Inspektorat Jenderal	Rp 13.818.149	Rp 11.660.425	Rp 2.157.724
03	Ditjen Perhubungan Darat	Rp 3.397.203.991.175	Rp 56.397.918.563	Rp 3.340.806.072.612
04	Ditjen Perhubungan Laut	Rp 102.177.645.965	Rp 108.849.003.346	Rp (6.671.357.381)
05	Ditjen Perhubungan Udara	Rp 125.607.254.943	Rp 95.016.837.048	Rp 30.590.417.895
08	Ditjen Perkeretaapian	Rp 553.186.093.420	Rp 2.234.170.306	Rp 550.951.923.114
11	Badan Litbang Perhubungan	Rp 23.536.125	Rp 19.900.900	Rp 3.635.225
12	Badan Pengembangan SDM Perhubungan	Rp 1.413.152.330	Rp 1.145.788.752	Rp 267.363.578
	Total	Rp 4.179.931.197.304	Rp 264.005.547.156	Rp 3.915.925.650.148

Tabel 50
Daftar Persediaan per 31 Desember 2014

Barang Konsumsi	36.704.624.743
Amunisi	92.906.810
Bahan Untuk Pemeliharaan	3.717.392.589
Suku Cadang	699.995.340.816
Persediaan Untuk di Jual /diserahkan Kepada Masyarakat	895.185.451.894
Pita Cukai, Materai dan Leges	4.528.500
Bahan Baku	17.673.889.870
Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	5.022.720.350
Persediaan Dalam Proses Pengerjaan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	2.498.582.512.483
Persediaan lainnya	22.951.829.249
Jumlah	4.179.931.197.304

Nilai persediaan yang disajikan pada neraca per eselon I merupakan nilai berdasarkan hasil laporan keuangan masing-masing eselon I yang sudah dilakukan *stock opname*.

Terdapat perbedaan antara nilai persediaan dalam Neraca dengan SIMAK BMN sebesar Rp3.321.138.930.179,- yang terdapat pada Ditjen Perhubungan Darat dengan rincian sebagai berikut :

- Sebesar Rp726.000.446.891,- merupakan reklasifikasi dari aset lain-lain ke persediaan dan sebesar Rp96.555.970.805,- merupakan reklasifikasi dari aset tetap irigasi ke persediaan pada Satker Pengembangan LLASDP Papua.

- b. Sebesar Rp2.498.582.512.483 merupakan persediaan dalam proses pengerjaan untuk diserahkan kepada masyarakat yang sebelumnya dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan dan telah direklasifikasi ke persediaan.

Terhadap perbedaan ini akan dilakukan koreksi dalam aplikasi persediaan SIMAK BMN pada Semester I 2015.

Persediaan BLU
Rp4,05 miliar

C.1.17 Persediaan Badan Layanan Umum

Jumlah Persediaan Badan Layanan Umum per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebesar Rp4.051.904.599,- dan Rp2.931.815.998,-.

Nilai Persediaan BLU terdapat pada 7 (tujuh) satker Badan Layanan Umum di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Tabel 51

Rincian Persediaan masing-masing satker Badan Layanan Umum

No	Nama Satker	31-Des-14	31-Des-13
1	Poltekel Surabaya	Rp 920.602.090	Rp 251.213.238
2	ATKP Surabaya	Rp 1.071.084	Rp 475.400
3	PIP Semarang	Rp 1.432.084.142	Rp 943.063.554
4	BP3IP Jakarta	Rp 552.325.400	Rp 943.074.900
5	STIP Jakarta	Rp 347.905.777	Rp 259.095.430
6	PKTJ Tegal	Rp 271.349.900	Rp 312.261.900
7	PIP Makassar	Rp 526.566.206	Rp 222.631.576
TOTAL		Rp 4.051.904.599	Rp 2.931.815.998

Nilai persediaan Badan Layanan Umum yang disajikan dalam neraca merupakan nilai berdasarkan hasil Laporan Keuangan masing-masing Badan Layanan Umum yang sudah dilakukan *stock opname*.

Tabel 52

Daftar Persediaan BLU per 31 Desember 2014

URAIAN JENIS PERSEDIAAN	ATKP SURABAYA	BP3IP JAKARTA	PIP MAKASSAR	PIP SEMARANG	PKTJ TEGAL	POLTEKPEL SURABAYA	STIP JAKARTA	JUMLAH
Barang Konsumsi	1.071.084	468.664.100	382.847.746	175.334.895	55.803.000	920.580.090	199.304.825	2.203.605.740
Bahan Untuk Pemeliharaan	0	1.691.300	0	53.077.475	177.624.000	22.000	5.132.500	237.547.275
Suku Cadang	0	0	0	501.600	37.922.900	0	0	38.424.500
Bahan Baku	0	80.400.000	0	940.543.155	0	0	2.205.000	1.023.148.155
Persediaan Lainnya	0	1.570.000	143.718.460	262.627.017	0	0	141.263.452	549.178.929
Jumlah	1.071.084	552.325.400	526.566.206	1.432.084.142	271.349.900	920.602.090	347.905.777	4.051.904.599

Aset Tetap
Rp155,70 triliun

C.2 ASET TETAP

Nilai perolehan aset tetap per 31 Desember 2014 dan per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp155.704.623.514.500,- dan Rp143.507.204.560.291,- yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Rincian Aset Tetap Kementerian Perhubungan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut :

Tabel 53
Posisi Aset Tetap

No.	Uraian	31-Des-2014	31-Des-13	Kenaikan / (penurunan)
1	Tanah	Rp 60.812.300.827.487	Rp 58.654.409.753.031	Rp 2.157.891.074.456
2	Peralatan dan Mesin	Rp 28.870.264.095.122	Rp 23.928.043.102.585	Rp 4.942.220.992.537
3	Gedung dan Bangunan	Rp 13.372.781.277.560	Rp 10.800.149.772.312	Rp 2.572.631.505.248
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 76.311.977.813.975	Rp 63.756.567.146.201	Rp 12.555.410.667.774
5	Aset Tetap Lainnya	Rp 2.945.286.696.216	Rp 2.111.547.092.389	Rp 833.739.603.827
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp 22.501.491.969.800	Rp 28.044.569.428.529	Rp (5.543.077.458.729)
	Jumlah	Rp 204.814.102.680.160	Rp 187.295.286.295.047	Rp 17.518.816.385.113
	Akm. Penyusutan	Rp 49.109.479.165.660	Rp 43.788.081.734.756	Rp (5.321.397.430.904)
	Nilai Buku	Rp 155.704.623.514.500	Rp 143.507.204.560.291	Rp 12.197.418.954.209

Tabel 54
Rincian Aset Tetap Per Eselon I

Kode	Eselon I	31-Des-14	31-Des-13	Kenaikan / (penurunan)
01	Sekretariat Jenderal	Rp 801.011.068.325	Rp 650.002.396.963	Rp 151.008.671.362
02	Inspektorat Jenderal	Rp 11.018.705.363	Rp 8.060.592.085	Rp 2.958.113.278
03	Ditjen Perhubungan Darat	Rp 7.140.037.718.168	Rp 7.888.647.766.500	Rp (748.610.048.332)
04	Ditjen Perhubungan Laut	Rp 31.089.177.078.657	Rp 27.719.314.830.313	Rp 3.369.862.248.344
05	Ditjen Perhubungan Udara	Rp 38.886.103.391.546	Rp 34.378.012.826.664	Rp 4.508.090.564.882
08	Ditjen Perkeretaapian	Rp 69.393.320.930.091	Rp 64.926.246.145.242	Rp 4.467.074.784.849
11	Badan Litbang Perhubungan	Rp 40.216.519.321	Rp 32.432.639.574	Rp 7.783.879.747
12	Badan Pengembangan SDM Perhubungan	Rp 8.343.738.103.029	Rp 7.904.487.362.950	Rp 439.250.740.079
	Total	Rp 155.704.623.514.500	Rp 143.507.204.560.291	Rp 12.197.418.954.209

Posisi Aset Tetap tersebut sudah termasuk Aset Tetap yang ada pada 7 (tujuh) satker Badan Layanan Umum di Lingkungan Kementerian Perhubungan sebesar Rp3.796.995.893.622,- pada 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 sebesar Rp3.633.970.890.854,-.

Tabel 55
Posisi Aset Tetap Badan Layanan Umum

No.	Uraian	31-Des-14	31-Des-13	Kenaikan / (penurunan)
1	Tanah	1.243.957.952.520	1.265.874.384.051	Rp (21.916.431.531)
2	Peralatan dan Mesin	1.264.828.991.225	1.064.403.552.977	Rp 200.425.438.248
3	Gedung dan Bangunan	1.149.325.073.010	1.221.062.700.116	Rp (71.737.627.106)
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	86.471.531.291	52.724.893.361	Rp 33.746.637.930
5	Aset Tetap Lainnya	21.288.182.180	17.400.241.482	Rp 3.887.940.698
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	31.124.163.396	12.505.118.867	Rp 18.619.044.529
Jumlah		Rp 3.796.995.893.622	Rp 3.633.970.890.854	Rp 163.025.002.768

Posisi aset tetap pada neraca dibandingkan dengan posisi aset tetap pada SIMAK BMN dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 56
Daftar Perbandingan Aset Tetap antara
Neraca dan SIMAK BMN per 31 Desember 2014

No.	Uraian	Aset Tetap Dalam Neraca	Aset Tetap Dalam SIMAK BMN	Selisih
1	Tanah	Rp 60.812.300.827.487	Rp 60.812.300.827.487	Rp -
2	Peralatan dan Mesin	Rp 28.870.264.095.122	Rp 28.870.264.095.122	Rp -
3	Gedung dan Bangunan	Rp 13.372.781.277.560	Rp 13.372.781.277.560	Rp -
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 76.311.977.813.975	Rp 76.311.977.813.975	Rp -
5	Aset Tetap Lainnya	Rp 2.945.286.696.216	Rp 2.945.286.696.216	Rp -
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp 22.501.491.969.800	Rp 25.000.074.482.283	Rp (2.498.582.512.483)
Jumlah		Rp 204.814.102.680.160	Rp 207.312.685.192.643	Rp (2.498.582.512.483)
Akm. Penyusutan		Rp 49.109.479.165.660	Rp 49.109.479.165.660	Rp -
Nilai Buku		Rp 155.704.623.514.500	Rp 158.203.206.026.983	Rp (2.498.582.512.483)

Terdapat perbedaan nilai Aset Tetap dalam neraca dengan Aset Tetap dalam SIMAK BMN sebesar Rp2.498.582.512.483,- pada Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan karena belum dilakukan koreksi ke akun Persediaan dalam Proses Pengerjaan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat pada aplikasi persediaan SIMAK BMN. Terhadap selisih ini akan dilakukan koreksi pada Semester I tahun 2015.

Tanah
Rp60,81triliun

C.2.1 Tanah

Nilai perolehan Aset Tetap berupa tanah yang dimiliki Kementerian Perhubungan per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebesar Rp60.812.300.827.487,- dan Rp58.654.409.753.031,-.

Tabel 57
Rincian Mutasi Tanah

KODE	URAIAN	SALDO 1 JANUARI 2014	MUTASI		31 DESEMBER 2014
			TAMBAH	KURANG	
2.01.01	TANAH PERSIL	4.044.435.681.909	498.945.051.921	332.252.610.881	4.211.128.122.949
2.01.02	TANAH NON PERSIL	367.767.710.004	94.439.029.084	38.325.646.367	423.881.092.721
2.01.03	LAPANGAN	54.242.206.361.118	3.178.404.594.003	1.243.319.343.304	56.177.291.611.817
131111	TANAH	58.654.409.753.031	3.771.788.675.008	1.613.897.600.552	60.812.300.827.487

Tanah Non BLU
Rp59,57 triliun

C.2.1.1 Tanah Non BLU

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Tanah Non Blu yang dimiliki Kementerian Perhubungan per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebesar Rp59.568.342.874.967,- dan Rp57.388.535.368.980,-.

Tabel 58
Tanah Non BLU Per Eselon I

Kode	Eselon I	31-Des-14	31-Des-13	Kenaikan / (penurunan)
01	Sekretariat Jenderal	Rp 277.746.463.404	Rp 275.748.767.004	Rp 1.997.696.400
02	Inspektorat Jenderal		Rp -	Rp -
03	Ditjen Perhubungan Darat	Rp 448.461.963.669	Rp 449.596.863.669	Rp (1.134.900.000)
04	Ditjen Perhubungan Laut	Rp 1.443.728.370.543	Rp 1.303.982.036.927	Rp 139.746.333.616
05	Ditjen Perhubungan Udara	Rp 20.319.813.251.951	Rp 18.615.485.724.591	Rp 1.704.327.527.360
08	Ditjen Perkeretaapian	Rp 36.643.322.273.594	Rp 36.435.973.224.217	Rp 207.349.049.377
11	Badan Litbang Perhubungan	Rp -	Rp -	Rp -
12	Badan Pengembangan SDM Perhubungan	Rp 435.270.551.806	Rp 307.748.752.572	Rp 127.521.799.234
	Total	Rp 59.568.342.874.967	Rp 57.388.535.368.980	Rp 2.179.807.505.987

Tanah BLU
Rp1,24 triliun

C.2.1.2 Tanah Badan Layanan Umum

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Tanah BLU yang dimiliki Kementerian Perhubungan per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebesar Rp1.243.957.952.520,- dan Rp1.265.874.384.051,-.

Tabel 59
Tanah BLU Per Satker

No	Satker	31-Des-14	31-Des-13	Kenaikan / (penurunan)
1	Poltekpel Surabaya	Rp 38.811.338.000	Rp 38.811.338.000	Rp -
2	ATKP Surabaya	Rp 53.220.039.384	Rp 50.546.100.000	Rp 2.673.939.384
3	PIP Semarang	Rp 321.772.500.000	Rp 321.772.500.000	Rp -
4	BP3IP Jakarta	Rp 46.909.108.000	Rp 46.909.108.000	Rp -
5	STIP Jakarta	Rp 515.471.409.600	Rp 515.471.409.600	Rp -
6	PKTJ Tegal	Rp 60.855.506.171	Rp 52.831.299.571	Rp 8.024.206.600
7	PIP Makassar	Rp 206.918.051.365	Rp 239.532.628.880	Rp (32.614.577.515)
	Total	Rp 1.243.957.952.520	Rp 1.265.874.384.051	Rp (21.916.431.531)

Peralatan dan
Mesin
Rp28,87 triliun

C.2.2 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebesar Rp28.870.264.095.122,- dan Rp23.928.043.102.585. Nilai buku Peralatan dan Mesin pada tanggal pelaporan sebesar Rp15.828.355.339.279,- merupakan nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya.

Tabel 60
Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin per Kelompok

KODE	URAIAN	SALDO 1 JANUARI 2014	MUTASI		31 DESEMBER 2014
			TAMBAH	KURANG	
3.01.01	ALAT BESAR DARAT	255.632.007.293	134.634.624.338	39.316.782.550	350.949.849.081
3.01.02	ALAT BESAR APUNG	646.220.800	0	0	646.220.800
3.01.03	ALAT BANTU	313.809.914.650	146.993.278.060	19.432.868.499	441.370.324.211
3.02.01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	2.462.322.052.025	1.017.017.610.399	147.395.966.878	3.331.943.695.546
3.02.02	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	661.396.346.222	19.287.099.188	8.466.615.200	672.216.830.210
3.02.03	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	3.632.467.145.466	3.243.116.389.658	1.890.400.879.815	4.985.182.655.309
3.02.04	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	17.982.929.095	421.565.000	203.952.000	18.200.542.095
3.02.05	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	964.039.319.602	161.504.115.880	105.774.425.482	1.019.769.010.000
3.03.01	ALAT BENGKEL BERMESIN	626.678.839.050	328.572.491.569	688.836.804.936	266.414.525.683
3.03.02	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	49.931.392.885	13.067.526.451	15.214.568.293	47.784.351.043
3.03.03	ALAT UKUR	343.451.983.188	70.416.943.434	45.270.437.461	368.598.489.161
3.04.01	ALAT PENGOLAHAN	74.344.033.862	68.800.718.457	125.676.365.000	17.468.387.319
3.05.01	ALAT KANTOR	1.396.820.216.367	665.965.969.094	312.084.000.419	1.750.702.185.042
3.05.02	ALAT RUMAH TANGGA	572.505.644.516	258.271.502.835	63.608.169.648	767.168.977.703
3.06.01	ALAT STUDIO	217.769.680.011	77.115.463.886	26.582.451.395	268.302.692.502
3.06.02	ALAT KOMUNIKASI	1.181.084.994.989	645.373.534.949	600.832.239.457	1.225.626.290.481
3.06.03	PERALATAN PEMANCAR	376.139.468.345	131.932.855.458	30.147.331.992	477.924.991.811
3.06.04	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	1.546.584.588.533	1.148.086.847.137	752.392.131.313	1.942.279.304.357
3.07.01	ALAT KEDOKTERAN	388.343.507.943	57.273.538.032	80.057.566.273	365.559.479.702
3.07.02	ALAT KESEHATAN UMUM	16.556.065.495	4.174.173.381	1.790.750.330	18.939.488.576
3.08.01	UNIT ALAT LABORATORIUM	2.276.740.701.633	359.210.744.316	201.578.449.630	2.434.372.996.319
3.08.02	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	32.007.891.279	2.322.974.400	1.585.465.400	32.745.400.279
3.08.03	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	119.420.024.817	52.952.341.841	36.978.695.207	135.393.671.451
3.08.04	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	52.099.422.219	6.200.617.300	7.108.200.000	51.191.839.519
3.08.05	RADIATION APPLICATION & NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY	151.273.943.078	28.452.976.885	15.001.209.000	164.725.710.963
3.08.06	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	78.417.549.484	8.339.784.100	733.826.850	86.023.506.734
3.08.07	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	1.209.920.409.424	1.356.871.427.790	2.202.596.379.093	364.195.488.121
3.08.08	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	141.849.659.190	30.644.835.042	195.617.500	172.298.876.732
3.09.01	SENJATA API	124.391.854.000	368.019.800	99.463.012.104	25.296.861.696
3.09.02	PERSENJATAAN NON SENJATA API	124.318.184.110	46.837.171.165	18.888.919.674	152.266.435.601
3.09.03	SENJATA SINAR	166.902.501.999	291.783.341.864	42.169.289.733	416.516.554.130
3.09.04	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	140.202.975.810	44.687.970.495	14.010.879.500	170.880.066.805
3.10.01	KOMPUTER UNIT	278.257.623.976	95.814.764.459	40.732.373.402	333.340.015.033
3.10.02	PERALATAN KOMPUTER	408.435.897.061	111.473.051.725	39.885.753.944	480.023.194.842
3.11.01	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	9.764.617.754	90.760.000	331.000	9.855.046.754
3.11.02	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	52.474.255.905	20.392.822.686	20.003.698.186	52.863.380.405
3.12.01	ALAT PENGEBORAN MESIN	2.339.000	0	0	2.339.000
3.12.02	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	371.512.436	3.444.890.000	3.395.000.000	421.402.436
3.13.01	SUMUR	4.370.581.824	4.101.470.081	322.170.000	8.149.881.905
3.13.02	PRODUKSI	110.880.000	0	0	110.880.000
3.13.03	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	18.397.865.850	25.480.096.859	4.761.747.500	39.116.215.209
3.14.01	ALAT BANTU EKSPLORASI	304.895.000	0	0	304.895.000
3.14.02	ALAT BANTU PRODUKSI	969.210.000	0	0	969.210.000
3.15.01	ALAT DETEKSI	11.022.910.787	2.083.350.000	53.240.000	13.053.020.787
3.15.02	ALAT PELINDUNG	4.685.488.711	1.297.686.532	270.475.804	5.712.699.439
3.15.03	ALAT SAR	22.877.251.093	28.354.371.581	12.395.572.500	38.836.050.174
3.15.04	ALAT KERJA PENERBANGAN	1.126.825.228.921	650.456.454.561	229.640.980.884	1.547.640.702.598
3.16.01	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	686.912.088.924	1.143.881.525.159	278.455.971.300	1.552.337.642.783
3.17.01	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	48.771.560.303	7.294.959.328	5.232.052.980	50.834.466.651
3.18.01	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	1.129.930.256.807	740.948.789.359	185.001.024.414	1.685.878.021.752
3.18.02	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	386.026.941.268	111.838.429.333	54.211.752.230	443.653.618.371
3.18.03	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	4.989.313.200	29.034.064.200	4.504.485.200	29.518.892.200
3.19.01	PERALATAN OLAH RAGA	16.490.886.385	28.812.029.306	10.616.094.890	34.686.820.801
6.02.03	TANDA PENGHARGAAN BIDANG OLAH RAGA	30.000	97.442.100	97.442.100	30.000
132111	PERALATAN DAN MESIN	23.928.043.102.585	13.425.595.409.473	8.483.374.416.936	28.870.264.095.122
	AKUMULASI PENYUSUTAN S.D 31 DES 2014				13.041.908.755.843
	NILAI BUKU PER 31 DES 2014				15.828.355.339.279

Peralatan dan
Mesin Non BLU
Rp27,60 triliun

C.2.2.1 Peralatan dan Mesin Non Badan Layanan Umum

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Non BLU per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebesar Rp27.605.435.103.897,- dan Rp22.863.639.549.608,-. Nilai buku Peralatan dan Mesin Non Badan Layanan Umum pada tanggal pelaporan merupakan nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya sebesar Rp13.041.908.755.843,-.

Tabel 61
Peralatan dan Mesin Non BLU Per Eselon I

Kode	Eselon I	31 Desember 2014	31 Desember 2013	Kenaikan / (penurunan)
01	Sekretariat Jenderal	Rp 417.911.863.055	Rp 354.501.275.921	Rp 63.410.587.134
02	Inspektorat Jenderal	Rp 22.682.233.116	Rp 18.745.698.116	Rp 3.936.535.000
03	Ditjen Perhubungan Darat	Rp 3.606.487.538.656	Rp 2.206.948.548.410	Rp 1.399.538.990.246
04	Ditjen Perhubungan Laut	Rp 6.036.294.373.861	Rp 4.705.309.627.121	Rp 1.330.984.746.740
05	Ditjen Perhubungan Udara	Rp 8.962.438.769.511	Rp 7.549.375.524.458	Rp 1.413.063.245.053
08	Ditjen Perkeretaapian	Rp 4.467.416.183.464	Rp 4.906.191.227.127	Rp (438.775.043.663)
11	Badan Litbang Perhubungan	Rp 38.620.699.285	Rp 32.341.875.100	Rp 6.278.824.185
12	Badan Pengembangan SDM Perhubungan	Rp 4.053.583.442.949	Rp 3.090.225.773.355	Rp 963.357.669.594
	Total	Rp 27.605.435.103.897	Rp 22.863.639.549.608	Rp 4.741.795.554.289

Peralatan dan
Mesin BLU Rp1,26
triliun

C.2.2.2 Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin BLU per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebesar Rp1.264.828.991.225,- dan Rp1.064.403.552.977.

Tabel 62
Peralatan dan Mesin BLU per Satker

No	Satker	31-Des-14	31-Des-13	Kenaikan / (penurunan)
1	Poltekpel Surabaya	Rp 246.910.949.035	Rp 139.242.934.325	Rp 107.668.014.710
2	ATKP Surabaya	Rp 215.731.591.013	Rp 195.115.328.975	Rp 20.616.262.038
3	PIP Semarang	Rp 240.459.004.014	Rp 222.716.019.774	Rp 17.742.984.240
4	BP3IP Jakarta	Rp 80.130.587.425	Rp 76.548.487.525	Rp 3.582.099.900
5	STIP Jakarta	Rp 252.680.464.673	Rp 223.065.179.057	Rp 29.615.285.616
6	PKTJ Tegal	Rp 67.649.451.869	Rp 66.579.643.369	Rp 1.069.808.500
7	PIP Makassar	Rp 161.266.943.196	Rp 141.146.959.952	Rp 20.119.983.244
	Total	Rp 1.264.828.991.225	Rp 1.064.414.552.977	Rp 200.414.438.248

Gedung dan
Bangunan
Rp13,37 triliun

C.2.3 Gedung dan Bangunan

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebesar Rp13.372.781.277.560,- dan Rp10.800.149.772.312,-. Nilai buku Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan sebesar Rp11.811.539.273.483,- merupakan nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp1.561.242.004.077,-

Tabel 63
Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan

KODE	URAIAN	SALDO	MUTASI		31 DESEMBER 2014
		1 JANUARI 2014	TAMBAH	KURANG	
3.18.01	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	62.297.262.451	6.151.151.379	3.170.857.000	65.277.556.830
4.01.01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	7.868.447.123.733	4.211.321.295.372	2.504.516.495.562	9.575.251.923.543
4.01.02	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	988.536.175.867	424.821.221.726	91.510.455.348	1.321.846.942.245
4.02.01	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	548.123.112	1.161.585.173	0	1.709.708.285
4.03.01	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	1.191.322.518.719	347.304.708.176	100.822.991.171	1.437.804.235.724
4.04.01	TUGU/TANDA BATAS	688.998.568.430	369.843.904.868	87.951.562.365	970.890.910.933
133111	GEDUNG DAN BANGUNAN	10.800.149.772.312	5.360.603.866.694	2.787.972.361.446	13.372.781.277.560
	AKUMULASI PENYUSUTAN S.D 31 DES 2014				1.561.242.004.077
	NILAI BUKU PER 31 DES 2014				11.811.539.273.483

Gedung dan
Bangunan Non
Rp12,22 triliun

C.2.3.1 Gedung dan Bangunan Non BLU

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan Non BLU per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebesar Rp12.223.456.204.550,- Rp9.579.087.072.196,-

Tabel 64
Gedung dan Bangunan Non BLU Per Eselon I

Kode	Eselon I	31-Des-14	31-Des-13	Kenaikan / (penurunan)
01	Sekretariat Jenderal	Rp 427.378.369.991	Rp 407.192.627.532	Rp 20.185.742.459
02	Inspektorat Jenderal	Rp -	Rp -	Rp -
03	Ditjen Perhubungan Darat	Rp 771.199.837.524	Rp 639.999.208.059	Rp 131.200.629.465
04	Ditjen Perhubungan Laut	Rp 2.695.953.186.819	Rp 2.265.251.420.443	Rp 430.701.766.376
05	Ditjen Perhubungan Udara	Rp 4.186.124.046.810	Rp 2.955.815.040.447	Rp 1.230.309.006.363
08	Ditjen Perkeretaapian	Rp 1.726.229.215.502	Rp 1.484.131.186.881	Rp 242.098.028.621
11	Badan Litbang Perhubungan	Rp -	Rp -	Rp -
12	Badan Pengembangan SDM Perhubungan	Rp 2.416.571.547.904	Rp 1.826.697.588.834	Rp 589.873.959.070
	Total	Rp 12.223.456.204.550	Rp 9.579.087.072.196	Rp 2.644.369.132.354

Gedung dan
Bangunan BLU
Rp1,14 triliun

C.2.3.2 Gedung dan Bangunan BLU

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan BLU per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebesar Rp1.149.325.073.010,- Rp1.221.062.700.116,-

Tabel 65
Gedung dan Bangunan BLU Per Satker

No	Satker	31-Des-14	31-Des-13	Kenaikan / (penurunan)
1	Poltekpel Surabaya	Rp 309.999.010.953	Rp 421.175.854.120	Rp (111.176.843.167)
2	ATKP Surabaya	Rp 276.797.114.559	Rp 280.610.981.559	Rp (3.813.867.000)
3	PIP Semarang	Rp 80.486.383.975	Rp 85.142.314.852	Rp (4.655.930.877)
4	BP3IP Jakarta	Rp 68.718.876.968	Rp 63.380.743.968	Rp 5.338.133.000
5	STIP Jakarta	Rp 199.111.501.636	Rp 194.297.683.048	Rp 4.813.818.588
6	PKTJ Tegal	Rp 56.097.689.713	Rp 55.763.289.713	Rp 334.400.000
7	PIP Makassar	Rp 158.114.495.206	Rp 120.691.832.856	Rp 37.422.662.350
	Total	Rp 1.149.325.073.010	Rp 1.221.062.700.116	Rp (71.737.627.106)

Jalan Irigasi dan
Jaringan Rp76,31
triliun

C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebesar Rp76.311.977.813.975,- dan Rp63.756.567.146.201,-. Nilai buku Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan sebesar Rp41.817.353.167.567,- merupakan nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp34.494.624.646.408,-.

Tabel 66
Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan Per Kelompok

KODE	URAIAN	SALDO	MUTASI		31 DESEMBER 2014
		1 JANUARI 2014	TAMBAH	KURANG	
134111	JALAN DAN JEMBATAN	56.038.488.000.546	20.367.273.771.836	10.821.253.473.252	65.584.508.299.130
5.01.01	JALAN	43.998.609.766.834	12.937.021.574.960	6.378.951.839.733	50.556.679.502.061
5.01.02	JEMBATAN	12.039.878.233.712	7.430.252.196.876	4.442.301.633.519	15.027.828.797.069
134112	IRIGASI	3.786.338.097.160	1.423.601.613.487	214.530.886.809	4.995.408.823.838
5.02.01	BANGUNAN AIR IRIGASI	376.166.217.390	84.787.084.297	27.267.858.152	433.685.443.535
5.02.02	BANGUNAN PENGALIRAN PASANG SURUT	338.448.530.749	3.677.527.678	0	342.126.058.427
5.02.03	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	203.996.294.801	32.610.342.523	293.656.699	236.312.980.625
5.02.04	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	2.634.321.785.123	1.229.269.642.384	186.850.652.958	3.676.740.774.549
5.02.05	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	48.328.688.506	11.572.276.336	6.838.000	59.894.126.842
5.02.06	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	52.418.140.388	14.605.319.821	107.891.000	66.915.569.209
5.02.07	BANGUNAN AIR KOTOR	132.658.440.203	47.079.420.448	3.990.000	179.733.870.651
134113	JARINGAN	3.931.741.048.495	2.577.544.435.770	777.224.793.258	5.732.060.691.007
5.03.01	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	31.542.127.643	17.706.639.674	7.646.426.797	41.602.340.520
5.03.02	INSTALASI AIR KOTOR	958.380.000	726.808.414	0	1.685.188.414
5.03.03	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	651.750.400	203.007.435	0	854.757.835
5.03.05	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	53.829.299.175	15.909.682.222	133.842.000	69.605.139.397
5.03.06	INSTALASI GARDU LISTRIK	445.231.988.217	125.299.995.732	9.197.010.400	561.334.973.549
5.03.07	INSTALASI PERTAHANAN	17.587.418.205	0	7.950.000	17.579.468.205
5.03.09	INSTALASI PENGAMAN	8.973.663.813	2.127.476.000	588.538.000	10.512.601.813
5.03.10	INSTALASI LAIN	68.502.448.765	27.216.667.640	32.704.988.690	63.014.127.715
5.04.01	JARINGAN AIR MINUM	1.460.038.824.184	924.575.105.989	695.172.058.182	1.689.441.871.991
5.04.02	JARINGAN LISTRIK	650.741.078.670	811.503.735.791	28.647.343.189	1.433.597.471.272
5.04.03	JARINGAN TELEPON	1.183.506.225.907	652.275.316.873	3.126.636.000	1.832.654.906.780
5.04.04	JARINGAN GAS	10.177.843.516	0	0	10.177.843.516
	JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	63.756.567.146.201	24.368.419.821.093	11.813.009.153.319	76.311.977.813.975
	AKUMULASI PENYUSUTAN S.D 31 DESEMBER 2014				34.494.624.646.408
	NILAI BUKU PER 31 DES 2014				41.817.353.167.567

Jalan Irigasi dan Jaringan Non BLURp76,22 triliun

C.2.4.1 Jalan, Irigasi dan Jaringan Non BLU

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan Non BLU per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebesar Rp76.225.506.282.684,- dan Rp63.703.842.252.840,-.

Tabel 67
Jalan, Irigasi dan Jaringan Non BLU Per Eselon I

Kode	Eselon I	31-Des-14	31-Des-13	Kenaikan / (penurunan)
01	Sekretariat Jenderal	Rp 29.816.683.692	Rp 22.148.474.042	Rp 7.668.209.650
02	Inspektorat Jenderal	Rp 17.490.000	Rp 17.490.000	-
03	Ditjen Perhubungan Darat	Rp 2.592.884.412.246	Rp 1.330.818.603.294	Rp 1.262.065.808.952
04	Ditjen Perhubungan Laut	Rp 9.222.634.479.006	Rp 7.333.894.779.817	Rp 1.888.739.699.189
05	Ditjen Perhubungan Udara	Rp 15.960.903.506.328	Rp 13.445.972.634.828	Rp 2.514.930.871.500
08	Ditjen Perkeretaapian	Rp 48.242.724.832.723	Rp 41.422.683.245.450	Rp 6.820.041.587.273
11	Badan Litbang Perhubungan	Rp 519.230.700	Rp 519.230.700	-
12	Badan Pengembangan SDM Perhubungan	Rp 176.005.647.989	Rp 147.787.794.709	Rp 28.217.853.280
	Total	Rp 76.225.506.282.684	Rp 63.703.842.252.840	Rp 12.521.664.029.844

Jalan Irigasi dan Jaringan BLURp86,47 miliar

C.2.4.2 Jalan, Irigasi dan Jaringan BLU

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan BLU per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebesar Rp86.471.531.291,- dan Rp52.724.893.361,-.

Tabel 68
Jalan, Irigasi dan Jaringan BLU Per Satker

No	Satker	31-Des-14	31-Des-13	Kenaikan / (penurunan)
1	Poltekpel Surabaya	Rp 43.959.754.327	Rp 20.391.613.397	Rp 23.568.140.930
2	ATKP Surabaya	Rp 3.743.543.280	Rp 3.743.543.280	Rp -
3	PIP Semarang	Rp 192.158.025	Rp 192.158.025	Rp -
4	BP3IP Jakarta	Rp 416.994.607	Rp 416.994.607	Rp -
5	STIP Jakarta	Rp 9.217.957.720	Rp 9.217.957.720	Rp -
6	PKTJ Tegal	Rp 11.286.125.674	Rp 11.286.125.674	Rp -
7	PIP Makassar	Rp 17.654.997.658	Rp 7.476.500.658	Rp 10.178.497.000
	Total	Rp 86.471.531.291	Rp 52.724.893.361	Rp 33.746.637.930

Aset Tetap
Lainnya
Rp2,94 triliun

C.2.5 Aset Tetap Lainnya

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebesar Rp2.945.286.696.216,- dan Rp2.111.547.092.389,-. Nilai buku Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan sebesar Rp457.433.792.246,- merupakan nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya sebesar Rp11.703.759.332,-

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.

Tabel 69
Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya Per Kelompok

KODE	URAIAN	SALDO	MUTASI		31 DESEMBER 2014
		1 JANUARI 2014	TAMBAH	KURANG	
6.01.01	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	407.650.563.032	54.002.950.146	41.903.009.259	419.750.503.919
6.01.02	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	6.198.838.928	1.079.821.000	300.000	7.278.359.928
6.01.03	KARTOGRAFI NASKAH DAN LUKISAN	7.796.423.439	2.195.575.600	351.765.900	9.640.233.139
6.02.01	BARANG BERCORAK KESENIAN	16.098.252.326	3.669.215.408	408.301.850	19.359.165.884
6.02.02	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	11.186.620.483	1.869.775.045	0	13.056.395.528
6.03.01	HEWAN PIARAAN	600.000	0	600.000	0
6.05.01	TANAMAN	52.893.180	0	0	52.893.180
135121	ASET TETAP LAINNYA	448.984.191.388	62.817.337.199	42.663.977.009	469.137.551.578
	AKUMULASI PENYUSUTAN S.D 31 DES 2014				11.703.759.332
	NILAI BUKU PER 31 DES 2014				457.433.792.246

Aset Tetap
Lainnya Non BLU
Rp2,92 triliun

C.2.5.1 Aset Tetap Lainnya Non BLU

Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya Non BLU per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebesar Rp2.923.998.514.036,- dan Rp2.094.146.850.907,-.

Tabel 70
Aset Tetap Lainnya Non BLU Per Eselon I

Kode	Eselon I	31-Des-14	31-Des-13	Kenaikan / (penurunan)
01	Sekretariat Jenderal	Rp 8.530.298.942	Rp 6.140.314.963	Rp 2.389.983.979
02	Inspektorat Jenderal	Rp 3.815.998.385	Rp 3.815.998.385	Rp -
03	Ditjen Perhubungan Darat	Rp 430.384.065.156	Rp 310.561.486.593	Rp 119.822.578.563
04	Ditjen Perhubungan Laut	Rp 135.909.231.562	Rp 146.522.283.150	Rp (10.613.051.588)
05	Ditjen Perhubungan Udara	Rp 1.243.522.753.718	Rp 924.129.626.231	Rp 319.393.127.487
08	Ditjen Perkeretaapian	Rp 1.023.343.396.177	Rp 638.766.619.005	Rp 384.576.777.172
11	Badan Litbang Perhubungan	Rp 21.439.621.943	Rp 16.465.580.617	Rp 4.974.041.326
12	Badan Pengembangan SDM Perhubungan	Rp 57.053.148.153	Rp 47.744.941.963	Rp 9.308.206.190
	Total	Rp 2.923.998.514.036	Rp 2.094.146.850.907	Rp 829.851.663.129

Aset Tetap
Lainnya BLU
Rp21,28 miliar

C.2.5.2 Aset Tetap Lainnya BLU

Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya Non BLU per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebesar Rp21.288.182.180,- dan Rp17.400.241.482,-.

Tabel 71
Aset Tetap Lainnya BLU Per Satker

No	Satker	31-Des-14	31-Des-13	Konfirmasi / (penurunan)
1	Poltekpel Surabaya	Rp 5.109.988.857	Rp 2.858.856.277	Rp 2.251.132.580
2	ATKP Surabaya	Rp 826.851.531	Rp 724.451.531	Rp 102.400.000
3	PIP Semarang	Rp 2.228.267.924	Rp 1.670.153.356	Rp 558.114.568
4	BP3IP Jakarta	Rp 905.915.655	Rp 817.623.655	Rp 88.292.000
5	STIP Jakarta	Rp 3.524.410.117	Rp 2.803.905.567	Rp 720.504.550
6	PKTJ Tegal	Rp 1.612.311.920	Rp 1.612.311.920	-
7	PIP Makassar	Rp 7.080.436.176	Rp 6.912.939.176	Rp 167.497.000
	Total	Rp 21.288.182.180	Rp 17.400.241.482	Rp 3.887.940.698

Konstruksi Dalam
Pengerjaan
Rp22,50 triliun

C.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai perolehan Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebesar Rp22.501.491.969.800,- dan Rp28.044.569.428.529,-.

Tabel 72
Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

URAIAN	SALDO 1 JANUARI 2014	MUTASI TAMBAH	REKLAS KE ASET DEFINITIF	REKLAS KE PERSEDIAAN	31 DESEMBER 2014
KONSTRUKSI DALAM PENERJAAN	28.044.569.428.529	19.403.154.103.869	22.447.649.050.115	2.498.582.512.483	22.501.491.969.800
Tanah Dalam Pengerjaan	740.123.982.351	578.514.256.591	585.728.967.172		732.909.271.770
Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	3.455.819.941.241	3.478.703.221.961	5.014.842.843.471	37.576.611.200	1.882.103.708.531
Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	4.376.257.689.233	3.053.476.387.460	4.076.546.363.050	2.225.897.342.019	1.127.290.371.624
Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	18.905.843.261.622	12.232.606.040.017	12.597.313.275.721	154.759.985.000	18.386.376.040.918
Aset Tetap Lainnya Dalam Pengerjaan	566.524.554.082	59.854.197.840	173.217.600.701	80.348.574.264	372.812.576.957

Tabel 73
Rincian Konstruksi dalam Pengerjaan Per Eselon I

No	Uraian	Setjen	Itjen	Hubdat	Hubda	Hubud	Per-KA	Litbang	BPSOMP	Jumlah
1	Tanah Dalam Pengerjaan	0	0	0	62.207.367.000	455.031.027.225	215.670.877.545	0	0	732.909.271.770
2	Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	0	0	47.236.034.593	823.037.102.898	462.090.945.603	539.568.187.412	0	10.171.438.025	1.882.103.708.531
3	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	9.133.612.500	0	474.379.820.439	305.268.811.625	204.090.364.608	91.480.846.220	0	42.936.916.232	1.127.290.371.624
4	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	0	0	74.496.261.493	15.043.108.874.192	586.997.572.993	2.679.164.224.670	0	2.609.107.570	18.386.376.040.918
5	Aset Tetap Lainnya Dalam Pengerjaan	0	0	1.465.036.200	155.394.220.882	209.535.605.000	122.900.000	0	6.294.814.875	372.812.576.957
	Jumlah	9.133.612.500	0	597.577.152.725	16.389.016.376.597	1.917.745.515.429	3.526.007.035.847	0	62.012.276.702	22.501.491.969.800

Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Ditjen Perhubungan Laut antara lain berupa kegiatan pembangunan Fasilitas Pelabuhan di Satker Pelabuhan dan Pengerukan senilai Rp427.004.296.497,-, di KSOP Teluk Bayur senilai Rp218.304.385.614,-, dan Kanpel Branta senilai Rp525.302.596.974,-.

Konstruksi Dalam
Pengerjaan Non
BLU Rp22,47
triliun

C.2.6.1 Kontruksi Dalam Pengerjaan Non BLU

Nilai perolehan Konstruksi Dalam Pengerjaan Non BLU per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebesar Rp22.470.367.806.404,- dan Rp28.032.064.309.662,-.

Tabel 74
Kontruksi Dalam Pengerjaan Non BLU Per Eselon I

Kode	Eselon I	31-Des-14	31-Des-13	Kenaikan / (penurunan)
01	Sekretariat Jenderal	Rp 9.133.612.500	Rp -	Rp 9.133.612.500
02	Inspektorat Jenderal	Rp -	Rp -	Rp -
03	Ditjen Perhubungan Darat	Rp 597.577.152.725	Rp 3.794.383.258.907	Rp (3.196.806.106.182)
04	Ditjen Perhubungan Laut	Rp 16.389.016.376.597	Rp 16.190.936.675.894	Rp 198.079.700.703
05	Ditjen Perhubungan Udara	Rp 1.917.745.515.429	Rp 2.362.359.479.473	Rp (444.613.964.044)
08	Ditjen Perkeretaapian	Rp 3.526.007.035.847	Rp 4.727.836.367.020	Rp (1.201.829.331.173)
11	Badan Litbang Perhubungan	Rp -	Rp -	Rp -
12	Badan Pengembangan SDM Perhubungan	Rp 30.888.113.306	Rp 956.548.528.368	Rp (925.660.415.062)
	Total	Rp 22.470.367.806.404	Rp 28.032.064.309.662	Rp (5.561.696.503.258)

Konstruksi Dalam
Pengerjaan Non
BLU Rp31,12
miliar

C.2.6.2 Konstruksi Dalam Pengerjaan BLU

Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya Non BLU per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebesar Rp31.124.163.396,- dan Rp12.505.118.867,-.

Tabel 75
Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan BLU Per Satker

No	Satker	31-Des-14	31-Des-13	Kenaikan / (penurunan)
1	Poltekpel Surabaya	Rp -	Rp 392.420.200	Rp (392.420.200)
2	ATKP Surabaya	Rp 1.665.209.405	Rp 4.339.134.535	Rp (2.673.925.130)
3	PIP Semarang	Rp -	Rp -	Rp -
4	BP3IP Jakarta	Rp -	Rp -	Rp -
5	STIP Jakarta	Rp 329.935.000	Rp -	Rp 329.935.000
6	PKTJ Tegal	Rp 29.129.018.991	Rp 7.773.564.132	Rp 21.355.454.859
7	PIP Makassar	Rp -	Rp -	Rp -
	Total	Rp 31.124.163.396	Rp 12.505.118.867	Rp 18.619.044.529

Akumulasi
Penyusutan
Rp49,10 triliun

C.2.7. Akumulasi Penyusutan

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah masing-masing Rp49.109.479.165.660,- dan Rp43.788.081.734.756,-

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Tabel 76
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	Rp 28.870.264.095.122	Rp 13.041.908.755.843	Rp 15.828.355.339.279
2	Gedung dan Bangunan	Rp 13.372.781.277.560	Rp 1.561.242.004.077	Rp 11.811.539.273.483
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 76.311.977.813.975	Rp 34.494.624.646.408	Rp 41.817.353.167.567
4	Aset Tetap Lainnya	Rp 2.945.286.696.218	Rp 11.703.759.332	Rp 2.933.582.936.886
Akumulasi Penyusutan		Rp 121.500.309.882.875	Rp 49.109.479.165.660	Rp 72.390.830.717.215

C.3 PIUTANG JANGKA PANJANG

TP/TGR Rp328,36
juta,-

C.3.1 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp328.355.976,- dan Rp412.578.733,-. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara karena kelalaiannya.

Tabel 77

Rincian Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per Eselon I

Kode	Eselon I	31-Des-14	31-Des-13	Kenaikan / (penurunan)
04	Ditjen Perhubungan Laut	328.355.976	328.355.976	0
05	Ditjen Perhubungan Udara	-	84.222.757	(84.222.757)
Total		328.355.976	412.578.733	(84.222.757)

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih
TP/TGR
(Rp328,36) juta

C.3.2 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2014 dan per 31 Desember 2013 adalah sebesar (Rp328.355.976) dan (Rp16.085.073,-) yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TP/TGR.

Tabel 78

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih TP/TGR per Eselon I

Kode	Eselon I	31-Des-14	31-Des-13	Kenaikan / (penurunan)
04	Ditjen Perhubungan Laut	(328.355.976)	(15.663.959)	312.692.017
05	Ditjen Perhubungan Udara	0	(421.114)	(421.114)
	Total	(328.355.976)	(16.085.073)	312.270.903

Aset Lainnya
Rp4,13 triliun

C.4 ASET LAINNYA

Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp4.129.903.418.833,- dan Rp3.696.717.507.301,-. Nilai Aset Lainnya ini sudah termasuk Nilai Aset Lainnya pada satker Badan Layanan Umum di lingkungan Kementerian Perhubungan sebesar Rp102.403.858.238,- yang terdapat pada Badan Pengembangan SDM Perhubungan.

Tabel 79

Aset Lainnya Per Eselon I

Kode	Eselon I	31-Des-14	31-Des-13	Kenaikan / (penurunan)
01	Sekretariat Jenderal	Rp 203.985.453.348	Rp 181.988.007.892	Rp 21.997.445.456
02	Inspektorat Jenderal	Rp 3.312.638.100	Rp 3.312.638.100	-
03	Ditjen Perhubungan Darat	Rp 1.828.875.368.498	Rp 1.885.729.307.707	Rp (56.853.939.209)
04	Ditjen Perhubungan Laut	Rp 211.718.524.715	Rp 168.887.833.897	Rp 42.830.690.818
05	Ditjen Perhubungan Udara	Rp 244.549.052.800	Rp 185.448.763.409	Rp 59.100.289.391
08	Ditjen Perkeretaapian	Rp 918.527.714.513	Rp 731.431.722.856	Rp 187.095.991.657
11	Badan Litbang Perhubungan	Rp 443.787.986.029	Rp 309.169.269.468	Rp 134.618.716.561
12	Badan Pengembangan SDM Perhubungan	Rp 275.146.680.830	Rp 230.749.963.972	Rp 44.396.716.858
	Total	Rp 4.129.903.418.833	Rp 3.696.717.507.301	Rp 433.185.911.532

Tabel 80

Rincian Aset Lainnya

Aset Lainnya	31-Des-14	31-Des-13	Kenaikan / (penurunan)
Aset Tak Berwujud	Rp 2.681.353.514.194	Rp 2.206.683.977.132	Rp 474.669.537.062
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	Rp 15.907.507.700	Rp 16.045.930.645	Rp (138.422.945)
Aset Lain-lain	Rp 1.557.986.613.917	Rp 2.003.966.404.511	Rp (445.979.790.594)
Total	Rp 4.255.247.635.811	Rp 4.226.696.312.288	Rp 28.551.323.523
Akm. Penyusutan/amortisasi Aset Lainnya	Rp (125.344.216.978)	Rp (529.978.804.987)	Rp 404.634.588.009
Nilai buku	Rp 4.129.903.418.833	Rp 3.696.717.507.301	Rp 433.185.911.532

Tabel 81

Rincian Aset Lainnya Per Eselon I Menurut Jenisnya

URAIAN JENIS ASET	SETJEN	ITJEN	DITJEN HUBDAT	DITJEN HUBLA	DITJEN HUBUD	DITJEN KA	BPSDM	BALITBANG	JUMLAH
Aset Tak Berwujud	191.382.888.864	3.312.638.100	606.117.561.743	185.864.195.313	239.943.171.997	880.894.116.813	270.454.636.743	303.384.304.621	2.681.353.514.194
Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan	0	0	0	0	0	15.907.507.700	0	0	15.907.507.700
Aset Lain-lain	14.028.848.191	790.088.000	1.283.354.373.340	66.129.311.076	17.386.472.881	22.354.660.826	10.358.444.781	143.584.414.822	1.557.986.613.917
Total	205.411.737.055	4.102.726.100	1.889.471.935.083	251.993.506.389	257.329.644.878	919.156.285.339	280.813.081.524	446.968.719.443	4.255.247.635.811

Aset Tak
Berwujud Rp2,68
triliun

C.4.1. Aset Tak Berwujud

Nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebesar Rp 2.681.353.514.914,- dan Rp2.206.683.977.132,- yang terdiri dari Aset Tak Berwujud (Non BLU) sebesar Rp 2.585.368.604.956 dan Aset Tak Berwujud (BLU) senilai Rp95.984.909.238,-. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Tabel 82

Aset Tak Berwujud per Eselon I

Kode	Eselon I	31-Des-14	31-Des-13	Kenaikan / (penurunan)
01	Sekretariat Jenderal	Rp 191.382.888.864	Rp 169.929.650.804	Rp 21.453.238.060
02	Inspektorat Jenderal	Rp 3.312.638.100	Rp 3.312.638.100	Rp -
03	Ditjen Perhubungan Darat	Rp 606.117.561.743	Rp 463.587.784.429	Rp 142.529.777.314
04	Ditjen Perhubungan Laut	Rp 185.864.195.313	Rp 153.546.274.568	Rp 32.317.920.745
05	Ditjen Perhubungan Udara	Rp 239.943.171.997	Rp 182.857.494.199	Rp 57.085.677.798
08	Ditjen Perkeretaapian	Rp 880.894.116.813	Rp 693.826.845.456	Rp 187.067.271.357
11	Badan Litbang Perhubungan	Rp 303.384.304.621	Rp 309.164.839.493	Rp (5.780.534.872)
12	Badan Pengembangan SDM Perhubungan	Rp 270.454.636.743	Rp 230.458.450.083	Rp 39.996.186.660
	Total	Rp 2.681.353.514.194	Rp 2.206.683.977.132	Rp 474.669.537.062

Tabel 83

Rincian Aset Tak Berwujud Menurut Jenisnya

No	Uraian	Rupiah
1	Hak Cipta	181.447.000
2	Paten	23.167.000
3	Software	288.644.849.327
3	Lisensi	14.451.444.364
4	Hasil Kajian/Penelitian	839.506.225.548
5	Aset Tak Berwujud Lainnya	1.538.546.380.955
	Total	2.681.353.514.194

Tabel 84

Rincian Aset Tak Berwujud Per Eselon I Menurut Jenisnya

URAIAN JENIS ASET	SETJEN	ITJEN	DITJEN HUBDAT	DITJEN HUBLA	DITJEN HUBUD	DITJEN KA	BPSDM	BALITBANG	JUMLAH
Hak Cipta	0	0	0	0	0	0	181.447.000	0	181.447.000
Paten	0	0	23.167.000	0	0	0	0	0	23.167.000
Software	75.340.919.215	3.312.638.100	5.655.929.640	36.904.445.141	67.457.431.524	2.180.670.150	93.641.114.652	4.151.700.905	288.644.849.327
Lisensi	8.991.083.564	0	0	0	326.200.000	0	3.563.500.800	1.570.660.000	14.451.444.364
Hasil	104.755.213.585	0	101.410.667.600	6.051.656.000	31.962.465.690	223.782.399.595	73.881.879.362	297.661.943.716	839.506.225.548
Aset Tak Berwujud	2.295.672.500	0	499.027.797.503	142.908.094.172	140.197.074.783	654.931.047.068	99.186.694.929	0	1.538.546.380.955
Jumlah	191.382.888.864	3.312.638.100	606.117.561.743	185.864.195.313	239.943.171.997	880.894.116.813	270.454.636.743	303.384.304.621	2.681.353.514.194

Pada Ditjen Perkeretaapian terdapat Aset Tak Berwujud Lainnya sebesar Rp654.931.047.068,- antara lain berupa Studi Keilmuan, *Detail Engineering Desain* (DED), Review Desain, Manajemen Kontruksi, Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL), *Project Management Service*, Rancangan Peraturan, dan Bank Data.

Pencatatan dan klasifikasi Aset Tak Berwujud belum menerapkan amortisasi dan terdapat ketidakkonsistenan input data Aset Tak Berwujud dalam SIMAK-BMN. Hal tersebut disebabkan kebijakan Kementerian Perhubungan terkait dengan penatausahaan Aset Tak Berwujud belum ditetapkan karena menunggu kebijakan terkait yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

*Aset Tak
Berwujud dalam
Pengerjaan
Rp15,91 miliar*

C.4.2 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Nilai Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp15.907.507.700,- dan Rp16.045.930.645,-. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan merupakan kegiatan perolehan Aset Tak Berwujud yang belum memenuhi kriteria untuk diakui sebagai aset yaitu belum bisa digunakan untuk operasional.

Tabel 85

Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan per Eselon I

No	Eselon I	31-Des-14	31-Des-13	Kenaikan/Penurunan
1	Sekretariat Jenderal	Rp -	Rp -	Rp -
2	Inspektorat Jenderal	Rp -	Rp -	Rp -
3	Ditjen Perhubungan Darat	Rp -	Rp -	Rp -
4	Ditjen Perhubungan Laut	Rp -	Rp -	Rp -
5	Ditjen Perhubungan Udara	Rp -	Rp 216.687.945	Rp (216.687.945)
6	Ditjen Perkeretaapian	Rp 15.907.507.700	Rp 15.829.242.700	Rp 78.265.000
7	Badan Litbang Perhubungan	Rp -	Rp -	Rp -
8	BPSDM Perhubungan	Rp -	Rp -	Rp -
	Total	Rp 15.907.507.700	Rp 16.045.930.645	Rp (138.422.945)

*Aset Lain-Lain
Rp1,55 triliun*

C.4.3 Aset Lain-Lain

Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp1.557.986.613.917,- yang terdiri dari Aset Lain-lain (Non BLU) sebesar Rp1.551.567.664.917,- dan Aset Lain-lain BLU sebesar Rp6.418.949.000,-. Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp2.003.966.404.511,- yang terdiri dari Aset Lain-lain (Non BLU) sebesar Rp2.000.823.341.710,- dan Aset Lain-lain BLU sebesar Rp3.143.062.801,-.

Aset lain-lain merupakan barang milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Kementerian Perhubungan serta dalam proses penghapusan dari BMN serta persediaan yang akan diserahkan kepada masyarakat yang telah diajukan usulan hibahnya kepada Menteri Keuangan.

Aset Lain-Lain Non
Rp1,55 triliun

C.4.3.1 Aset Lain-Lain Non BLU

Nilai Aset Lain-lain Non BLU per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebesar Rp1.551.567.664.917,- dan Rp2.000.823.341.710,-. Aset lain-lain Non BLU merupakan hasil reklasifikasi aset tetap yang tidak digunakan/dihentikan penggunaannya, diharapkan dalam waktu dekat akan diajukan penghapusannya kepada pengelola barang serta persediaan yang akan diserahkan kepada masyarakat yang telah diajukan usulan hibahnya kepada Menteri Keuangan.

Tabel 86
Aset Lain-Lain Non BLU Per Eselon I

No	Eselon I	31-Des-14	31-Des-13	Kenaikan/Penurunan
1	Sekretariat Jenderal	Rp 14.028.848.191	Rp 12.538.868.131	Rp 1.489.980.060
2	Inspektorat Jenderal	Rp 790.088.000	Rp -	Rp 790.088.000
3	Ditjen Perhubungan Darat	Rp 1.283.354.373.340	Rp 1.904.808.357.264	Rp (621.453.983.924)
4	Ditjen Perhubungan Laut	Rp 66.129.311.076	Rp 48.573.870.482	Rp 17.555.440.594
5	Ditjen Perhubungan Udara	Rp 17.386.472.881	Rp 11.173.352.291	Rp 6.213.120.590
6	Ditjen Perkeretaapian	Rp 22.354.660.826	Rp 21.947.835.500	Rp 406.825.326
7	Badan Litbang Perhubungan	Rp 143.584.414.822	Rp 1.271.203.655	Rp 142.313.211.167
8	BPSDM Perhubungan	Rp 3.939.495.781	Rp 509.854.387	Rp 3.429.641.394
	Total	Rp 1.551.567.664.917	Rp 2.000.823.341.710	Rp (449.255.676.793)

Pada tahun 2013 ada mutasi tambah dari aset Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa tanah Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Satker Pembangunan Double-Double Track senilai Rp21.726.090.000,- tidak diketahui keberadaannya dan tidak didukung bukti kepemilikan serta masih dalam proses penyidikan KPK.

Aset Lain-Lain BLU
Rp6,41 miliar

C.4.3.2 Aset Lain-Lain BLU

Nilai Aset Lain-lain BLU per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebesar Rp6.418.949.000,- dan Rp3.143.062.801,-.

Tabel 87
Rincian Aset Lain-Lain BLU Per Satker

No	Satker	31-Des-14	31-Des-13	Kenaikan / (penurunan)
1	Poltekel Surabaya	Rp -	Rp -	Rp -
2	ATKP Surabaya	Rp 280.060.000	Rp -	Rp 280.060.000
3	PIP Semarang	Rp 5.017.350.000	Rp 293.793.000	Rp 4.723.557.000
4	BP3IP Jakarta	Rp -	Rp 681.459.400	Rp (681.459.400)
5	STIP Jakarta	Rp 547.439.000	Rp 1.109.082.000	Rp (561.643.000)
6	PKTJ Tegal	Rp 574.100.000	Rp 574.100.000	Rp -
7	PIP Makassar	Rp -	Rp 484.628.401	Rp (484.628.401)

Akumulasi
Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya
(Rp 125,34 miliar)

C.4.4 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebesar (Rp125.344.216.978,-) dan (Rp529.978.804.987,-). Terdapat perbedaan nilai akumulasi penyusutan/amortisasi aset lainnya antara neraca dengan

neraca SIMAK BMN sebesar Rp261.564.624.830,- merupakan koreksi nilai penyusutan atas aset yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah/Masyarakat yang telah direklas ke aset persediaan. Terhadap perbedaan ini akan dilakukan koreksi pada SIMAK BMN Semester I Tahun 2015.

Nilai penyusutan/amortisasi aset lainnya merupakan penyusutan atas aset tetap yang tidak digunakan/dihentikan penggunaannya karena berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Kementerian Perhubungan serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Sedangkan untuk Aset Tak Berwujud belum dilakukan amortisasi karena belum ada kebijakan atau peraturan dari Pemerintah Pusat dalam ini Kementerian Keuangan yang mengatur tentang amortisasi atas Aset Tak Berwujud.

KEWAJIBAN

C.5 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.5.1 Utang kepada Pihak Ketiga

*Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp27,24 miliar*

Nilai Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp27.238.042.421,- dan Rp427.063.813.222,- merupakan belanja yang masih harus dibayar dan utang kepada pihak ketiga lainnya.

Terdapat penurunan utang kepada pihak ketiga yang cukup signifikan berupa tunjangan kinerja untuk tahun 2013 yang dibayarkan pada tahun 2014. Sedangkan pembayaran tunjangan kinerja untuk tahun 2014 dibayarkan pada periode berjalan.

Tabel 88
Utang kepada Pihak Ketiga per Eselon I

Eselon I	Belanja Pegawai yang masih harus dibayar	Belanja Barang yang masih harus dibayar	Utang kepada pihak ketiga lainnya	Jumlah
Sekretariat Jenderal	Rp 3.000.000	Rp 1.091.690	Rp -	Rp 4.091.690
Inspektorat Jenderal	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Ditjen Perhubungan Darat	Rp 284.595.472	Rp 26.131.160	Rp 13.688.416.601	Rp 13.999.143.233
Ditjen Perhubungan Laut	Rp -		Rp 875.859.987	Rp 875.859.987
Ditjen Perhubungan Udara	Rp 237.881.370	Rp 1.192.187.248	Rp 6.765.343.665	Rp 8.195.412.283
Ditjen Perkeretaapian	Rp -	Rp -	Rp 27.281.337	Rp 27.281.337
Badan Litbang Perhubungan	Rp -		Rp 29.978.725	Rp 29.978.725
Badan PSDM Perhubungan			Rp 4.106.275.166	Rp 4.106.275.166
Total	Rp 525.476.842	Rp 1.219.410.098	Rp 25.493.155.481	Rp27.238.042.421

Utang kepada Pihak Ketiga antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 89
Rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Ditjen Perhubungan Darat

Kantor/Satker	Belanja Pegawai yang masih harus dibayar	Belanja Barang yang masih harus dibayar	Utang kepada pihak ketiga lainnya	Jumlah
Setditjen Perhubungan Darat	Rp 280.556.000	Rp -	Rp -	Rp 280.556.000
BPLJSKB	Rp 4.039.472	Rp -	Rp -	Rp 4.039.472
Pelabuhan Penyeberangan Kariangau	Rp -	Rp 26.131.160		Rp 26.131.160
Pengembangan Transportasi SDP	Rp -	Rp -	Rp 13.645.312.794	Rp 13.645.312.794
Bina Sistem Transportasi Perkotaan	Rp -		Rp 43.103.807	Rp 43.103.807
Total	Rp 284.595.472	Rp 26.131.160	Rp 13.688.416.601	Rp 13.999.143.233

Tabel 90
Rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Ditjen Perhubungan Udara

No	Kantor/Satker	Belanja Pegawai yang masih harus dibayar	Belanja Barang yang masih harus dibayar	Utang kepada pihak ketiga	Jumlah
1	Balai Kalibrasi Fasilitas Penerbangan	13.163.900			13.163.900
2	Bandar Udara Japura Rengat	13.450.074			13.450.074
3	Bandar Udara Nunukan	36.760.700			36.760.700
4	Bandar Udara Naha Tahuna	18.536.376			18.536.376
5	Bandar Udara Pongtiku	14.190.000			14.190.000
6	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V	42.580.000			42.580.000
7	Bandar Udara Wamena	4.012.880			4.012.880
8	Bandar Udara Numfor	57.315.440			57.315.440
9	Bandar Udara Dabo	9.045.204			9.045.204
10	Bandar Udara Hang Nadim	3.888.259			3.888.259
11	Bandar Udara Rahadi Oesman	24.938.537			24.938.537
12	Balai Teknik Penerbangan		29.856.439		29.856.439
13	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Jakarta		139.182.298		139.182.298
14	Bandar Udara Dewadaru		1.650.000		1.650.000
15	Bandar Udara Binaka		345.467		345.467
16	Bandar Udara Aek Godang		19.172.953		19.172.953
17	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI		28.500.000		28.500.000
18	Bandar Udara Depati Parbo		6.343.833		6.343.833
19	Bandar Udara Muara Bungo		640.036		640.036
20	Bandar Udara Silampari		13.609.497		13.609.497
21	Bandar Udara Tjilik Riwtut		174.049.475		174.049.475
22	Bandar Udara Iskandar		82.674.677		82.674.677
23	Bandar Udara Beringin		5.844.700		5.844.700
24	Bandar Udara Kuala Pembuang		946.179		946.179
25	Bandar Udara Kuala Kurun		4.715.893		4.715.893
26	Bandar Udara Tarakan		248.097.343		248.097.343
27	Bandar Udara Temindung		66.258.370		66.258.370
28	Bandar Udara Kalimantan		23.543.459		23.543.459
29	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII		13.582.919		13.582.919
30	Bandar Udara Melak		24.090.524		24.090.524
31	Bandar Udara Tanjung Harapan		17.164.000		17.164.000
32	Bandar Udara Yuwai Semarang		6.094.000		6.094.000
33	Bandar Udara Aroepala		18.000.000		18.000.000
34	Bandar Udara Mindiptana		1.384.000		1.384.000
35	Bandar Udara Kamur		326.924		326.924
36	Bandar Udara Sultan Babullah		385.000		385.000
37	Bandar Udara Kuabang Kao		7.060.000		7.060.000
38	Bandar Udara Gorontalo		7.334.139		7.334.139
39	Bandar Udara Fatmawati Soekarno		251.335.123		251.335.123
40	Direktorat Keamanan Penerbangan			6.754.550.000	6.754.550.000
41	Bandar Udara Sentani			10.793.665	10.793.665
	Jumlah	237.881.370	1.192.187.248	6.765.343.665	8.195.412.283

Tabel 91
Rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada BPSDM Perhubungan

Nama Satker	31 Desember 2014	31 Desember 2013
PIP Makassar	Rp 1.170.785.196	Rp 506.973.807
STPI	Rp 748.205.962	Rp 318.098.690
Sekretariat BPSDMP	Rp 15.643.019	Rp 7.194.102
STIP Jakarta	Rp 980.977.219	Rp 190.176.000
PPSDM Perhub. Darat	Rp 29.579.200	Rp -
PIP Semarang	Rp 564.147.563	Rp 140.890.456
BP2TL	Rp 47.127.370	Rp 62.251.610
STTD	Rp 171.161.126	Rp 165.273.735
ATKP Makassar	Rp 21.331.526	Rp 131.466.200
BP2IP Tangerang	Rp 101.364.985	Rp 87.021.663
Poltekpel Surabaya	Rp 92.064.000	Rp -
PKTJ Tegal	Rp 112.078.000	Rp -
ATKP Surabaya	Rp 571.500	Rp -
BP2IP Sorong	Rp 51.238.500	Rp -
Jumlah	Rp 4.106.275.166	Rp 1.609.346.263

*Pendapatan
Diterima Dimuka
Rp26,63 miliar*

C.5.2 Pendapatan Diterima Dimuka

Nilai Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp26.631.603.521,- dan Rp 22.241.989.715,- merupakan pendapatan yang sudah masuk ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga. Perkiraan ini merupakan penyeimbang akun Barang/Jasa Yang Harus Diserahkan.

Tabel 92
Rincian Pendapatan Diterima di Muka

No.	Eselon I	TA 2014	TA 2013
1	Sekretariat Jenderal	Rp 1.193.880.851	Rp 103.091.969
2	Ditjen Perhubungan Laut	Rp 87.850.000	Rp 112.950.000
3	Ditjen Perhubungan Udara	Rp 167.977.575	Rp 135.293.174
4	Ditjen Perkeretaapian	Rp 596.637.324	Rp 820.376.328
5	Badan PSDM Perhubungan	Rp 24.585.257.771	Rp 21.070.278.244
Jumlah		Rp 26.631.603.521	Rp 22.241.989.715

*Uang Muka dari
KPPN Rp628,18
juta*

C.5.3 Uang Muka dari KPPN

Nilai Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp628.188.760,- dan Rp1.167.058.545,- merupakan UP/TUP yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran sampai dengan tanggal pelaporan. Perkiraan ini merupakan penyeimbang akun Kas di Bendahara Pengeluaran.

*Pendapatan yang
Ditangguhkan
Rp14,49 miliar*

C.5.4 Pendapatan Yang Ditangguhkan

Nilai Pendapatan Yang Ditangguhkan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp 14.496.853.536,- dan Rp10.124.795.498,- merupakan PNPB yang belum disetorkan ke Kas Negara pada tanggal pelaporan. Perkiraan ini merupakan penyeimbang akun Kas Di Bendahara Penerimaan dan Akun Kas Lainnya dan Setara Kas.

Utang Jangka
Pendek Lainnya
Rp20,11 juta

C.5.5 Utang Jangka Pendek Lainnya

Nilai utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp20.113.382,- dan Rp0,-. Akun ini digunakan untuk mencatat belanja atas kegiatan yang telah selesai dilaksanakan, namun sampai dengan tanggal pelaporan kas tersebut masih terdapat di Bendahara Pengeluaran dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga. Misalnya, honor kegiatan yang telah selesai dilaksanakan dan telah diterima SPM/SP2Dnya oleh Bendahara Pengeluaran, namun belum diberikan kepada pegawai penerima honor.

Tabel 93
Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya

No.	Eselon I	TA 2014	TA 2013
1	Sekretariat Jenderal	Rp -	Rp -
2	Ditjen Perhubungan Laut	Rp -	Rp -
3	Ditjen Perhubungan Udara	Rp 2.927.700	Rp -
4	Ditjen Perkeretaapian	Rp -	Rp -
4	Badan Litbang Perhubungan	Rp -	Rp -
5	Badan PSDM Perhubungan	Rp 17.185.682	Rp -
Jumlah		Rp 20.113.382	Rp -

EKUITAS

Ekuitas Dana
Lancar
Rp4,55 triliun

C.6 EKUITAS DANA LANCAR

Ekuitas Dana Lancar merupakan penyeimbang beberapa akun yang ada di Aset Lancar dan di Kewajiban Jangka Pendek dengan rincian nilai Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 tersaji pada tabel berikut :

Tabel 94
Rincian Ekuitas Dana Lancar

No.	Aset Lancar	TA 2014	TA 2013
1	Cadangan Piutang	Rp 111.225.841.561	Rp 176.260.705.739
2	Cadangan Persediaan	Rp 4.183.983.101.903	Rp 266.937.363.154
3	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jk. Pendek	Rp (26.971.354.834)	Rp (4.645.060.172)
4	Dana Lancar BLU	Rp 307.960.743.934	Rp 218.175.501.077
5	Ekuitas Dana Lancar Lainnya	Rp 2.337.098.073	Rp 2.193.289.391
6	Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima	Rp 5.978.437.859	Rp 22.436.691.867
7	Barang/Jasa yang Masih harus Diserahkan	Rp (26.631.603.521)	Rp (22.241.989.715)
Jumlah		Rp 4.557.882.264.975	Rp 659.116.501.341

Cadangan Piutang
Rp111,22 miliar

C.6.1 Cadangan Piutang

Nilai Cadangan Piutang per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp111.225.841.561,- dan Rp176.260.705.739,-. Perkiraan ini merupakan penyeimbang Akun Piutang Bukan Pajak, Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi, dan Piutang dari Kegiatan Operasional BLU dan Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU.

Cadangan
Persediaan
Rp4,18 triliun

C.6.2 Cadangan Persediaan

Nilai Cadangan Persediaan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp4.183.983.101.903,- dan Rp266.937.363.154,- merupakan ekuitas dana lancar dalam bentuk persediaan. Perkiraan ini merupakan penyeimbang Akun Persediaan dan Persediaan Badan Layanan Umum.

Dana yang harus
Disediakan untuk
Pembayaran Utang
Jangka Pendek
(Rp26,97 miliar)

C.6.3 Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

Nilai Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah sebesar (Rp26.971.354.834,-) dan (Rp4.645.060.172,-) merupakan bagian dari ekuitas yang disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek. Perkiraan ini merupakan penyeimbang Akun Utang Kepada Pihak Ketiga dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Dana Lancar BLU
Rp307,96 miliar

C.6.4 Dana Lancar BLU

Nilai Dana Lancar BLU per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp307.960.743.934,- dan Rp218.175.501.077,- merupakan jumlah ekuitas dana lancar pada Badan Layanan Umum yang terdapat pada Badan Pengembangan SDM Perhubungan. Perkiraan ini merupakan penyeimbang Kas Pada BLU dan investasi jangka pendek BLU.

Ekuitas Dana
Lancar Lainnya
Rp2,34 miliar

C.6.5 Ekuitas Dana Lancar Lainnya

Nilai Ekuitas Dana Lancar Lainnya per 31 Desember 2014 dan per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp 2.337.098.073,- dan Rp 2.193.289.391,-. Nilai Ekuitas Dana Lancar Lainnya senilai Rp2.337.098.073,- berasal dari sisa saldo kas ANF. Posisi per 31 Desember 2014 saldo kas ANF sebesar \$187.869,6 (kurs tengah BI per 31 Desember 2014 Rp12.440,-.Akun ini merupakan penyeimbang dari Kas Lainnya dan Setara Kas yang berasal dari saldo hibah langsung.

Barang/Jasa Yang
Harus Diterima
Rp5,97 miliar

C.6.6 Barang/Jasa Yang Harus Diterima

Nilai Barang/Jasa Yang Harus Diterima per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp5.978.437.859,- dan Rp22.436.691.867,- merupakan ekuitas dana lancar berupa barang/jasa yang masih harus diterima dari pihak lain. Akun ini merupakan penyeimbang dari akun Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*) dan uang muka belanja (*prepayment*).

Barang/Jasa Yang
Harus Diserahkan
(Rp26,63 miliar)

C.6.7 Barang/Jasa Yang Harus Diserahkan

Nilai Barang/Jasa Yang Harus Diserahkan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah sebesar (Rp26.631.603.521,-) dan (Rp22.241.989.715,-) merupakan penyeimbang dari akun Pendapatan Diterima Dimuka berupa Barang/Jasa yang masih harus diserahkan kepada pihak lain.

Ekuitas Dana
Investasi
Rp159,83 miliar

C.7 EKUITAS DANA INVESTASI

Ekuitas Dana Investasi merupakan penyeimbang beberapa akun yang ada di Aset Tetap, Aset Lainnya dan Kewajiban Jangka Panjang dengan rincian nilai Ekuitas Dana Investasi per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 tersaji pada tabel di bawah.

Tabel 95
Rincian Ekuitas Dana Investasi

No.	Aset Lancar	31 Des 2014	31 Des 2013
1	Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	Rp 155.704.623.514.500	Rp 143.507.204.560.291
2	Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	Rp 4.129.903.418.833	Rp 3.697.114.000.961
	Jumlah	Rp 159.834.526.933.333	Rp 147.204.318.561.252

Diinvestasikan
Dalam Aset Tetap
Rp155,70 triliun

C.7.1 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

Nilai Diinvestasikan Dalam Aset Tetap per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp 155.704.623.514.500,- dan Rp143.507.204.560.291,- merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan dalam bentuk Aset Tetap.

Diinvestasikan
Dalam Aset Lainnya
Rp4,13 triliun

C.7.2 Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

Nilai Dana Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp 4.129.903.418.833,- dan Rp 3.697.114.000.961,- merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan dalam bentuk Aset Lainnya.

D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

D.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA (*SUBSEQUENT EVENT*)

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 83 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Serah Terima Operasional Hasil Pekerjaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor : SE 10 Tahun 2015 tentang Berita Acara Serah Terima Operasional (BASTO) yang mengharuskan penyelesaian BASTO paling lambat 30 April 2015 dimana dari total nilai KDP per 31 Desember 2014 sebesar Rp22.501.491.969.800,- diperkirakan terdapat KDP yang bisa direklasifikasi ke Aset Definitif pada Tahun 2015 sebesar Rp7.487.928.746.377,-, sehingga nilai KDP di Tahun 2015 sebesar Rp15.013.563.223.423,-.

Tabel 96
Rincian Nilai KDP 2014 yang Bisa Direklasifikasi
ke Aset Definitif di Tahun 2015 per Jenis KDP

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2014	REKLASIFIKASI MENJADI ASET DEFINITIF TAHUN 2015	PERKIRAAN SALDO KDP TAHUN 2015
1	Tanah Dalam Pengerjaan	732.909.271.770	4.034.335.550	728.874.936.220
2	Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	1.882.103.708.531	254.750.040.050	1.627.353.668.481
3	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1.127.290.371.624	80.545.846.932	1.046.744.524.692
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan Dalam Pengerjaan	18.386.376.040.918	7.112.076.991.470	11.274.299.049.448
5	Aset Tetap Lainnya Dalam Pengerjaan	372.812.576.957	36.521.532.375	336.291.044.582
TOTAL		22.501.491.969.800	7.487.928.746.377	15.013.563.223.423

Tabel 97
Rincian Nilai KDP 2014 yang Bisa Direklasifikasi
ke Aset Definitif di Tahun 2015 per Eselon I

NO	ESELON I	31 DESEMBER 2014	REKLASIFIKASI MENJADI ASET DEFINITIF TAHUN 2015	PERKIRAAN SALDO KDP TAHUN 2015
1	Sekretariat Jenderal	9.133.612.500	-	9.133.612.500
2	Inspektorat Jenderal	0	-	-
3	Ditjen Perhubungan Darat	597.577.152.725	-	597.577.152.725
4	Ditjen Perhubungan Laut	16.389.016.376.597	7.123.467.954.310	9.265.548.422.287
5	Ditjen Perhubungan Udara	1.917.745.515.429	338.962.413.460	1.578.783.101.969
6	Ditjen Perkeretaapian	3.526.007.035.847	-	3.526.007.035.847
7	Badan Litbang Perhubungan	0	-	-
8	Badan Pengembangan SDM Perhubungan	62.012.276.702	25.498.378.607	36.513.898.095
TOTAL		22.501.491.969.800	7.487.928.746.377	15.013.563.223.423

D.2 TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK

Daftar temuan dan rekomendasi Badan pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana dalam Laporan Keuangan Pendukung (Buku II).

D.3 REKENING PEMERINTAH

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Kementerian Perhubungan sebagaimana terlampir dalam Laporan Keuangan Pendukung (Buku II).

D.4 CATATAN PENTING LAINNYA

1. Pada Neraca 31 Desember 2014 (*Unaudited*) Ditjen Perhubungan Darat terdapat aset lain-lain sebesar Rp2.009.354.820.231,- yang terdiri dari aset rusak berat sebesar Rp46.228.426.595,- dan aset yang akan diserahkan kepada Pemda/Masyarakat sebesar Rp1.963.126.393.636,-.

Berdasarkan hasil inventarisasi terhadap aset yang diserahkan ke Pemda/Masyarakat sebesar Rp1.963.126.393.636,- dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Aset yang sudah diusulkan ke Kementerian Keuangan sebesar Rp1.163.763.752.668,-
- b. Aset yang akan dihapuskan sebesar Rp73.362.194.077,-
- c. Aset yang belum diusulkan ke Kementerian Keuangan sebesar Rp726.000.446.891,-

Terhadap aset yang belum diusulkan hibahnya ke Kementerian Keuangan sebesar Rp726.000.446.891,- dilakukan reklasifikasi dari aset lain-lain ke akun persediaan.

2. Terkait sewa perairan yang sampai dengan saat ini belum pernah dilakukan pemungutan/penagihan PNPB atas penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya diatas air yang diusahakan (komersial) dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a) Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran ditetapkan pungutan jasa sewa perairan dilakukan oleh PT. Pelindo.

- b) Setelah berlakunya UU No. 17 Tahun 2008 tentang pelayaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif yang berlaku pada Kementerian Perhubungan diberlakukan. PT. Pelindo tidak lagi melakukan pemungutan atas jasa sewa perairan, namun Kementerian Perhubungan juga tidak melakukan pungutan atas sewa perairan ini karena UU No. 17 Tahun 2008 dan PP 6 Tahun 2009 menyatakan pungutan sewa perairan diberlakukan pada pelabuhan yang diusahakan secara tidak komersial. Dengan demikian Kementerian Perhubungan tidak memiliki dasar legalitas untuk melakukan pemungutan.
 - c) Dengan telah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 pada tanggal 24 Februari 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan maka jasa sewa perairan akan dipungut pada tahun 2015.
3. Pencatatan dan pengklasifikasian Aset Tak Berwujud serta umur manfaatnya masih berdasarkan estimasi masing-masing Kantor/Satker karena kebijakan atau peraturan dari Kementerian Perhubungan tentang Penatausahaan Aset Tak Berwujud masih konsep/*draft* dan belum ditetapkan karena masih menunggu kebijakan tentang Aset Tak Berwujud dari Pemerintah Pusat.
4. Pada Kementerian Perhubungan terdapat Satker-satker yang dilikuidasi (Inaktif). Terhadap satker-satker yang telah dilikuidasi ini, proses likuidasi seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan nomor 198/PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Pada Kementerian Negara/Lembaga namun proses likuidasi memang belum dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan karena kekurangpahaman terhadap proses likuidasi.

Ditjen Perhubungan Darat

- 1) Menindaklanjuti surat Sekretariat Jenderal kementerian Perhubungan Nomor PL. 201/10817 Phb 2014 tanggal 25 November 2014 perihal perubahan pencatatan BMN terhadap satker inaktif di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat antara lain Satker Rehab Dermaga Penyeberangan dan Satker Pengembangan LLASDP Waikelo.

- 2) Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah menindaklanjuti dengan membuat Berita Acara Inventarisasi serta melakukan transfer BMN terhadap satker tersebut.
- 3) Berdasarkan Berita Acara Inventarisasi Aset Satker Inaktif pada Satker Rehab Dermaga Penyeberangan Nomor. PL. 301/7/18/ Satker – s/2014 tanggal 18 Desember 2014 yang diketahui oleh Sesditjen Perhubungan Darat dan Direktur LLASDP Ditjen Perhubungan Darat.
- 4) Berdasarkan Berita Acara Inventarisasi Aset Satker Inaktif pada Satker Pengembangan LLASDP Waikelo Nomor. PL. 301/7/19/ Satker – s/2014 tanggal 18 Desember 2014 yang diketahui oleh Sesditjen Perhubungan Darat dan Direktur LLASDP Ditjen Perhubungan Darat.
- 5) Selanjutnya pada satker inaktif tersebut, untuk Satker Rehab Dermaga Penyeberangan di pindahbukukan (transfer) ke Satker Direktorat LLASDP Ditjen Perhubungan Darat dan untuk satker Pengembangan LLASDP Waikelo NTT di pindah bukukan (transfer) ke Satker Pengembangan LLASDP NTT.
- 6) Adapun kegiatan transfer (pindah buku) telah dilakukan oleh petugas SIMAK –BMN Satker tersebut di atas dan Petugas SIMAK – BMN Eselon I pada Semester II Tahun Anggaran 2014.

Ditjen Perhubungan Udara

Berdasarkan evaluasi dan pembahasan bersama, Satker Inaktif Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang akan dilikuidasi adalah sebagai berikut :

Tabel 98
Rincian Satker Yang Akan Dilikuidasi Pada Ditjen Perhubungan Udara

NO.	UPT/SATKER	TOTAL ASET	KETERANGAN
1	Satker A. Yani Semarang	193,648,939,255	inaktif 2012. Akan diserahkan kepada BUMN
2	Satker Bandar Udara Gading	12,129,920,401	inaktif sejak 2007, tercantum di DIPA Satker Bandara Adi Sucipto Tahun 2008, 2009, 2010 dan 2011. Belum ditentukan unit kerja yang akan menerima
3	Satker Bandar Udara Adi Sucipto	18,448,476,439	inaktif sejak 2012, mencatat aset Bandara Gading Tahun 2008, 2009, 2010, 2011. Akan diserahkan kepada BUMN
4	Satker Bandar Udara Bawean	69,872,007,601	inaktif 2012, tercantum di DIPA Satker Bandara Abdulrachman Saleh Tahun 2013, Satker OBU Wilayah III Tahun 2014
5	Satker Bandar Udara Juanda	18,858,424,964	inaktif sejak 2012. Akan diserahkan kepada BUMN
6	Satker Bandar Udara Pasir Pangaraian	44,809,455,734	inaktif sejak 2012, tercatat di DIPA Satker Japura Rengat Tahun 2012 dan 2013, aktif kembali 2014
7	Satker Bandar Udara Muara Bungo	165,392,163,521	inaktif 2012, tercantum di DIPA Satker Bandara Bengkulu Tahun 2012 dan 2013. aktif kembali 2014
8	Satker Bandar Udara Pagaram	10,508,490,100	inaktif 2011, tercantum di DIPA Satker Bandara Bengkulu Tahun 2012 dan 2013. Tahun 2014 tidak ada anggaran.
9	Satker Bandara Hasanuddin	10,000,000	inaktif sejak 2011, Sudah di BASTO ke AP I, namun ada aset yang tertinggal. Asetnya akan diserahkan ke Kantor Otoritas Bandara Wilayah V Makassar
10	Satker Bandara Bua	3,343,628,200	inaktif sejak 2007, tercantum di DIPA Satker Andi Jemma Masamba Tahun 2008 s/d 2014.
11	Satker Bandara Silangit	128,391,977,505	inaktif sejak 2014, beralih pengelolaan ke BUMN

Satker inaktif diatas terdiri dari 10 satker sementara dan 1 satker operasional. Mendasari Surat Setjen Kemenhub Nomor : KU.303/4/15Phb.2014 perihal penunjukan penanggung jawab likuidasi Satker Inaktif, Ditjen Perhubungan Udara yang ditunjuk adalah Satker Kantor Pusat Ditjen Perhubungan Udara sebagai pelaksana likuidasi dengan asumsi satker tersebut masih aktif dan rencananya akan dilikuidasi.

Permasalahan Satker Inaktif Ditjen Perhubungan Udara yaitu satker-satker dimaksud telah berstatus inaktif pada beberapa tahun sebelumnya, sehingga aturan tersebut tidak dapat dijalankan sepenuhnya mengingat KPA/KPB satker tersebut telah berakhir sehingga BASTO sebagai salah satu persyaratan dalam rangka likuidasi tidak dapat dilaksanakan.

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk Tahun Anggaran 2013 mengelola 348 satker, sementara untuk Tahun Anggaran 2014 mengelola 328 satker, namun sudah sebagian terlikuidasi ke UPT yang menerima hasil kegiatan satker sementara.

Ditjen Perkeretaapian

Satker sementara yang inaktif adalah Satker Peningkatan Jalan Kereta Api Lintas Utara Jawa dan Satker Pembangunan Jalur Ganda Tegal-Pekalongan-Semarang.

5. Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terdapat sisa kerugian Negara sebesar Rp24.663.623.940 yang belum diselesaikan karena :
 - 1) Untuk kegiatan pekerjaan pembangunan fasilitas kenavigasian di P. Soibus dan P. Mamburit, pihak satker/PPK meminta bantuan revidi penghitungan prestasi pekerjaan kepada BPKP dan Tim ITS Surabaya. Hasil revidi dilaporkan pada bulan Juli 2014. Dasar revidi dilakukan karena pihak kontraktor keberatan dengan prestasi pekerjaan yang dinilai tidak sesuai dengan nilai kerugian Negara tersebut.
 - 2) Berdasarkan pelaporan dari Disnav Surabaya, untuk pekerjaan pengadaan pelampung suar polytheline posisi hingga saat ini barang tersebut telah ada di Disnav Surabaya. Hal tersebut telah dibuktikan dengan :
 - a. Bukti pengiriman barang pengadaan pelampung suar polytheline;
 - b. Berita acara pemeriksaan barang pengadaan pelampung suar polytheline;
 - c. Berita acara serah terima barang pengadaan pelampung suar polytheline;

- d. Surat pernyataan Kepala Distrik Navigasi Kelas I Surabaya bahwa kekurangan pengadaan pelampung suar polytheline beserta kelengkapannya sebanyak 17 (tujuhbelas) unit telah sampai di Kantor Disnav Surabaya;
 - e. Bukti setor ke Kas Negara denda keterlambatan pengiriman barang pengadaan pelampung suar polytheline sebesar 5% dikurangi pajak;
 - f. Foto-foto pengiriman barang pengadaan pelampung suar polytheline yang tiba di Kantor Disnav Surabaya.
- 3) Nilai Bagian Lancar TP/TGR berkurang nilainya sebesar Rp13.057.623.940. Mutasi pengurangan tersebut berdasarkan bukti bahwa pengadaan Polytheine telah dilaksanakan serta telah dilakukan verifikasi oleh Tim Inspektorat Jenderal sesuai Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor PS. 316/1/19/ITJEN-2014 tanggal 19 Juni 2014 perihal Hasil verifikasi terhadap kekurangan pengadaan pelampung suar polytheline.
- 4) Sisa Bagian Lancar TP/TGR sebesar Rp11.606.000.000 telah digolongkan sebagai Piutang Macet, hal tersebut dikarenakan periode piutang yang sudah lebih dari satu tahun anggaran sehingga dilakukan penyisihan atas Bagian Lancar TP/TGR sebesar 100%.
6. Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara terdapat aset yang diserahterima operasionalkan kepada Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Perum LPPNPI).Guna menunjang operasional Perum LPPNPI, Ditjen Perhubungan Udara telah menyerahkan pengoperasian Peralatan Navigasi Penerbangan diseluruh UPT/Satker yang tidak mengubah status kepemilikan aset dan penyerahan aset hasil penarikan kembali BPYBDS dari PT. AP I dan PT. AP II yang mengubah status kepemilikan aset, Peralatan Navigasi yang telah diserahterimakan sebagai berikut :
- 1) Berita Acara Serah Terima Bangunan dan Peralatan Navigasi Penerbangan Nomor : BA. 22 Tahun 2014 tanggal 20 Januari 2014 sebesar Rp1.845.489.895.945,- (pengadaan s/d Tahun 2012).

- 2) Berita Acara Serah Terima BMN hasil penarikan BPYBDS Nomor : BA 21 Tahun 2014 tanggal 20 Januari 2014 sebesar Rp218.376.457.642,36 dan €46.191.790,74,-
- 3) Berita Acara Serah Terima Peralatan Navigasi Penerbangan pengadaan tahun 2013 sebesar Rp861.475.876.155,-

Pengalihan pencatatan bangunan dan peralatan navigasi penerbangan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara kepada Perum LPPNPI dilakukan setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Penyertaan Modal Negara (PP PMN).

7. Hibah

Hibah pada Kementerian Perhubungan terdapat pada Ditjen Perhubungan Laut dan BPSDM dengan rincian sebagai berikut :

a. Ditjen Perhubungan Laut

Tabel 99
Rincian Hibah pada Ditjen Perhubungan Laut

NO	NAMA SATKER	DONOR	KEGIATAN	KETERANGAN
1	Satker Pengembangan Kenavigasian Pusat	Multi Negara (<i>Aids to Navigation Fund</i>)	Bantuan pemeliharaan dan penggantian peralatan kenavigasian Indonesia di Selat Malaka (<i>Maintenance & Replacement of Aids to Navigation in the Strait of Malacca</i>)	Register 70878801. Kegiatan direncanakan selama 10 tahun dari tahun 2009 s/d 2018 dengan dana sebesar USD 32.038.213,00
2.	Satker Pengembangan Kenavigasian Pusat	Jepang	<i>Vessel Traffic System (VTS) Selat Malaka Phase 2</i>	Nomor register 70991901. Proses pelaksanaan pekerjaan direncanakan selesai bulan Juli 2015 dan semua proses lelang serta pembayaran dilakukan langsung oleh negara pendonor.
3.	Satker Pengembangan Kenavigasian Pusat	Multi Negara (<i>World Bank</i>)	<i>Marine Electronic Highway (MEH)</i>	Register 70659501

- 1) Dalam rangka kerjasama 3 (tiga) negara pantai (Indonesia, Malaysia, dan Singapura) maka dengan dukungan *International Maritime Organization* (IMO) dalam wadah *Tripartite Technical Expert Group*

(TTEG). Telah dibentuk forum kerjasama *Cooperative Mechanism* yang didasarkan pada kesepakatan *Ministerial Meeting* di Batam tahun 2005 untuk mengaplikasikan *article 43 UNCLOS 1982 article 43 UNCLOS 1982* yang mendorong peran serta *User States* dan *Stakeholders* dalam peningkatan keselamatan dan perlindungan lingkungan di Selat Malaka dan Selat Singapura. *Cooperative Mechanism* direncanakan selama 10 tahun dan dana hibah untuk Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun (tahun 2009 s.d. 2018) direncanakan sebesar US\$32.038.213,-.

2) Ditjen Perhubungan Laut mendapat giliran mengelola anggaran dana *Revolving Fund Comitte (RFC)*. Serah Terima Pengelolaan Dana *Revolving Fund Committee (RFC)* Dari Pemerintah Singapura Kepada Pemerintah Indonesia, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Berdasarkan *Memorandum of Understanding (MoU)* antara Pemerintah Indonesia, Malaysia dan Singapura di satu pihak dengan *The Malacca Straits Council (MSC)* atas nama Asosiasi-asosiasi non pemerintah Jepang di pihak lain yang ditandatangani pada tanggal 11 Februari 1981, telah dibentuk "*Revolving Fund*" (dana yang dikelola secara bergiliran selama 5 tahun sekali) untuk menanggulangi pencemaran minyak dari kapal di Selat Malaka dan Selat Singapura. Jumlah dana yang disumbangkan oleh Asosiasi-asosiasi non-pemerintah Jepang pada saat itu adalah *¥ 400.000.000,-* (Empat Ratus Juta Yen).
- b) Dapat disampaikan pula bahwa pengelolaan Dana RFC oleh Singapura telah selesai pada tanggal 31 Maret 2011. Selanjutnya untuk periode 1 April 2011 sampai dengan 31 Maret 2016, Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan mendapat giliran untuk mengelola dana RFC tersebut.
- c) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah membuka rekening untuk menampung Dana *RFC* pada tanggal 8 Nopember 2011, dengan nomor rekening 6786788106 di Bank BNI, Kantor Layanan Abdul Muis/ Kantor Cabang Utama Harmoni. Pembukaan rekening RFC tersebut telah mendapat persetujuan Menteri

Keuangan dengan surat persetujuan nomor S-9983/MK.5/2011 tanggal 26 Oktober 2011. Posisi saldo rekening tersebut per 31 Desember 2013 sampai dengan 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut :

Tabel 100
Rincian Saldo Dana RFC

PERIODE	CASH ON HAND	REKENING KORAN
31-Des-13	Rp15.782.250,00	Rp42.630.238.828,00
31-Des-14	Rp306.606.862,00	Rp42.048.702.188,00

- d) Pada tanggal 16 Desember 2011, Pemerintah Singapura telah mengirimkan dana *RFC* ke rekening Ditjen Hubla di Bank BNI sebesar SGD 6.075.344,47 atau setara dengan Rp42.345.150.956 (Empat Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Seratus Lima Puluh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah).
- e) Dengan telah diterimanya dana *RFC* oleh Pemerintah Indonesia dengan demikian perlu segera dilakukan acara serah terima (*handing over*) pengelolaan dana *RFC* dari Pemerintah Singapura ke Pemerintah Indonesia.
- f) Serah terima pengelolaan *RFC Fund* dari Pemerintah Singapura kepada Pemerintah Indonesia untuk periode tahun 2011 s.d. 2016 telah dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2013 di Singapura. Sebagai informasi, kegiatan yang telah secara rutin dilaksanakan dalam kerangka *Revolving Fund Committee* (RFC) dan rencananya akan diselenggarakan oleh Indonesia selaku pengelola Dana *Revolving Fund Committee* (RFC) berupa Pertemuan rutin tahunan, yaitu: *The Revolving Fund Committee Meeting (Annual Meeting)* dan *Revolving Fund Committee Technical Meeting*.

b. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan

Tabel 101
Rincian Hibah pada BPSDM Perhubungan

NO	NAMA SATKER/UPT	NAMA ASET HIBAH LANGSUNG	NILAI (Rp)	ASAL HIBAH	BAST		KET
					SUDAH	BELUM	
1	STPI Curug	Gedung Kendaraan	4.966.975.000 1.099.500.000	PT. Garuda Indonesia PT. Garuda Indonesia	v v		sudah selesai
2	BPPTD Tegal	Tanah (133.500 m2)	2.670.000.000	Pemerintah Kota Tegal	v		sudah selesai
3	PUSAT PENGEMBANGAN SDM PHB DARAT	Tanah Madiun (181.385 m2) Tanah Madiun (1.695 m2) Tanah Pontianak (175.000 m2)	9.069.250.000 847.500.000 1.499.250.000	Pemerintah Kota Madiun Drs. Maidi, SH, MM, M.Pd Pemerintah Kabupaten Pontianak	v v v		sudah selesai
4	PUSAT PENGEMBANGAN SDM PHB LAUT	Tanah Aceh (272.139 m2)	26.995.305.915	Pemerintah Daerah Aceh	v		sudah selesai
5	PUSAT PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN UDARA	Kendaraan	493.000.000	Angkasa Pura II	v		sudah selesai
6	ATKP SURABAYA	Kendaraan Tahap I Kendaraan Tahap II	1.044.280.000 550.000.000	PELITA AIR SERVICE PELITA AIR SERVICE	v v		sudah selesai
7	BP2IP SORONG	Tanah Sorong +/- 20 Ha	16,345,224,000	Pemerintah Kota Sorong	v		sudah diterbitkan SP3HL dari KPPN

Tindak lanjut temuan ketidakpatuhan Pengelolaan Aset yang Diperoleh Melalui Hibah Langsung berupa Aset Tanah yaitu berupa bangunan pada Satker Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut didirikan di atas tanah yang diperoleh dari Hibah Pemda setempat namun belum didukung Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang sebagai Dokumen Sumber Awal Hibah adalah :

PADANG PARIAMAN :

- Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan telah mengirimkan Nota Dinas kepada Pusbang Laut No. ND. 275/BPSDMP-2014 tanggal 1 Juli 2014 untuk segera melaksanakan serah terima aset hibah sesuai ketentuan yang berlaku.
- Saat ini Pusbang Laut masih berkoordinasi dengan Pemda setempat untuk penerbitan BAST, sementara ini dasar pembangunan gedung

adalah Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor : 88/KEP/BPP/2013 tanggal 17 April 2013 tentang Penetapan Lokasi Tanah untuk pembangunan BP2IP di Nagari Tapakis Kecamatan Ulukan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman.

- Kepala Pusbang SDM Perhubungan Laut telah menyurati Bupati Padang Pariaman untuk penerbitan BAST Hibah dari Pemda Padang Pariaman kepada Badan Pengembangan SDM Perhubungan dengan Nomor Surat : PL.102/B.410/VII/PPSDML-2014 tanggal 3 Juli 2014 perihal Tindak Lanjut BAST Hibah Tanah pada BP2IP Sumatera Barat. Namun posisi saat ini Pemda Padang Pariaman masih memproses penerbitan sertifikat tanah.

MINAHASA SELATAN :

- Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan telah mengirimkan Nota Dinas kepada Pusbang Laut Nomor: ND. 275/BPSDMP-2014 tanggal 1 Juli 2014 untuk segera melaksanakan serah terima aset hibah sesuai ketentuan yang berlaku.
- Surat Pernyataan Bupati Minahasa Selatan Nomor : 293/BMS/VIII-2012 tanggal 10 Agustus 2012 yang menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan menyerahkan lahan seluas 217.435 m² untuk digunakan Kementerian Perhubungan sambil menunggu penyelesaian sertifikat dapat digunakan untuk pelaksanaan pembangunan BP2IP dan segala akibat yang terjadi di lokasi menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan.
- Surat Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 128 Tahun 2012 tanggal 1 Agustus 2012 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan BP2IP di Desa Tawaang Timur Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara.
- Kepala Pusbang SDM Perhubungan Laut telah menyurati Bupati Minahasa Selatan untuk penerbitan BAST Hibah dari Pemda Minahasa Selatan kepada Badan Pengembangan SDM Perhubungan dengan Nomor Surat PL.102/B.411/VII/PPSDML-2014 tanggal 3 Juli 2014 perihal Tindak Lanjut BAST Hibah Tanah pada BP2IP Sulawesi Utara

dan telah dijawab oleh Bupati Minahasa Selatan dengan surat Nomor : 801/SEKR/VII-2014 tanggal 24 Juli 2014 perihal Tindak Lanjut BAST Hibah Tanah BP2IP Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara yang menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan akan segera menghibahkan tanah tersebut kepada Kementerian Perhubungan setelah diterbitkannya sertifikat kepemilikan oleh BPN RI.

8. Kendala/Hambatan Penyerapan Anggaran TA. 2014

Kendala-kendala dalam penyerapan anggaran pada TA. 2014 antara lain disebabkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Perencanaan kegiatan yang kurang matang sehingga mengakibatkan beberapa kegiatan yang diblokir
- b. Adanya revisi dokumen anggaran (revisi pencairan Kegiatan Output Cadangan dan Catatan Hal IV DIPA ke DJA)
- c. Proses revisi terkendala karena menunggu selesainya Revisi Pemotongan (APBN-P)
- d. Adanya penyesuaian desain/spek dengan kondisi lapangan
- e. Kegiatan fisik menunggu kegiatan perencanaan selesai
- f. Terkendala pengadaan lahan oleh Pemda
- g. Jumlah SDM pelaksana pengadaan yang bersertifikat tidak memadai dikarenakan kelompok kerja ULP tidak sebanding dengan banyaknya mekanisme paket pekerjaan yang dikontrakkan
- h. Kurangnya pemahaman terhadap peraturan mengenai mekanisme pembayaran dengan menggunakan Aplikasi SPAN
- i. Ketidaksiapan Kepala Kantor selaku KPA yang bersifat *Ex Officio*
- j. Pelaksanaan kegiatan sesuai rencana target penerimaan PNBPN, sehingga tidak dapat dilaksanakan apabila target tidak tercapai
- k. Adanya keterlambatan proses serah terima pekerjaan dari KPA/PPK lama ke KPA/PPK yang baru
- l. Terlambatnya proses pencairan dana untuk pertanggungjawaban kegiatan yang sudah selesai (pihak ketiga belum mengajukan pencairan dana)